



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



P. /  
172



Perseroan telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, pendeteksian risiko dini serta kebijakan *reward and punishment*.

Code of Conduct and Behaviour Guidelines development, detection of early risks as well as reward and punishment policies.

## Dasar-dasar Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di Perseroan didasarkan pada standar penerapan pada industri keuangan secara umum, dengan mengacu ke berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik terbaik yang berlaku di industri keuangan.

## GCG Implementation References

The Company in general implements Good Corporate Governance (GCG) based on the financial industry implementation standard, by referring to the prevailing rules and laws and regulatories as well as best practices.

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

Ketentuan dan peraturan yang dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain:
  - POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
  - POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
  - POJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
  - POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
  - POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
  - POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
  - POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
  - POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
  - POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
  - POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
  - POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

The following are the rules and regulatory:

1. Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company (“Company Law”).
2. Law No. 8 of 1995 regarding the Capital Market (“Capital Market Regulation”).
3. Financial Services Authority Regulations (“POJK”) and Circular Letters (“SEOJK”), among others:
  - POJK No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.
  - POJK No. 17/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 on the Implementation of Integrated Risk Management for Manajemen Risiko Terintegrasi Financial Conglomerates.
  - POJK No. 28/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 on Financing Companies’ Business License and Institutional.
  - POJK No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 on the Financing Companies Business Implementation.
  - POJK No. 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies.
  - POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
  - POJK No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies.
  - POJK No. 27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 on the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions.
  - POJK No. 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 on the Rendering of Public Accountant and Public Accountant Firm Services in the Financial Services Activities.
  - POJK No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
  - POJK No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on the Establishment and Development of Internal Audit Unit Charter.



## Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

- SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 dated 11 July 2017 on the Procedures of Rendering the Public Accountant and Public Accountant Firm Services in the Financial Services Activities.

### Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perusahaan pembiayaan, Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG merupakan suatu keharusan untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan usaha Perseroan serta memelihara kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

### GCG Principles

Coherent with the increasing business risks and challenges faced by the financing industry, the Company realizes that GCG implementation is pivotal in sustaining and maintaining business continuity, as well as keeping the shareholders and stakeholders' trusts to the Company.

The Company committed to continue improving GCG principles implementation in its business activities as has been mandated by the prevailing laws and regulatories. To that end, the Company implements the following GCG principles which covers:

1.	Keterbukaan Transparency	<p>Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perseroan yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.</p> <p>Transparency in decision making process and in the disclosure and provision of relevant information on the Company, which are accessible by the Stakeholders, according to the laws and regulatories for financing industry, including standards, principles and practices of sound financing business.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan oleh Perseroan: Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan Perseroan telah menerapkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan pada rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat komite-komite Perseroan. Hal dimaksud tercermin dalam risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat komite-komite Perseroan.</li> <li>• Keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan telah mencantumkan informasi yang dibutuhkan oleh debitur/konsumen di dalam perjanjian pembiayaan/akad pembiayaan;</li> <li>- Perseroan telah menyampaikan laporan-laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan;</li> </ul> </li> </ul> <p>Perseroan mengungkapkan informasi dengan jelas dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dengan cara mengungkapkan informasi penting dengan memperhatikan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara antara lain pemanfaatan web Perseroan untuk menyediakan pengungkapan informasi termasuk berupa Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
----	-----------------------------	---

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementation in the Company: Transparency in decision making process The Company has implemented the transparency in decision making process through the meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and committees. This is reflected from the meeting minutes of the Board of Directors, Board of Commissioners and committees.</li> <li>Transparency in relevant information disclosures and provisions             <ul style="list-style-type: none"> <li>The Company has stated required information by the debtors/consumers in the financing agreements;</li> <li>The Company has submitted reports to OJK in accordance with the rules.</li> </ul> </li> </ul> <p>The Company discloses clear and accessible information to the stakeholders through key information disclosures by taking into account the procedures in the prevailing regulatories. This among others are done through the Company website for the disclosure of informations, such as Annual Reports, Financial Statements, realization of the IPO proceeds, bonds reports and others according to the applicable regulations.</p>
2.	Akuntabilitas Accountability	<p>Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perseroan, sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.</p> <p>Clarity of function and accountability of the Company's Organs, hence the Company's performance can be progressing transparently, fair, effective and efficient.</p> <p>Pemenuhan oleh Perseroan: Perseroan telah memiliki uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab atas seluruh fungsi dalam struktur organisasi Perseroan.</p> <p>Implementation in the Company: The Company has in place the duties, authorities and responsibilities of all functions within the Company's organization structure</p>
3.	Pertanggungjawaban Responsibility	<p>Yaitu kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.</p> <p>The conformity of the Company's management with financing regulatories and ethical values, as well as standard, principles and sound financing business practices.</p> <p>Pemenuhan oleh Perseroan: Perseroan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya</p> <p>Implementation in the Company: The Company strives in upholding prudent principles in undertaking its business activities.</p>
4.	Kemandirian Independency	<p>Yaitu keadaan Perseroan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.</p> <p>An independent and professional management of the Company's conditions as well as free from the conflict of interests and influence or pressures from any parties that are not in accordance with the financing regulatories and ethical values as well as standard, principles and sound financing business practices.</p> <p>Pemenuhan oleh Perseroan: Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari segala tekanan dari pihak lain. Perseroan senantiasa menghindari segala bentuk benturan kepentingan.</p> <p>Implementation in the Company: The Company is independently and professionally managed as well as impartial from any pressures of any parties. The Company strives to prevent any forms of conflict of interests.</p>

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

5.	Kesetaraan dan kewajaran Fairness	<p>Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.</p> <p>The equality, balance and fairness in fulfilling Stakeholders rights from the agreements, laws and regulatories, and etchial values as well as standard, principles and sound financing business practices.</p> <p>Pemenuhan oleh Perseroan: Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>Stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). Seluruh <i>Stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</p> <p>Implementation in the Company: The Company strives to take into account the interest of all Stakeholders pursuant to the equal treatment principle. In accordance with the transparency principle, all Stakeholders are granted the access toward informations.</p>
----	--------------------------------------	---

**Pelaksanaan GCG 2018**

Wujud penerapan GCG di Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran pada beberapa pedoman dan/atau kebijakan internal Perseroan yang ada terkait tata kelola agar selalu selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Piagam Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2018;
  - b. Piagam Direksi yang ditetapkan pada tanggal 04 September 2018;
  - c. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.

Hal ini dilakukan dikarenakan pedoman dan/atau kebijakan internal Perseroan yang ada terkait tata kelola merupakan sarana pendukung infrastruktur GCG dan sarana pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya.
3. Perseroan telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, pendeteksian risiko dini serta kebijakan *reward and punishment*

**Penilaian GCG**

Dalam rangka mengevaluasi dan/atau mengukur penerapan GCG di Perseroan:

1. Melakukan Penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan:

**GCG Implementation in 2018**

The Company's GCG implementation are among others as follows:

1. Update on the Company's guidelines and/or internal policies related to governance in conformity with prevailing laws and regulatories, which include:
  - a. BOC Charter stipulated on 18 April 2018;
  - b. BOD Charter ratified on 04 September 2018;
  - c. Code of Conduct stipulated on 20 September 2018.

The update on these guidelines was undertaken as they serve as GCG infrastructure supporting structure and in compliance with the regulatories.
2. Fulfillment of GCG principles within every business activities.
3. Code of Conduct and Behaviour Guidelines development, detection of early risks as well as reward and punishment policies.

**GCG Assessments**

On the evaluation and/or measurement of GCG, the Company carried out the following:

1. Self assessment of GCG implementation in accordance with:

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

- POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan; dan
- SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh Perseroan tersebut dituangkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang wajib disusun pada setiap akhir tahun buku dan dilaporkan kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

2. Penilaian pelaksanaan penerapan GCG oleh pihak eksternal  
Pada tahun 2018, Perseroan mengikuti penilaian yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dalam rangka mengevaluasi dan/atau mengukur pelaksanaan penerapan GCG di Perseroan dengan mengikuti *Indonesia Good Corporate Governance Award 2018* (4<sup>th</sup> IGCGA 2018) yang diselenggarakan tanggal 2 November 2018 di Jakarta dimana Perseroan memperoleh penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

- POJK No. 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies; and
- SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 dated 9 May 2016 on the Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Companies.

The GCG self assessment is stated in the Good Corporate Governance Implementation Report that is mandatory to be developed by the Company at the end of fiscal year and reported to OJK at the latest on 30 April of the next fiscal year.

2. GCG assessment by external party

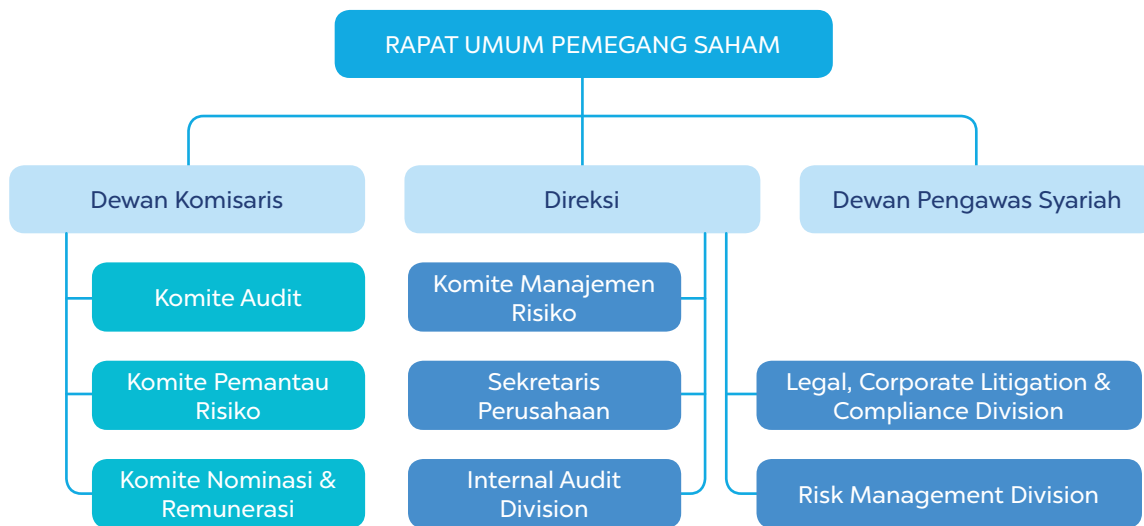
In 2018, the Company participated in the assessment undertaken by external party to evaluate and/or measure the GCG implementation in the Company. As such, the Company participated in the *Indonesia Good Corporate Governance Award 2018* (4<sup>th</sup> IGCGA 2018) held on 2 November 2018 in Jakarta. The Company received the recognition as detailed below:

Kategori / Category	:	Public Company
Sektor / Sector	:	Multifinance
Nilai / Score	:	84.28
Tingkat / Grade	:	B
Penghargaan / Award	:	Gold
Penilaian kembali / Remarks	:	Excellent





## STRUKTUR TATA-KELOLA Corporate Governance Structure



p.

178

Struktur tata kelola perusahaan di Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris yaitu:  
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Komite dibawah Direksi yaitu:  
Komite Manajemen Risiko.
7. Sekretaris Perusahaan.
8. *Risk Management Division, Legal Corporate Litigation & Compliance Division, Internal Audit Division.*

### Rencana Penerapan GCG Tahun 2019

Aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka menerapkan GCG di Perseroan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembaharuan dan/atau pengkinian terhadap kebijakan internal yang ada terkait GCG.
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan terus ditingkatkan.
3. Melaksanakan penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG di Perseroan untuk mengukur efektivitas penerapan GCG yang dilakukan Perseroan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan terhadap hasil penilaian sendiri tersebut.

The Company's governance structure consists of:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
2. Board of Commissioners
3. Board of Directors
4. Sharia Supervisory Board
5. BOC Committees, namely:  
Audit Committee, Risk Oversight Committee, Nomination and Remuneration Committee.
6. BOD Committees, namely:  
Risk Management Committee.
7. Corporate Secretary.
8. Risk Management Division, Legal Corporate Litigation & Compliance Division, Internal Audit Division.

### GCG Key Plans in 2019

The following are planned activities on the Company's GCG implementation in 2019:

1. Update and/or renew the internal policies related to GCG.
2. Continuing the improvement of GCG principles in the Company.
3. Self assessment on GCG implementation in the Company to measure its effectiveness and follow up on such self assessment results.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

- RUPS Tahunan ("RUPST") yang diselenggarakan tiap tahun dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Rapat.

RUPS Perseroan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

Dalam mengambil keputusan, RUPS Perseroan harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur dan kepentingan pemegang saham minoritas.

### Hak dan Wewenang Pemegang Saham Dalam RUPS

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Wewenang yang dimiliki pemegang saham melalui RUPS diantaranya meliputi:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk keperluan pemeriksaan tahun buku berjalan;
4. Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company's organ that has the untransferrable authorities to the Board of Commissioners or Board of Directors, within the limits as set out in the Company Law and/or the Company's Articles of Association.

The Company's GMS consists of:

- The Annual GMS ("AGMS") that shall be held annually at the latest 6 (six) month following the closing of the Company's fiscal year.
- Other GMS, namely the Extraordinary GMS ("EGMS") as stated in the Company's Articles of Association that shall be held at anytime based on Meeting requirements.

The Company's GMS shall be convened according to prevailing laws and regulatories as well as the Company's articles of association.

In the decision making, the Company's GMS shall maintain all parties' interests, specifically the interest of Debtors, Creditors and minority shareholders' interest.

### Shareholders Rights and Authorities in the GMS

The GMS is a forum for the shareholders' to take decision with due observance to and abiding to the rules of the articles of association, Company Law as well as relevant regulatories.

The shareholders' authorities in the GMS among others include:

1. To approve the amendment of the Company's Articles of Association;
2. To appoint and terminate members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and members of Sharia Supervisory Board;
3. To appoint the public accountant firm for the audit of relevant fiscal year;
4. Other matters that are proposed accordingly in the GMS in accordance with the rules of the Articles of Association.





## Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Hak pemegang saham dalam RUPS antara lain:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.
2. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Terbuka.
3. Menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukan bagi pemegang saham dalam bentuk *dividen* dan pembagian keuntungan lainnya sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

### Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Pada tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB yang diselenggarakan bersamaan pada tanggal 15 Maret 2018.

Mekanisme penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The shareholders' rights in the GMS are:

1. The rights to attend and vote in the GMS.
2. In the GMS, the shareholders have the right to attain meeting agenda and relevant material on the meeting agenda to the extent that it is not against the interests of Public Companies.
3. To accept part of the Company's profit intended for the shareholders in a form of dividend and other profitability distribution according to the prevailing regulatories.

### GMS Convention Mechanisms

In 2018, the Company has convened 1 (one) AGMS and 1 (one) EGMS which simultaneously convened on 15 March 2018.

The 2018 AGMS and EGMS convention mechanisms have been implemented in accordance with the Company's Articles of Association, POJK No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders for Public Companies and POJK No.10/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 on the Amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders for Public Companies.

### Tahapan Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tanggal 15 Maret 2018 Stages of the AGMS and EGMS Convention Dated 15 March 2018

	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the AGMS & EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatories
Pemberitahuan RUPST & RUPSLB kepada Regulator  AGMS & EGMS Notification to the Regulators	Surat pemberitahuan rencana RUPST & RUPSLB kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia ( <i>e-reporting</i> ) pada tanggal 29 Januari 2018.  Notification letter of the AGMS & EGMS plan to OJK and Bursa Efek Indonesia ( <i>e-reporting</i> ) on 29 January 2018.	Pemberitahuan mengenai mata acara RUPST & RUPSLB yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST & RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPST & RUPSLB.  Notification on the AGMS & EGMS agenda in clarity and detailed as well as submitted at the latest 5 (five) working-days prior to the AGMS & EGMS announcement, excluding the announcement date.

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

Tahapan Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tanggal 15 Maret 2018  
Stages of the AGMS and EGMS Convention Dated 15 March 2018

	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the AGMS & EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatory
Pengumuman RUPST & RUPSLB  AGMS & EGMS Announcement Date	<p>Diumumkan pada surat kabar Harian Kontan tanggal 06 Februari 2018; Diunggah pada situs web Perseroan tanggal 06 Februari 2018; Diunggah pada situs web Bursa Efek pada tanggal 06 Februari 2018; Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK pada tanggal 06 Februari 2018 dan BEI (<i>e-Reporting</i>) pada tanggal 06 Februari 2018.</p> <p>Announced in Kontan daily newspaper on 6 February 2018; Uploaded in the Company's website on 6 February 2018; Uploaded in the stock exchange website on 6 February 2018; Announcement proof was submitted to OJK on 6 February 2018 and BEI (<i>e-Reporting</i>) on 6 February 2018.</p>	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPST &amp; RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan.</p> <p>Bukti pengumuman RUPST &amp; RUPSLB disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPST &amp; RUPSLB.</p> <p>Submitted at least through 1 (one) national daily newspaper of Indonesian language, Stock Exchange and the Company's websites in Indonesian and English languages at the latest 14 (fourteen) days prior to the AGMS &amp; EGMS invitation date, excluding the notification and invitation dates.</p> <p>The AGMS &amp; EGMS announcement proof is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days following the announcement.</p>
Panggilan RUPST & RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPST & RUPSLB  AGMS & EGMS Invitation including the agenda	<p>Diumumkan pada surat kabar Harian Kontan tanggal 21 Februari 2018; Diunggah pada situs web Perseroan tanggal 21 Februari 2018; Diunggah pada situs web bursa efek pada tanggal 21 Februari 2018; Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK pada tanggal 21 Februari 2018 dan BEI (<i>e-Reporting</i>) pada tanggal 21 Februari 2018.</p> <p>Announced in Kontan daily newspaper on 21 February 2018; Uploaded in the Company's website on 21 February 2018; Uploaded in the stock exchange website on 21 February 2018; Announcement proof was submitted to OJK on 21 February 2018 and BEI (<i>e-Reporting</i>) on 21 February 2018.</p>	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST &amp; RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPST &amp; RUPSLB.</p> <p>Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>Submitted at least through 1 (one) national daily newspaper of Indonesian language, Stock Exchange and the Company's websites in Indonesian and English languages at the latest 21 (twenty one) days prior to the AGMS &amp; EGMS convention date, excluding the invitation and the AGMS &amp; EGMS dates.</p> <p>The AGMS &amp; EGMS invitation proof is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days following the invitation.</p>
Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB  AGMS & EGMS Convention	<p>Tanggal 15 Maret 2018  Dated 15 March 2018</p>	



## Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

### Tahapan Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tanggal 15 Maret 2018 Stages of the AGMS and EGMS Convention Dated 15 March 2018

		Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the AGMS & EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatory
Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB  AGMS & EGMS Minutes of Meeting Summary	Pengumuman Ringkasan risalah rapat  Minutes of Meeting Announcement	Ringkasan risalah RUPST & RUPSLB diumumkan pada surat kabar Harian Kontan tanggal 19 Maret 2018; Ringkasan risalah RUPST & RUPSLB diunggah pada situs web Perseroan dan situs Bursa Efek pada tanggal 20 Maret 2018.  The AGMS & EGMS meeting minutes summary was announced in Kontan daily newspaper on 19 March 2018; The AGMS & EGMS meeting minutes summary was uploaded in the Company's and stock exchange's websites on 20 March 2018.	Ringkasan risalah RUPST & RUPSLB disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.  The AGMS & EGMS meeting minutes summary is submitted at least through 1 (one) national daily newspaper of Indonesian language, Stock Exchange and the Company's websites in Indonesian and English languages at the latest 2 (two) working days following the AGMS & EGMS convention.
	Laporan ke Regulator  Report to the Regulators	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST & RUPSLB disampaikan kepada OJK pada tanggal 19 Maret 2018.  The announcement proof of the AGMS & EGMS meeting minutes summary was submitted to OJK on 19 March 2018.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST & RUPSLB disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.  The announcement proof of the AGMS & EGMS meeting minutes summary is submitted at least 2 (two) working days after the announcement.
Risalah RUPST & RUPSLB  AGMS & EGMS Minutes of Meeting	Akta Risalah RUPST & RUPSLB dari Notaris disampaikan ke OJK pada tanggal 13 April 2018.  The AGMS & EGMS Minutes of Meeting Deed was submitted to OJK on 13 April 2018.	Akta Risalah RUPST & RUPSLB disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.  The AGMS & EGMS Minutes of Meeting Deed is submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days following the AGMS & EGMS convention.	

## PELAKSANAAN RUPST & RUPSLB AGMS & EGMS Convention

Tanggal dan Waktu Date and Time	15 Maret 2018 / 09.30 – 10.41 15 March 2018 / 09.30 – 10.41
Tempat Venue	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Kuorum Quorum	RUPST dihadiri oleh 3.180.173.249 saham (91,35%) dari total 3.481.481.480 saham. The AGMS was attended by 3,180,173,249 shares (91.35%) from the total shares of 3,481,481,480
Pimpinan RUPS GMS Chairman	I Nyoman Tjager Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including President Commissioner	a. I Nyoman Tjager b. Robbyanto Budiman c. Garibaldi Thohir d. Thilagavaty Nadason e. Myrnie Zachraini Tamin

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including President Director	a. Djaja Suryanto Sutandar b. Simon Tan Kian Bing c. Zacharia Susantadiredja d. Anthony Y Panggabean e. Njauw Vido Onadi
Notaris Notary	Leolin Jayayanti, SH, M.Kn,
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Total shareholders submitting questions and/or providing opinions	Nihil / Nil
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST AGMS decision making mechanisms	Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham, dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan <i>abstain</i> , sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara <i>abstain</i> dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pada pemegang saham yang mengeluarkan suara. The decision making mechanisms is orally conducted by requesting the shareholders and/or its proxies to raise hand for dis-approved voting and abstain, whereas the approved voting are not requested to raise hand. Abstain voting is considered as the same voting with majority voting from the shareholders.

AGENDA, HASIL & REALISASI RUPST  
AGMS Agenda, Resolutions & Realizations

Agenda 1	
Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2017.	The Company's Activity Report Fiscal Year 2017.
Hasil Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2017.	Resolutions Approved and accepted the Company's Activity Report Fiscal Year 2017.
Realisasi Telah direalisasikan	Realizations Has been realized
Agenda 2	
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Ratification of the Company's Annual Financial Statements for Fiscal Year ended 31 December 2017.
Hasil Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana ternyata dari laporan Auditor tertanggal 15 Februari 2018 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material". Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2017 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2017. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.	Resolutions Approved and ratified the Company's Annual Financial Statements for Fiscal Year ended 31 December 2017 that has been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) as stated in the Auditor report dated 15 February 2018 with the opinion "Fair in all material respects". Provided full release and discharge ( <i>acquit et de charge</i> ) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company that served in 2017 over the management and oversight of the Company carried out throughout the Financial Year 2017. To the extent that such management actions and supervisory were reflected in the Company's books and notes throughout 2017, and are not a criminal offense.
Realisasi Telah direalisasikan	Realizations Has been realized
Agenda 3	
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Stipulation of the Company's Profit allocation for Fiscal Year ended 31 December 2017.



## Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

### Agenda 3

#### Hasil

Sebesar Rp1.000.000.000 dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;

Maksimal sebesar Rp54.199.516.202,1 atau 30% dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2017 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen sebesar Rp15,5 per saham;

Sisa dari laba bersih sebesar Rp 125.465.537.805 akan dicatat sebagai Laba ditahan; dan

Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018.

Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 18 April 2018 dengan cara membayar dividen tunai (*cash dividend*) sejumlah Rp15,5 setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan.

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

#### Resolutions

Amounted to Rp1,000,000,000 from the Company's net profit to be used as reserve fund to fulfill the provision of Article 70 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company and article 24 of the Company's Articles of Association;

Maximum at Rp54,199,516,202.1 or 30% from the Company's net profit shall be distributed as cash dividend for fiscal year 2017 that shall be distributed to 3,481,481,480 shares, thereby every share will receive a dividend at Rp15.5 per share;

The balance of net profit amounted to Rp125,465,537,805 will be posted as Retained Earnings; and

Approved the cash dividend payout for fiscal year 2017 with the following rules:

The shareholders that have the right to accept the cash dividend of fiscal year 2017 are the Company's shareholders recorded in the Company's Shareholders Registry dated 27 March 2018.

Cash dividend will be paid on 18 April 2018 by paying cash dividend totaling Rp15.5 for every share. Taxes are applicable for the dividend payout in accordance with the prevailing rules that shall be deducted by the Company.

Granted power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all matters in relations with the dividend payout as well as to announce it with due observance to the prevailing regulations.

#### Realisasi

Telah direalisasikan

#### Realizations

Has been realized

### Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

#### Hasil

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018. Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp579.400.000 dengan syarat-syarat yang dianggap baik.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

#### Resolutions

Appointed Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) to carry out the Company's Financial Audit for fiscal year ended 31 December 2018. The service fee was at Rp579,400,000 with reasonable terms.

Granted authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in relations with the appointment of such Public Accountant, including to notify and announce to the public (if necessary).

#### Realisasi

Telah direalisasikan

#### Realizations

Has been realized

### Agenda 5

Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

#### Hasil

Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat 6 (enam) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan

#### Resolutions

The division of duties and authorities of members of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2018 was proposed to be delegated to the Company's Board of Directors with due observance to the Article 92 paragraph 6 (six) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, with prior approval from the Company's Board of Commissioners.

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

Agenda 5	
Realisasi Telah direalisasikan	Realizations Has been realized
Agenda 6	
Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.	Stipulation of service fees amount and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board, as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2018.
Hasil Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.	Resolutions The determination of service fees amount and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board is proposed to be delegated the authority to the Company's President Commissioner by taking into account the proposal and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, and such amount of service fees and or other benefits in any forms that has been stipulated for members of the Board of Commissioners and members of Sharia Supervisory Board will be stated in the Annual Report fiscal year 2018.  Granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2018 with due observance to the proposal and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, and such salary and/or other benefits in any forms that has been stipulated for members of the Company's Board of Directors will be stated in the Annual Report fiscal year 2018.
Realisasi Telah direalisasikan	Realizations Has been realized
Agenda 7	
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2017: Obligasi Berkelanjutan II WOM FINANCE Tahap II Tahun 2017; Obligasi Berkelanjutan II WOM FINANCE Tahap III Tahun 2017.	Realization Report of the Use of Initial Public Offering Proceeds of the Company during 2017: Shelf Bonds II WOM Finance Phase II Year 2017; Shelf Bonds II WOM Finance Phase II Year 2017.
Hasil Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II dan III Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.	Resolutions Approved and accepted the Realization Report of the Shelf Bonds II Public Offering of WOM Finance Phase II and III Year 2017 as stated in the Company's Report that has been submitted to the Financial Services Authority, of which the brief descriptions has been submitted to the Meeting.
Realisasi Telah direalisasikan	Realizations Has been realized





## Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

### AGENDA, HASIL & REALISASI RUPSLB EGMS Agenda, Resolutions & Realizations

Agenda 1	
Perubahan tempat kedudukan Perseroan	Change of the Company's premises
<p><b>Hasil</b> Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, termasuk didalamnya menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk memohon persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>Resolutions</b> Approved the changed of the Company's premises, including to approve the amendment of the Company's Articles of Association specifically Article 1 paragraph 1. Delegated the authority and power to the Company's Board of Directors to restate and/or reaffirm in the Notary deed (including the amendment and/or addition) in relations with the amendment of rules in the Company's Articles of Association, as well as granted authority and power to the Company's Board of Directors with substitution rights for the Notary to request the approval to the authorized institutions and as such to also propose other documentations; in brief to undertake all other actions as required in accordance with the rules of the Company's Articles of Association and prevailing regulatories.</p>
<p><b>Realisasi</b> Telah direalisasikan</p>	<p><b>Realizations</b> Has been realized</p>

Agenda 2	
<p>Peretujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2018.</p>	<p>Approval on the Company's plan to divert, release the rights or to place as collateral the majority or entire receivables of the Company, in an effort to obtain loans and/or funding (including sharia) from banking financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) as well as non banks, locally or overseas in Fiscal Year 2018.</p>
<p><b>Hasil</b> Menyetujui tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank Permata Tbk serta atas rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2018 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB II sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.247.000.000.000 dalam beberapa tahap pada tahun buku 2018. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik perseroan yang timbul karena pemberian pembiayaan terkait penerbitan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan obligasi dan pelaksanaannya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan efektifitas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance dari Otoritas Jasa Keuangan serta pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas dengan pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</p>	<p><b>Resolutions</b> Approved the Board of Directors action to place as collateral the majority of the Company's assets, i.e. its receivables arising from the financing from the Company in relations with the loans and/or funding from PT Bank Permata Tbk as well as the Company's plan to divert, release or to place as collateral the majority or entire receivables of the Company, in an effort to obtain loans and/or funding (including sharia) from banking financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) as well as non banks, locally or overseas in Fiscal Year 2018, including to place as collateral due to the issuance of shelf Bonds public offering II to the highest amount of Rp2,247,000,000,000 in several phases in fiscal year 2018. Approved the Company's plan to place as collateral the majority or entire receivables of the Company arising from the financing related to the Shelf Bonds III WOM Finance up to the highest amount of Rp5,000,000,000,000. Granted power and authority with substitution rights to the Board of Directors to undertake all actions required in regards to the issuance of bonds and its implementations within 2 (two) years effective as of the attainment of Issuance Effectiveness of Shelf Bonds III WOM Finance from the Financial Services Authority, as well as to place as debt collateral for the majority or entire receivables of the Company as stated in point 1 (one) above implemented within a period of 1 (one) year or until the next Annual General Meeting of Shareholders.</p>
<p><b>Realisasi</b> Telah direalisasikan</p>	<p><b>Realizations</b> Has been realized</p>

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders**Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST  
dan RUPSLB Tahun Sebelumnya**  
Previous AGMS and EGMS Resolutions &  
Realizations

Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017   Annual GMS Resolutions 2017	Telah Direalisasikan Has Been Realized
Pertama & Kedua First & Second	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2016.</li> <li>Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 ("PUB I") sebagaimana tercantum dalam Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam rapat.</li> <li>Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, Firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited sebagaimana ternyata dari laporan Auditor tertanggal 1 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".</li> <li>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2016 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2016. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2016, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.</li> <li>Approved and accepted the Company's Activity Report Fiscal Year 2016.</li> <li>Approved and accepted the Realization Report of Shelf Bonds Public Offering II Phase I Year 2016 as stated in the Company's Activity Report Fiscal Year 2016 that has been submitted to the Financial Services Authority as well as brief explanation that has been submitted in the meeting.</li> <li>Ratified the Company's Annual Financial Statements for Fiscal Year ended 31 December 2016 that has been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, Member Firm of Ernst &amp; Young Global Limited as stated in the Auditor report dated 1 March 2017 with the opinion "Fair in all material respects".</li> <li>Following the approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Annual Financial Statements as well as Balance Sheet and Profit Loss for Fiscal Year ended 31 December 2016, then in accordance with the rules in the article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, as such the Meeting has granted full release and discharge (<i>acquitt et de charge</i>) to members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners served during 2016 on all management and oversight during Fiscal Year 2016. To the extent that the management actions and supervisory were reflected in the Company's books and notes during 2016, so long as it is not considered as criminal offense.</li> </ul>	√
Ketiga Third	<p>Penggunaan Laba Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp60.303.211.828 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyisihkan sebesar Rp1.000.000.000 dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>Sisa dari laba bersih sebesar Rp59.303.211.828 akan dicatat sebagai laba ditahan;</li> <li>Tidak membagikan dividen; dan</li> <li>Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan penggunaan laba tersebut.</li> </ul> <p>The allocation of profit for Fiscal Year ended 31 December 2016 amounted to Rp60,303,211,828 as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apportioned Rp1,000,000,000 from the Company's net profit for reserve fund to fulfill the rules in the Article 70 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company;</li> <li>The balance of net profit amounted to Rp59,303,211,828 will be posted as retained earnings;</li> <li>No dividend payout; and</li> <li>Granted power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all actions in relations with the use of such profit.</li> </ul>	√

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017   Annual GMS Resolutions 2017	Telah Direalisasikan Has Been Realized
Keempat Fourth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017. Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp551.800.000 atau sama dengan tahun buku sebelumnya dengan syarat-syarat yang dianggap baik.</li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).</li> <li>Appointed Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (Member Firm of Ernst &amp; Young Global Limited) to carry out the Company's Financial Audit for fiscal year ended 31 December 2017. The service fee was amounted to Rp551,800,000 or equivalent to the previous fiscal year with the reasonable terms.</li> <li>Granted authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in relations with the appointment of such Public Accountant, including to notify and announce to the public (if necessary).</li> </ul>	√
Kelima Fifth	<p>1. Mengangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapak Djaja Suryanto Sutandar sebagai Presiden Direktur Perseroan;</li> <li>Bapak Zacharia Susantadiredja, Bapak Anthony Y Panggabean, dan Bapak Njauw Vido Onadi masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan; serta</li> <li>Bapak Simon Tan Kiang Bing sebagai Direktur Independen Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No Kep-00001/BEI/01-2014. Tanggal 30 Januari 2014.</li> </ul> <p>2. Mengangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapak I Nyoman Tjager sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan; dan</li> <li>Bapak Robbyanto Budiman sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;</li> <li>Bapak Garibaldi Thohir dan Ibu Thilagavathy Nadason sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta;</li> <li>Ibu Myrnie Zachraini Tamin sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan.</li> </ul> <p>3. Mengangkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan,</li> <li>Bapak H.M. Taufik Darmansyah, SE dan Bapak Dr. Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sesuai dengan surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - MUI Nomor U-133/DSN-MUI/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017.</li> </ul> <p>Pengangkatan tersebut untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).</p> <p>Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris          Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Tjager          Wakil Presiden Komisaris : Bapak Robbyanto Budiman          Komisaris : Bapak Garibaldi Thohir          Komisaris : Ibu Thilagavathy Nadason          Komisaris Independen : Ibu Myrnie Zachraini Tamin</p> <p>Direksi          Presiden Direktur : Bapak Djaja Suryanto Sutandar          Direktur Independen : Bapak Simon Tan Kian Bing          Direktur : Bapak Zacharia Susantadiredja          Direktur : Bapak Anthony Y Panggabean          Direktur : Bapak Njauw Vido Onadi</p> <p>Dewan Pengawas Syariah          Ketua : Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA          Anggota : Bapak H.M. Taufik Darmansyah, SE dan Bapak Dr. Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen.</p> <p>4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.</p>	√

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017   Annual GMS Resolutions 2017	Telah Direalisasikan Has Been Realized
Kelima Fifth	<p>1. Appointed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Djaja Suryanto Sutandar as President Director;</li> <li>Zacharia Susantadiredja, Anthony Y Panggabean, and Njauw Vido Onadi each as members of the Board of Directors; and</li> <li>Simon Tan Kiang Bing as Independent Director as stipulated in Bursa Efek Indonesia No Kep-00001/BEI/01-2014 dated 30 January 2014.</li> </ul> <p>2. Appointed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I Nyoman Tjager as President Commissioner and Independent Commissioner; and</li> <li>Robbyanto Budiman as Vice President Commissioner;</li> <li>Garibaldi Thohir and Thilagavathy Nadason as members of the Board of Commissioners; as well as</li> <li>Myrnie Zachraini Tamin as Independent Commissioner.</li> </ul> <p>3. Appointed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA as Chairman of Sharia Supervisory Board;</li> <li>H.M. Taufik Darmansyah, SE and Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen as members of Sharia Supervisory Board in accordance with the recommendation letter of National Sharia Board - MUI No. U-133/DSN-MUI/III/2017 dated 2 March 2017.</li> </ul> <p>The appointment was for tenure effective as of the closing of this Meeting until the conclusion of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2020. As such the composition of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board as follows:</p> <p>Board of Commissioners President Commissioner/ Independent Commissioner : I Nyoman Tjager Vice President Commissioner : Robbyanto Budiman Commissioner : Garibaldi Thohir Commissioner : Thilagavathy Nadason Independent Commissioner : Myrnie Zachraini Tamin</p> <p>Board of Directors President Director : Djaja Suryanto Sutandar Independent Director : Simon Tan Kian Bing Director : Zacharia Susantadiredja Director : Anthony Y Panggabean Director : Njauw Vido Onadi</p> <p>Sharia Supervisory Board Chairman : Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA Member : H.M. Taufik Darmansyah, SE and Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen.</p> <p>4. Granted power to the Company's Board of Directors to state in separate deed before the Notary, notify/ register in the authorized institutions in relations with the changed of composition of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.</p>	

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017   Annual GMS Resolutions 2017	Telah Direalisasikan Has Been Realized
Keenam Sixth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat 6 (enam) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.</li> <li>Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017.</li> <li>Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017.</li> <li>Division of duties and authority of members of the Board of Directors for Fiscal Year 2017 was proposed to be delegated to the Company's Board of Directors with due observance to the rules in Article 92 paragraph (6) of Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company, with prior approval from the Company's Board of Commissioners.</li> <li>The determination of service fees amount and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board was proposed to be delegated the authority to the Company's President Commissioner by taking into account the proposal and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, and such amount of service fees and or other benefits in any forms that has been stipulated for members of the Board of Commissioners and members of Sharia Supervisory Board will be stated in the Annual Report fiscal year 2017.</li> <li>Granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2017 with due observance to the proposal and recommendation of the Nomination and Remuneratin Committee, and such salary and/or other benefits in any forms that has been stipulated for members of the Company's Board of Directors will be stated in the Annual Report fiscal year 2017.</li> </ul>	√

Agenda	Keputusan RUPS Luar Biasa 2017 Extraordinary GMS Resolutions 2017	Telah Direalisasikan Has Been Realized
Pertama First	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan berupa piutang milik Perseroan yang timbul akibat perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria'h) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank baik termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB II sampai jumlah setinggi-tingginya Rp3,7 triliun dalam beberapa tahap pada tahun buku 2017.</li> <li>Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan tersebut diatas.</li> <li>Approved the Company's plan to place as collateral the majority of its assets in the form of receivables of the Company arising from the loans and/or funding (including sharia) from the bank and non bank financial institutions, including the provision of collateral for the issuance of Bonds Public Offering II up to the highest amount at Rp3.7 trillion in several stages in fiscal year 2017.</li> <li>Granted power and authority with substitution rights to the Company's Board of Director to undertake all actions required in relations with such collaterals above.</li> </ul>	√

# DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

## Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan antara lain:

1. Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi guna kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
4. Memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
5. Melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha di semua tingkatan organisasi.
6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite-Komite. Setiap Komite akan dipandu oleh Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite-Komite tersebut adalah:
  - i. Komite Audit;
  - ii. Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - iii. Komite Pemantau Risiko.
8. Mengevaluasi kinerja komite terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud angka 7 diatas.
9. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.

## Board of Commissioners Duties & Responsibilities

Referring to the Company's Articles of Association, and prevailing laws and regulatories, the Board of Commissioners duties and responsibilities among others are:

1. Responsibility in oversight on the Board of Directors' policy in the management of the Company, general management, both on the Company and its businesses, and provide advisory to the Board of Directors for the interest of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives.
2. To direct, monitor and evaluate the implementation of the Company's strategic policy.
3. Oversight on the Board of Directors' responsibility implementation toward the anti money laundering and terrorism financing prevention implementation.
4. To ensure discussion on anti money laundering and terrorism financing prevention in the meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Oversight on GCG implementation in every business activity in all levels of organization.
6. To ensure that the Board of Directors has followed up the audit findings and recommendations from the Company's Internal Audit, external auditors, supervisory results of OJK and/or other regulators.
7. To enhance the effectiveness of its duties implementation and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish the Committees. The Committee shall be guided by the Charter stipulated and/or approved by the Board of Commissioners.  
The Committees are:
  - i. Audit Committee;
  - ii. Nomination and Remuneration Committee;
  - iii. Risk Oversight Committee.
8. To evaluate the committees' performance related to the duties implementation and responsibilities as stated in the above point 7.
9. Provide approval in the event that the Company's Sharia Supervisory Board requires the assistance of committees' members which organization structure is under the Board of Commissioners.





## Dewan Komisaris Board of Commissioners

- |  |  |
|--|--|
| <p>10. Mengkaji visi dan misi Perseroan.</p> <p>11. <i>Mereview</i> dan menyetujui laporan tahunan Perseroan.</p> <p>12. Menyusun/memiliki Piagam Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya Perseroan.</p> <p>13. Menyenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan.</p> <p>14. Menerima pengaduan/pelaporan secara tertulis dari karyawan Perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga terkait temuan dugaan pelanggaran sehubungan dengan pelaporan keuangan Perseroan.</p> <p>15. Melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan Perseroan dengan mempertimbangkan hasil telaahannya yang telah dilakukan Komite Audit Perseroan terkait pengaduan/pelaporan tersebut.</p> <p>16. Khusus Komisaris Independen, Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/ atau</li> <li>ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.</li> </ol> <p>17. Melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> | <p>10. To review the Company's vision and mission.</p> <p>11. To review and approve the Company's annual reports.</p> <p>12. To develop/ to have the BOC Charter as the guidance for the Board of Commissioners in implementing its function, duties and responsibilities for the oversight of the Company's management.</p> <p>13. To convene the Board of Commissioners' meeting that at least covering the frequencies, attendance, and decision making procedures as stated in the BOC Charter applicable in the Company.</p> <p>14. To accept written reporting/complaint from the Company's employees, shareholders or third parties related to the finding of violations allegation in relations with the Company's financial reporting.</p> <p>15. To follow up the settlement for the reporting/complaint of violations allegation related to the Company's financial report by considering the analysis results carried out by the Company's Audit Committee on such reporting/complaint.</p> <p>16. Specifically for the Independent Commissioner, the Independent Commissioner shall report to OJK at the latest 10 (ten) calendar days since the findings of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Violation of regulatories in financing; and/ or</li> <li>ii. Situation or reckoning of situation that can be detrimental to the Company's business continuity.</li> </ol> <p>17. To conduct duties and responsibilities of other Board of Commissioners that stipulated in the Articles of Association, the Company internal rules, and prevailing regulatories for the Board of Commissioners.</p> |
|--|--|

P.

192

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pengungkapan pedoman atau piagam Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang isi Laporan Tahunan yang antara lain menyatakan bahwa uraian Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan mencakup pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris.

### BOC Charter

The disclosure of BOC Charter in the Annual Report is carried out based on the Circular Letter of Financial Services Authority No. 30/SEOJK.04/2016 on the Formulation and Contents of the Annual Report of Issuers or Public Companies in Chapter III of the Annual Report contents which among others stating that the Corporate Governance elaboration of the Issuers or Public Companies in the Annual Report shall cover the BOC Charter statements.

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris tertanggal 18 April 2018 (“Piagam Dewan Komisaris”) yang disusun untuk menjadi rujukan/pedoman bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien maupun untuk pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Untuk memastikan Piagam Dewan Komisaris tetap relevan bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Dewan Komisaris diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Piagam Dewan Komisaris Perseroan mengatur antara lain mengenai:

1. Landasan;
2. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris;
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
4. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris;
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris;
7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris Berakhir;
8. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
9. Kewenangan Anggota Dewan Komisaris;
10. Waktu Kerja;
11. Keanggotaan dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
12. Nilai-nilai Dasar dan Etika Kerja;
13. Transparansi Kepemilikan Saham dan Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga;
14. Rapat Dewan Komisaris;
15. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
16. Remunerasi Dewan Komisaris;
17. Sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan;
18. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Piagam Dewan Komisaris Perseroan dimuat pada laman *website* Perseroan ([www.wom.co.id](http://www.wom.co.id)).

The Company has in place the BOC Charter dated 18 April 2018 that developed as reference/guidance for members of the Company’s Board of Commissioners in implementing effective and efficient duties or for other parties related to the implementation of the Board of Commissioners’ duties.

To ensure relevancy of the BOC Charter for every member of the Company’s Board of Commissioners, the BOC Charter is updated from time to time to be in coherent with the regulatories development and best practices.

The Company’s BOC Charter regulates among others on the:

1. Foundation;
2. Board of Commissioners Structure and Composition;
3. Limitation of Concurrent Position of the Board of Commissioners Members;
4. Appointment of the Board of Commissioners Members;
5. Tenure of the Board of Commissioners Members;
6. Resignation of the Board of Commissioners Members;
7. Completion of the Board of Commissioners Members’ Position;
8. Description of the Board of Commissioners Duties and Responsibilities;
9. Authorities of the Board of Commissioners Members;
10. 10. Work-hour;
11. Membership in the Integrated Governance Committee;
12. Core Values and Work Ethics;
13. Transparency of Shares Ownership and Disclosure of Financial and Familial Relations;
14. Board of Commissioners Meetings;
15. Board of Commissioners Performance Assessment;
16. Board of Commissioners Remuneration;
17. Certifications and Sustainability Terms;
18. Reporting and Accountability.

The Company’s BOC Charter is included in the Company’s website ([www.wom.co.id](http://www.wom.co.id)).



Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

### Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris

1. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota.
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Seorang Presiden Komisaris;
  - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan);
  - c. Seorang Komisaris atau lebih.
3. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi anggota Direksi.

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, 1 (satu) Wakil Presiden Komisaris, 2 (dua) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan. Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 40% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Board of Commissioners Structure and Composition

1. The composition of the Board of Commissioners members is determined with due observance to the diversity, knowledge and experience required to support the duties implementation.
2. Total members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) members, with the following structure:
  - a. A President Commissioner;
  - b. A Vice President Commissioner (if required);
  - c. A Commissioner or more.
3. The Company shall assign the Independent Commissioner which at least 30% from the total members of the Board of Commissioners.
4. The total members of the Board of Commissioners shall not exceed the Board of Directors members.

As of 31 December 2018, total members of the Company's Board of Commissioners is 5 (five) members, consist of 1 (one) President Commissioner/ Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 2 (two) Commissioner, and 1 (one) Independent Commissioners. The Company's total member of the Board of Commissioners is not exceeding the Board of Directors members. Total Independent Commissioner is 40% from the total members of the Board of Commissioners.

### Board of Commissioners Independencies

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Tenure
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner / Independent Commissioner	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Garibaldi Thohir	Komisaris Commissioner	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen Independent Commissioner	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS

### Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara:

1. Memiliki komitmen untuk mengawasi tindakan Perseroan dengan mengedepankan profesionalismenya.
2. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun juga, khususnya dari

In implementing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is independently perform among others by:

1. Having the commitment to supervise the Company's actions by upholding its professionalism.
2. The decision making in the Board of Commissioners Meetings shall be objective and free of any pressures from any parties, specifically from the controlling shareholders.

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

- pemegang saham pengendali.
3. Menghindari terjadinya campur tangan/ dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun juga serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan.
  4. Tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

**Keberagaman Anggota Dewan Komisaris**

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS.
2. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK) dan telah memenuhi persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

**Persyaratan anggota Dewan Komisaris**

- Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. Preventing unfair intervention/ domination from any parties as well as no influence from one-sided interests and free from conflict of interests.
4. Does not performing other matters that may impact the ability to act independently as stated in the prevailing regulatories.

**Board of Commissioners Members Diversity**

The composition of the Board of Commissioners members is determined with due observance to the diversity, knowledge, and experience required to support the duties implementation as members of the Board of Commissioners. The Company's Board of Commissioners composition has reflected the diversity of its members, both in educational background, work experience, and age that may be viewed in the profile of each member of the Company's Board of Commissioners.

**Board of Commissioners Members Appointment**

1. The Board of Commissioners members are appointed through the GMS.
2. Every proposal of appointment, termination and/or the appointment of the Board of Commissioners members to the GMS shall take into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
3. Every member of the Board of Commissioners shall attain the approval from OJK (fit and proper test from OJK) and has met the requirements as member of the Board of Commissioners as stated below.

**Board of Commissioners Members Criteria**

- Pursuant to POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Commissioners member shall be an individual that met the requirements during the appointment and tenure:
  - a. Having good moral and integrity;
  - b. Having legal capacity to take any legal action;
  - c. Within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship:
    1. Has never been declared bankrupt;
    2. Has never been act as former member of Board of Commissioners or Board of Directors which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
    3. Has never been sentenced for a crime



## Dewan Komisaris Board of Commissioners

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
    - Pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
  - Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kelayakan keuangan dan kompetensi sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
  - Memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
- causing financial loss to the country and/or financial sector; and
4. Has never been performed as former member of Board of Commissioners or Board of Directors whereby during each directorship
    - Never conducted an Annual General Meeting of Shareholders,
    - The accountability, management and supervisory report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
    - Caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Service Authority;
  - d. Has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
  - e. Has a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.
  - Has the integrity, financial reputation, financial and competencies qualifications as stipulated in the POJK on the fit and proper test.
  - Has met the requirements as members of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association.



# KOMISARIS INDEPENDEN

## Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Perseroan memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan adalah 40% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Persyaratan Komisaris Independen

1. Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan bahwa pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode wajib menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan independensinya tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;

Independent Commissioner is an unaffiliated member of the Board of Commissioners with the shareholders, Board of Directors members, other members of the Board of Commissioners, and/or Sharia Supervisory Board members, without any relations in financial, management, shares ownership and/or familial relations with the shareholders, Board of Directors members, other members of the Board of Commissioners and/or members of Sharia Supervisory Board or other relations that may influence its capabilities to act independently.

Based on the BOC Charter, the Company shall assign Independent Commissioner that at least 30% from the entire members of the Board of Commissioners. The Company has 2 (two) Independent Commissioner members from the total 5 (five) members of the Board of Commissioners. As such, the total member of the Company's Independent Commissioner is 40% from the total members of the Board of Commissioners and has been in accordance with the prevailing laws and regulatories.

### Independent Commissioner Criteria

1. Pursuant to POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Independent Commissioner shall meet the following criteria:
  - a. Not the person who work or have authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise over the activities of the Company within the last 6 (six) months, unless for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the next period, by taking into account that the reappointment as an Independent Commissioner that has been served during 2 (two) periods shall provide the statement to the GMS that he/she remain independent and the statement shall be disclosed in the annual report;
  - b. Do not have direct or indirect shares of the Company;





## Komisaris Independen Independent Commissioner

- |  |  |
|--|--|
| <p>c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;</p> <p>d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut;</p> <p>e. Memenuhi persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>2. Berdasarkan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Komisaris Independen Perseroan harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perseroan;</p> <p>b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>c. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</p> <p>d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan;</p> <p>e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan</p> <p>f. Berdomisili di Indonesia.</p> | <p>c. Do not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or ultimate shareholders of the Company; and</p> <p>d. Do not have any direct or indirect business relationship with the Company's activities.</p> <p>e. Fulfill the requirements for candidate member of the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners as stated in the POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.</p> <p>2. Pursuant to POJK 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning the Good Corporate Governance for Financing Companies, the Company's Independent Commissioner shall meet the following criteria:</p> <p>a. Do not have any affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of Sharia Supervisory Board or shareholders of the Company;</p> <p>b. Never been served as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of Sharia Supervisory Board, or served 1 (one) level under the Company's Board of Directors or other companies affiliated with the Company within the last 2 (two) years;</p> <p>c. Understanding on the financing regulatories and other relevant regulations;</p> <p>d. Have good knowledge on the Company's financial conditions;</p> <p>e. Holding Indonesian citizenship; and</p> <p>f. Domiciled in Indonesia.</p> |
|--|--|

Persyaratan sebagai Komisaris Independen yang tercantum di atas wajib dipenuhi selama Komisaris Independen Perseroan tersebut menjabat.

The above criteria as an Independent Commissioner shall be met during the tenure as Independent Commissioner in the Company.

Komisaris Independen  
Independent Commissioner**Pernyataan Independensi Komisaris Independen**

Seluruh Komisaris Independen Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Independen yang bersikap pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, Direksi Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan Pembiayaan dan dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan;
4. Tidak mempunyai usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Apabila dikemudian hari, ditemukan memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1-4 di atas, maka Komisaris Independen yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

**Independency Statements of Independent Commissioner**

All of the Company's Independent Commissioners have made the Independent Statement Letter that consist of:

1. Do not have any affiliation in the financial, management, share ownership and/or familial relations with other fellow members of the Company's Board of Commissioners, the Company's Board of Directors, members of the Company's Sharia Supervisory Board and/or ultimate shareholders of the Company, or affiliation with the Company that may influence its capabilities to act independently as stipulated in the Good Corporate Governance rules for Financing Companies and in the Good Corporate Governance rules for Issuers or Public Companies;
2. Do not have direct or indirect shares of the Company;
3. Do not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of Sharia Supervisory Board, or ultimate shareholders of the Company;
4. Do not have any direct or indirect business relationship with the Company's activities.

If in the future, the affiliations are acknowledge as stated in the point 1-4 above, the Independent Commissioner then shall be willing to release its position and shall be ready to be replaced.



# DIREKSI

## Board Of Directors

### Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Berdasarkan Keputusan Direksi mengenai Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi untuk Tahun 2018, Perseroan telah mengklasifikasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berdasarkan fungsi jabatannya. Adapun rincian pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

### Board of Directors Members Scopes and Responsibilities

Pursuant to the Board of Directors Decree on the Duties Division and Authorities of Members of the Board of Directors for 2018, the Company has classified the duties and responsibilities of each Board member based on its positions function. Herewith the details:

Direksi BOD	Jabatan Position	Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memimpin dan mengelola Perseroan termasuk memberikan arahan strategis dalam hal kebijakan dan strategi di lingkup pengembangan bisnis, manajemen risiko, operasional, keuangan dan sumber daya manusia, agar sesuai dengan tujuan Perseroan.</li> <li>Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan berjalan sesuai target yang ditetapkan secara <i>volume</i> dan <i>market share</i> sehingga menunjang keuntungan Perseroan.</li> <li>Memantau dan memastikan seluruh kegiatan manajemen risiko Perseroan berjalan dengan baik sehingga tercapai kualitas portfolio yang sehat.</li> <li>Memantau dan memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien dengan mengedepankan kualitas, <i>service excellence</i> serta berpedoman pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</li> <li>Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya manusia berjalan efektif dan efisien dan fokus pada pemberdayaan, kualitas, produktivitas, dan pengembangan karyawan yang dapat menunjang pencapaian tujuan Perseroan.</li> <li>Menetapkan dan memantau penerapan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Memantau dan memastikan kegiatan fungsi <i>Legal, Corporate Litigation</i> dan <i>Compliance</i> yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meminimalisasi risiko kepatuhan, risiko reputasi maupun risiko hukum yang mungkin timbul.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>To lead and manage the Company including providing strategic directives in terms of policies and strategies in business development, risk management, operations, finance and human resources, in order to be in line with the Company's objectives.</li> <li>To monitor and ensure all of the Company's business development activities are performing as the set target in terms of volume and market share thereby supporting the Company's profitability.</li> <li>To monitor and ensure all of the Company's risk management activities are performing well thereby accomplishing sound portfolio quality.</li> <li>To monitor and ensure effective and efficient operations activities, by emphasizing on quality, service excellence and guided by Good Corporate Governance principles.</li> <li>To monitor and ensure effective and efficient performance of human resources management activities and focusing on employees' empowerment, quality, productivity, and development that can support the achievement of the Company's objectives.</li> <li>To stipulate and monitor effective and efficient internal control application to provide adequate confidence that the business activities are performed in accordance with the Company's targets and business strategies as well as the articles of association, and regulatory.</li> <li>To monitor and ensure the activities of Legal, Corporate Litigation and Compliance functions by emphasizing on prudential principles and according to prevailing regulatory, in an effort to minimize compliance risk, reputation risk, as well as legal risk that may arise.</li> </ol>

Direksi  
Board Of Directors

Direksi BOD	Jabatan Position	Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
		<p>8. Mengevaluasi terhadap kinerja seluruh fungsi yang ada di Perseroan.</p> <p>9. Memantau dan memastikan kegiatan fungsi pengembangan <i>digital initiative</i> Perseroan.</p> <p>10. Mengawasi secara aktif penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Perseroan.</p> <p>11. Mengawasi dan membawahi anggota Direksi Perseroan lainnya.</p> <p>12. Mengawasi dan membawahi <i>Non Directorate</i> yang ada di Perseroan.</p> <p>13. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</p>	<p>8. To evaluate the performance of all functions in the Company.</p> <p>9. To monitor and ensure the activities of the Company's digital initiative development function.</p> <p>10. To actively oversight the Anti Money Laundering and Terrorism Preventing Funding in the Company.</p> <p>11. To supervise and in charge of other members of the Company's Board of Directors.</p> <p>12. To supervise and in charge of the Non Directorates in the Company.</p> <p>13. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</p>
Simon Tan Kian Bing	Direktur Independen  Independent Director	<p>1. Mengawasi dan membawahi <i>Marketing Directorate</i> yang ada di Perseroan.</p> <p>2. Merencanakan dan menyusun <i>Marketing Strategic Plan</i> termasuk di dalamnya merencanakan <i>budget</i> operasional Direktorat dibawahnya, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh jajaran <i>executive management</i>.</p> <p>3. Bertanggung jawab atas pencapaian target <i>marketing</i> secara nasional.</p> <p>4. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan dan implementasi kebijakan <i>marketing</i> yang diterapkan di Perseroan berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan.</p> <p>5. Membuka dan menjalin relasi kerjasama dengan <i>brand</i> utama di bisnis sepeda motor dalam rangka memperoleh <i>market share</i> dan portofolio yang baik.</p> <p>6. Mengembangkan strategi bisnis <i>Non Dealer Sales</i> dan memastikan implementasi strategi tersebut berjalan sesuai target yang ditetapkan Perseroan.</p> <p>7. Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi <i>marketing</i> berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di <i>Marketing Directorate</i> secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan target penjualan dan kualitas pembiayaan yang baik serta memperkuat <i>image</i> Perseroan di mata <i>stakeholders, dealer</i> dan konsumen Perseroan.</p> <p>8. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</p> <p>9. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.</p>	<p>1. To supervise and in charge of the Company's Marketing Directorate.</p> <p>2. To plan and develop the Marketing Strategic Plan including its operations budget planning for the Directorates under its delegation, as well as communicating it to all executive managements.</p> <p>3. To be responsible on the achievement of marketing target nationally.</p> <p>4. To monitor and ensure that all of the Company's business development activities and marketing policy implementation set out by the Company are performing according to the Company's stipulations.</p> <p>5. To open and maintain cooperation relationships with principal brands of 2-wheels business in order to obtain good market share and portfolio.</p> <p>6. To develop Non Dealer Sales business strategy and ensure its implementation are according to the target set out by the Company.</p> <p>7. To evaluate the sustainable implementation of policy, marketing strategy including the performance of all functions under the Marketing Directorate in an effort to improve sales target and good financing quality, as well as to strengthen the Company's image to the stakeholders, dealers and consumers of the Company.</p> <p>8. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</p> <p>9. Responsible to the Company's President Director in implementing its duties.</p>

Direksi  
Board Of Directors

Direksi BOD	Jabatan Position	Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
Zacharia Susantadiredja	Direktur Director	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi dan membawahi <i>Finance Directorate</i> yang ada di Perseroan dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan.</li> <li>Merencanakan dan menyusun <i>Corporate Financial Strategic Plan</i> termasuk di dalamnya merencanakan <i>budget</i> operasional Direktorat dibawahnya, serta mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran <i>executive management</i>.</li> <li>Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan Perseroan serta memantau dan memastikan pengelolaan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan prosedur serta standar akuntansi keuangan di Indonesia.</li> <li>Membuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan <i>investor</i> yang tepat bagi Perseroan.</li> <li>Memantau aktivitas pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak dan laporan penutupan asuransi agar sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Memantau pelaksanaan fungsi <i>corporate service &amp; communication</i> di Perseroan dalam rangka menjaga dan memperkuat <i>image</i> Perseroan di mata publik.</li> <li>Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi pengelolaan keuangan berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di <i>Finance Directorate</i> secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kapabilitas keuangan Perseroan.</li> <li>Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</li> <li>Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>To supervise and in charge of the Company's Finance Directorate and also serves as the Corporate Secretary.</li> <li>To plan and develop the Corporate Financial Strategic Plan including its operations budget planning for the Directorates under its delegation, as well as communicating it to all executive managements.</li> <li>Responsible on all the Company's financial management as well as to monitor and ensure that the Company's financial management is in accordance with the Company's internal rules, and prevailing regulatories, policies and procedures as well as standard of financial accounting in Indonesia.</li> <li>To open and maintain cooperation relations with other parties in order to obtain appropriate investors for the Company.</li> <li>To monitor the reporting activities and taxes mandatory payments including insurance closing reports in order to be aligned with the Company's internal rules and prevailing regulatories.</li> <li>To monitor the corporate service &amp; communication function implementation in the Company in order to maintain and strengthen the Company's image to the public.</li> <li>To evaluate the sustainable implementation of policies, financial management strategies including the performance of all functions under the Finance Directorate in order to improve the Company financial capabilities.</li> <li>To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</li> <li>Responsible to the Company's President Director in implementing its duties.</li> </ol>

Direksi  
Board Of Directors

Direksi BOD	Jabatan Position	Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
Anthony Y. Panggabean	Direktur Director	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi dan membawahi <i>Operation Directorate</i> yang ada di Perseroan.</li> <li>Merencanakan dan menyusun <i>Operations Strategic Plan</i> termasuk di dalamnya merencanakan <i>budget</i> operasional <i>Operations Directorate</i>, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh jajaran <i>executive management</i>.</li> <li>Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi pada penyusunan dan penetapan <i>policy</i> dan <i>procedure</i> yang berlaku pada internal Perseroan, penyelenggaraan fungsi <i>service</i>, <i>contact center</i>, <i>Quality Assurance</i>, litigasi dan <i>information technology</i> ("IT") Perseroan.</li> <li>Mengarahkan dan memantau pengelolaan layanan kepada konsumen serta <i>contact center</i> secara nasional dalam rangka menjaga <i>brand image</i> Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen terhadap Perseroan.</li> <li>Memastikan tersedianya dukungan sistem/ prosedur kerja berbasis IT di setiap proses kerja yang ada di Perseroan termasuk mengarahkan dan memastikan keamanan perangkat IT untuk mencapai stabilitas dan keamanan sistem IT yang optimum.</li> <li>Memantau dan memastikan kegiatan <i>Quality Assurance &amp; Litigation (fraud)</i> untuk memastikan ketaatan terhadap aktivitas kritikal yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja di dalam Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyelesaian kasus litigasi yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meminimalisasi risiko kepatuhan, risiko reputasi maupun risiko hukum yang mungkin timbul.</li> <li>Mengevaluasi implementasi kebijakan internal terkait operasional, strategi operasional dan IT berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di <i>Operations Directorate</i> secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan proses operasional yang cepat, efektif dan efisien.</li> <li>Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</li> <li>Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>To supervise and in charge of the Company's Operation Directorate.</li> <li>To plan and develop the Operations Strategic Plan including its operations budget planning of the Operations Directorate, as well as communicating it to all executive managements.</li> <li>Responsible on all the operations activities management including the development and stipulation of policies and procedures applicable in the Company's internal, implementation of service, contact center, Quality Assurance, litigation and Information Technology (IT) of the Company.</li> <li>To direct and monitor service management to consumers as well as contact centers nationally in an effort to maintain the Company's brand image that aim to improve sales and customers' loyalty to the Company.</li> <li>To ensure the availability of system support or work procedures of IT-based in every work process in the Company, including to direct and ensure the safety of IT tools for the achievement of optimum IT system stability and safety.</li> <li>To monitor and ensure the Quality Assurance &amp; Litigation (fraud) activities to ensure compliance with critical activities implemented by each unit in the Company according to prevailing regulatories, as well as emphasizing prudential principles in the settlement of litigation cases and in accordance with the prevailing laws and regulations, in order to minimize compliance risk, reputation risk as well as legal risk that may be arises.</li> <li>To evaluate the sustainable implementation of internal policies on operations, operations and IT strategy including the performance of all functions under the Operations Directorate for the improvement of fast, effective and efficient operations process.</li> <li>To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</li> <li>Responsible to the Company's President Director in implementing its duties.</li> </ol>





## Direksi Board Of Directors

Direksi BOD	Jabatan Position	Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
Njauw Vido Onadi	Direktur Director	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi dan membawahi Risk Management Directorate yang ada di Perseroan.</li> <li>Merencanakan dan menyusun Risk Management Strategic Plan termasuk di dalamnya merencanakan budget operasional Risk Management Directorate, serta meng-komunikasikan kepada seluruh jajaran executive management.</li> <li>Memantau dan memastikan fungsi manajemen risiko di Perseroan berjalan efektif.</li> <li>Mengarahkan dan memantau aktivitas initiation credit agar berjalan efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dengan kualitas portfolio yang baik.</li> <li>Mengarahkan dan memantau aktivitas penagihan dan pengelolaan aset unit kendaraan tarikan termasuk pengembangan sistemnya agar berjalan efektif dan dapat meminimalkan tingkat Non Performing Loan.</li> <li>Mengarahkan dan memantau aktivitas project management Perseroan agar seluruh project yang ditetapkan berjalan efektif dan mencapai sasaran dan waktu yang ditetapkan.</li> <li>Melakukan evaluasi implementasi kebijakan, strategi manajemen risiko berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di Risk Management Directorate, secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas portfolio yang sehat.</li> <li>Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</li> <li>Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>To supervise and in charge of the Company's Risk Management Directorate.</li> <li>To plan and develop the Risk Management Strategic Plan including the operations budget of Risk Management Directorate, as well as to communicate it to all executive managements.</li> <li>To monitor and ensure effective implementation of risk management function in the Company.</li> <li>To direct and monitor effective credit initiation activities for the improvement of the Company's business growth with good portfolio quality.</li> <li>To direct and monitor effective billing activities and asset management of impounded cars unit including its system development in order to minimize the Non Performing Loan levels.</li> <li>To direct and monitor the Company project management activities for effective project performance and to achieve the targets as well as the set timing.</li> <li>To evaluate the sustainable implementation of risk management policies, strategies including the performance of all functions under the Risk Management Directorate for the improvement of sound portfolio quality.</li> <li>To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</li> <li>Responsible to the Company's President Director in implementing its duties.</li> </ol>

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pengungkapan pedoman atau piagam Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang isi Laporan Tahunan yang antara lain menyatakan bahwa uraian Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan mencakup pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi.

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi tanggal 4 September 2018 ("Piagam Direksi") yang disusun sebagai pedoman dan referensi bagi Direksi dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien serta menjalankan tanggung jawab, dan kebijakan serta prosedur internal Perseroan yang relevan.

### BOD Charter

The disclosure of BOD Charter in the Annual Report is carried out based on the Circular Letter of Financial Services Authority No. 30/SEOJK.04/2016 on the Formulation and Contents of the Annual Report of Issuers or Public Companies in Chapter III of the Annual Report contents which among others stating that the Corporate Governance elaboration of the Issuers or Public Companies in the Annual Report shall cover the BOD Charter statements.

The Company has in place the BOD Charter dated 4 September 2018 developed as guidance and reference for members of the Board of Directors in implementing effective and efficient duties, as well as carrying out the responsibilities, and the Company's relevant policies and internal procedures.

Direksi  
Board Of Directors

Untuk memastikan Piagam Direksi tetap relevan bagi setiap anggota Direksi Perseroan, Piagam Direksi diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Piagam Direksi Perseroan mengatur antara lain mengenai:

1. Landasan Hukum;
2. Struktur dan Komposisi Direksi;
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Direksi;
4. Pengangkatan Anggota Direksi;
5. Masa Jabatan Anggota Direksi;
6. Pemberhentian Sementara Anggota Direksi;
7. Pengunduran Diri Anggota Direksi;
8. Jabatan Anggota Direksi Berakhir;
9. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
10. Kewenangan Direksi;
11. Waktu Kerja;
12. Keanggotaan dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
13. Nilai-Nilai Dasar dan Etika Kerja;
14. Transparansi Kepemilikan Saham dan Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga;
15. Rapat Direksi;
16. Penilaian Kinerja Direksi;
17. Remunerasi Direksi;
18. Sertifikasi dan Pelatihan;
19. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### Struktur dan Komposisi Direksi

1. Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi, serta mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
2. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. Khusus untuk anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan wajib memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
3. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Seorang Presiden Direktur;
  - b. Seorang Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan);
  - c. Seorang Direktur atau lebih.

To ensure relevancy of the BOD Charter for every member of the Company's Board of Directors, the BOD Charter is updated from time to time to be in coherent with the regulatories development and best practices.

The Company's BOD Charter regulates among others on the:

1. Foundation;
2. Board of Directors Structure and Composition;
3. Limitation of Concurrent Position of the Board of Directors Members;
4. Appointment of the Board of Directors Members;
5. Tenure of the Board of Directors Members;
6. Suspension of the Board of Directors Members;
7. Resignation of the Board of Directors Members;
8. Completion of the Board of Directors Members' Position;
9. Description of the Board of Directors Duties and Responsibilities;
10. Authorities of the Board of Directors;
11. Work-hour;
12. Membership in the Integrated Risk Management Committee;
13. Core Values and Work Ethics;
14. Transparency of Shares Ownership and Disclosure of Financial and Familial Relations;
15. Board of Directors Meetings;
16. Board of Directors Performance Assessment;
17. Board of Directors Remuneration;
18. Certifications and Sustainability Terms;
19. Reporting and Accountability.

### Board of Directors Structure and Composition

1. The composition of the Board of Directors members is determined with due observance to the diversity of skills, knowledge, and experience required to support the duties implementation as members of the Board of Directors, as well as taking into consideration the Company's conditions and decision making effectiveness.
2. All members of the Board of Directors shall have relevant knowledge with its positions. Specifically for members of the Board of Directors in charge of accounting or finance shall have the skills and/or knowledge in accounting field.
3. Total members of the Board of Directors is at least 3 (three) members, with the following structure:
  - a. A President Director;
  - b. Vice President Director (if required);
  - c. A Director or more.



## Direksi Board Of Directors

- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Anggota Direksi wajib berkewarganegaraan warga Negara Indonesia paling sedikit 50% dari jumlah anggota Direksi.
- Salah satu anggota Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan dengan ketentuan anggota Direksi yang ditunjuk tersebut tidak membawahi fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali jabatan anggota Direksi tersebut merupakan Presiden Direktur.

- All members of the Board of Directors shall be domiciled in the regions of Indonesia Republic.
- Members of the Board of Directors shall hold Indonesian Citizenship at least 50% from the total members of the Board of Directors.
- One of members of the Board of Directors is appointed to be in charge of the compliance function with the provision that such appointed member is not in charge of financing, marketing and financial functions, unless such position is a President Director.

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur, 3 (tiga) orang Direktur dan 1 (satu) orang Direktur Independen. Seluruh anggota Direksi Perseroan berdomisili di Indonesia.

As of 31 December 2018, total members of the Company's Board of Directors is 5 (five) members, consist of 1 (one) President Director, 3 (three) Directors, and 1 (one) Independent Director. All members of the Company's Board of Directors are domiciled in Indonesia.

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Tenure
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Simon Tan Kian Bing	Direktur Independen Independent Director	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Zacharia Susantadiredja	Direktur Director	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Anthony Y Panggabean	Direktur Director	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS
Njauw Vido Onadi	Direktur Director	31 Mei 2017 - RUPS Tahunan 2020 May 31, 2017 - 2020 Annual GMS

### Pernyataan Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### Board of Directors Independencies

All members of the Board of Directors do not have affiliation in financial, familial up to the second degree with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or the Company Controlling Shareholders that may influence its capabilities to act independently.

### Pengangkatan Anggota Direksi

- Anggota Direksi diangkat melalui RUPS.
- Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nasional dan Remunerasi.
- Setiap anggota Direksi telah memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK) dan telah memenuhi persyaratan anggota Direksi sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

### Board of Directors Members Appointment

- The Board of Directors members are appointed through the GMS.
- Every proposal of appointment, termination and/or the appointment of the Board of Directors members to the GMS shall take into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- Every member of the Board of Directors shall attain the approval from OJK (fit and proper test from OJK) and has met the requirements as member of the Board of Directors as stated below.

Direksi  
Board Of Directors

### Persyaratan anggota Direksi

- Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Anggota Direksi merupakan orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - I. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - II. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - III. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - IV. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
      - Pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

### Board of Directors Members Criteria

- Pursuant to POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Directors member shall be an individual that met the requirements during the appointment and tenure:
  - a. Having good moral and integrity;
  - b. Having legal capacity to take any legal action;
  - c. Within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship:
    - I. Has never been declared bankrupt;
    - II. Has never been act as former member of Board of Commissioners or Board of Directors which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
    - III. Has never been sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and
    - IV. Has never been performed as former member of Board of Commissioners or Board of Directors whereby during each directorship:
      - Never conducted an Annual General Meeting of Shareholders,
      - The accountability, management and supervisory report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
      - Caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Service Authority;
  - d. Has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
  - e. Has a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.



## Direksi Board Of Directors

- Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kelayakan keuangan dan kompetensi sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

### Keberagaman Anggota Direksi

Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Direksi Perseroan.

### Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program Orientasi diadakan oleh Perseroan yang di selenggarakan oleh Unit Sekretaris Perusahaan kepada anggota Direksi yang baru guna memberikan pemahaman tentang antara lain:

1. Strategi Perseroan
2. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan.
4. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

### Rencana Suksesi Anggota Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki peranan penting dalam nominasi kandidat Direktur. Namun seorang Direktur dapat menunjuk karyawan internal Perseroan sebagai suksesornya termasuk karyawan internal yang masuk dalam *Talent Pool* Perseroan.

Kebijakan Suksesi Direktur Perseroan mengatur bahwa kandidat akan memperoleh serangkaian pengembangan diri yang terkait pekerjaannya serta pengembangan personal melalui pelatihan maupun melalui sistem kerja tim untuk memecahkan isu/ permasalahan tertentu.

- Has the integrity, financial reputation, financial and competencies qualifications as stipulated in the POJK on the fit and proper test.
- Has met the requirements as members of the Board of Directors based on the Company's Articles of Association.

### Board of Directors Members Diversity

The composition of the Board of Directors members is determined with due observance to the diversity of skills, knowledge, and experience required to support the duties implementation as members of the Board of Directors. The Company's Board of Directors composition has reflected the diversity of its members, both in educational background, work experience, and age that may be viewed in the profile of each member of the Company's Board of Directors.

### Orientation Programs for New Directors

The orientation Program is held by the Company which was held by the Corporate Secretary Unit to new members of the Board of Directors in order to provide an understanding of amongst others:

1. The Company's strategies
2. Duties, responsibilities and authority within the Company pursuant to the Articles of Association and the prevailing regulatories in Indonesia.
3. Policies related with Good Corporate Governance.
4. Facilities to support the duties implementation of the Board of Directors.

### Board of Directors Succession Plans

The Company Nomination and Remuneration committee have an important role in nominating the Director candidate. However, a Director may appoint an internal employee as his/her successor including employee within the Company's *Talent Pool*.

The Director Succession Policy of the Company regulates that a candidate will receive series of development related with his/ her field of work as well as personal development through workshops or team task force for solving certain issues.



# DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, jika suatu kegiatan usaha memiliki produk usaha berbasis syariah, baik dalam bentuk Perusahaan Pembiayaan Syariah maupun Unit Syariah, perusahaan pembiayaan tersebut berkewajiban membentuk Dewan Pengawas Syariah.

## Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dalam POJK No. 30/POJK/05/2014 Pasal 1 ayat 14, dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, yaitu:

- Sebagai perwakilan Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Kepala Cabang Unit Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait prinsip syariah.
- Berfungsi sebagai mediator Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk, jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib:

- Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
- Melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company, if a business activity has Sharia-based business products, either Sharia Financing Company or Sharia Unit, such company is obliged to establish a Sharia Supervisory Board.

## Duties and Authorities of Sharia Supervisory Board

Based on POJK No. 30/POJK/05/2014 Article 1 paragraph 14, the Sharia Supervisory Board, further abbreviated as DPS, is a part of the Company's organs having supervisory duties and functions to direct the implementation of the company's activities to be in accordance with the Sharia Principles. As such, the Sharia Supervisory Board has the duties and authorities as regulated in the Company's Articles of Association and with due observance to the applicable regulations, namely:

- Representing the Company at the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.
- Functioning as a supervisor for the sharia aspects of the Company's Sharia Business Unit operational activities to conform to sharia principles.
- Functioning as an advisor and providing advice to the Board of Directors, the Head of Sharia Business Unit and the Head of Sharia Branch Unit regarding matters related to sharia principles.
- Functioning as communications mediator between the Company and National Sharia Board concerning the proposals and suggestions of product and service development requiring reviews and fatwas from the National Sharia Board.

In carrying out its functions, the Sharia Supervisory Board shall:

- Follow the fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council; and
- Report the Company's Sharia business activity and its development to the Sharia Board of the Indonesian Ulema Council in accordance with the provisions established by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.





## Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

### Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Pengawas Syariah Perseroan terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditentukan dalam RUPS, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri kapan saja, dengan ketentuan anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan mengundurkan dirinya menyampaikan surat pengunduran diri kepada Perseroan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya efektif. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 hari sejak diterimanya surat pengunduran diri oleh Perseroan.

### Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Jika Dewan Pengawas Syariah tersusun oleh lebih dari satu orang, maka komposisinya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seorang Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah atau lebih.

Sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 30 tanggal 31 Mei 2017, dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti S.H, Notaris Kota Jakarta Timur, susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dalam Perseroan ialah sebagai berikut:

Nama   Name	Jabatan   Position
Dr. Abdul Jabar Majid, MA	Ketua / Chairman
Ir. H. Muhammad Nadrattuzaman Hosen, MS., Mec., Phd.	Anggota / Member
H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E	Anggota / Member

### Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Risalah Rapat

Berdasarkan ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat, Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran terkait dengan pengembangan usaha pembiayaan syariah Perseroan. Dewan Pengawas Syariah juga secara berkala memberikan evaluasi terkait kesesuaian pengembangan bisnis yang dilakukan dengan prinsip-prinsip usaha syariah.

### Appointment, Resignation and Term of Office of the Sharia Supervisory Board

Pursuant to the Company's Articles of Association, the Sharia Supervisory Board comprises at least 1 (one) or more sharia expert(s) appointed by the GMS on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.

The tenure of members of the Sharia Supervisory Board is based on the GMS resolution. Any Sharia Supervisory Board member may resign at any time, provided that the resigning member shall submit a resignation letter to the Company at the latest of 30 (thirty) days prior to his resignation effective date. The Company shall conduct a GMS within 90 days upon the receipt of the resignation letter by the Company.

### Total Members and Composition of the Sharia Supervisory Board

If the Sharia Supervisory Board consists of more than one person, the composition will be arranged with the following provisions:

- A Chairman of the Sharia Supervisory Board;
- A member of the Sharia Supervisory Board or more.

As stated in the Deed of Meeting Resolution No. 30 dated May 31, 2017, drawn up before Rini Yulianti, S.H, Notary in East Jakarta the composition of the Sharia Supervisory Board is as follows:

### Sharia Supervisory Board Meeting and Minutes of Meeting

Based on the provision, the Sharia Supervisory Board is required to periodically hold at least 6 (six) meetings in 1 (one) year. In the Meetings, the Sharia Supervisory Board gives advice and suggestions regarding the Company's sharia financing business development. The Sharia Supervisory Board also regularly evaluates the compliance of the Company's business development with sharia principles.

Dewan Pengawas Syariah  
Sharia Supervisory Board

Sepanjang 2018, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2018, the Sharia Supervisory Board had convened 7 (seven) meetings with the following attendance:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Dr. Abdul Jabar Majid, MA	7	5	71
Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, MS., Mec., Phd.	7	6	86
H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E	7	4	57

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participants
1.	26 Februari 2018	DPS, Kepala UUS & Function terkait
2.	14 Mei 2018	DPS, Kepala UUS & Function terkait
3.	10 Juli 2018	DPS, Kepala UUS & Function terkait
4.	19 September 2018	DPS, Kepala UUS & Function terkait
5.	16 Oktober 2018	DPS, Kepala UUS & Function terkait
6.	13 November 2018	DPS, Kepala UUS & Function terkait
7.	04 Desember 2018	DPS, Kepala UUS & Function terkait

**Pelatihan Dewan Pengawas Syariah**

Sepanjang 2018, Dewan Pengawas Syariah telah berpartisipasi dalam beberapa pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

**Sharia Supervisory Board Training**

Throughout 2018, the Sharia Supervisory Board has participated in several trainings, with the following details:

Nama Name	Sertifikat Certificates	Penyelenggara Organizers	Tanggal dan Tempat Date and Venue
Dr. Abdul Jabar Majid, MA	Pengawas Syariah Sharia Supervisory	Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council Profession Certification Institution	Jakarta, 24 Juli 2018
Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, MS., Mec., Phd.	<i>For Sharing his Valuable Knowledge the Sharia Insurance Socialization</i>	Allianz	Jakarta, 14 Agustus 2018
	<i>Internasional Confrence on Bussines, Economics and Sosial Sciences</i>	APPI	Lombok, 24 – 25 April 2018

Dewan Pengawas Syariah  
Sharia Supervisory Board

Nama Name	Sertifikat Certificates	Penyelenggara Organizers	Tanggal dan Tempat Date and Venue
H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E	Manajemen Umum dan Sumber Daya Manusia Manajemen Operasional Bank Syariah General Management and Human Resources of Sharia Bank Operational Management	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Profession Certification Institution Micro Finance Institution	Jakarta, 23 – 25 Maret 2018
	Pengawas Syariah Sharia Supervisory	Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council Profession Certification Institution	Jakarta, 22 Oktober 2018
	<i>Workshop</i> Peningkatan Layanan dan Akuisisi melalui Analisis Data Nasabah Service Improvements and Acquisition through Customers Data Analysis	OJK	Jakarta, 23 Oktober 2018

# PENILAIAN PENERAPAN GCG 2018 TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

2018 GCG Assessment for The Board of Commissioners  
and Board of Directors

Perseroan melaksanakan penilaian atas Dewan Komisaris dan Direksi antara lain dengan melalui penyusunan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Dalam Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan tersebut, Perseroan akan membandingkan pemenuhan setiap kriteria/ indikator dengan kondisi berdasarkan data dan informasi yang relevan. Adapun kriteria/indikator yang dinilai terkait Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

## Dewan Komisaris

- Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.
- Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perseroan dalam mencapai visi dan misi Perseroan.
- Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
- Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.

The Company performs assessment on the Board of Commissioners and Board of Directors through the preparation of the Good Corporate Governance Implementation Report For Financing Companies. In the Report, the Company will compare the fulfillment of every criteria/ indicator with the condition based on relevant data and information. The criteria/ indicators assessed related to the Board of Commissioners and Board of Directors are:

## Board of Commissioners

- Every member of the Board of Commissioners has passed the fit and proper test.
- Members of the Board of Commissioners participate in the trainings related to human capital capability improvement to achieve the Company's vision and mission.
- The Board of Commissioners is capable to perform its supervisory duty and provide advices to the Board of Directors.
- The Board of Commissioners is capable to supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interest for all parties.
- The Board of Commissioners prepares the Board of Commissioners activity report, which is part of the Good Corporate Governance implementation report.
- The Board of Commissioners is capable to monitor the effectiveness of Good Corporate Governance implementation.
- The Board of Commissioners is capable to give agreement in the event that DPS requires the assistance of the committee member, which is structurally under the Board of Commissioners.



## Penilaian Penerapan GCG 2018 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi 2018 GCG Assessment for The Board of Commissioners and Board of Directors

### Direksi

#### Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi:

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*) yang berlaku di perusahaan.
2. Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja  
Kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja Direksi antara lain:
  - *Maximized shareholder value*
  - *Optimized Network*
  - *Increased Business Growth*
  - *Optimized Portfolio Quality*
  - *Optimized OPEX*
  - *Improve Corporate Event/Program*
  - *Customer Satisfaction*
  - *Optimize technology as a business enabler*
  - *Improve Compliance Management*
  - *Increase employee satisfaction & engagement*
  - *Improve Readiness Talent pool*
3. Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja  
Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### Board of Directors

#### Board of Directors Performance Assessment

The Board of Directors performance assessment and its implementation at least includes:

1. Performance Assessment Procedures  
The Board of Directors performance assessment is annually conducted based on the KPI (Key Performance Indicators) applicable in the company.
2. Performance Assessment Criteria  
The following are criteria applied in the performance assessment of the Board of Directors:
  - Maximized shareholders' value
  - Optimized Network
  - Increased Business Growth
  - Optimized Portfolio Quality
  - Optimized OPEX
  - Improve Corporate Event/Program
  - Customer Satisfaction
  - Optimize technology as a business enabler
  - Improve Compliance Management
  - Increase employee satisfaction & engagement
  - Improve Readiness Talent pool
3. Performance Assessor  
The Board of Directors conducts self-assessment independently for further submission to the Nomination and Remuneration Committee for evaluation. The evaluation results by the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.

# KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

## Remuneration Policy of The Board of Commissioners and Board of Directors

Penentuan besarnya remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dilimpahkan wewenangnya oleh RUPS kepada Presiden Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

The authority to determine the remuneration amount for Members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board is delegated by the GMS to the President Commissioner by taking into account the proposal and recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Penentuan besarnya remunerasi Anggota Direksi dilimpahkan wewenangnya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

The authority to determine the remuneration amount for Members of the Board of Directors is delegated by the GMS to the Board of Commissioners with due observance to the proposal and recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

### Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Di bawah ini merupakan rincian paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi:

### Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structures

The remuneration policy package and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors is detailed below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remunerations and Other Facilities	Jumlah yang diterima dalam 1 Tahun Total received in 1 Year			
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Rupiah Million	Orang Person	Jutaan Rupiah Rupiah Million
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other facilities)	5	3.329.814.000	5	13.549.120.000

Dengan demikian, jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp16.878.934.000.

As such, total remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018 is Rp16,878,934,000.

### Penetapan Remunerasi Direksi

Dalam menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Direksi, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku di industri *Multifinance*
2. Kinerja keuangan Perseroan
3. Pencapaian kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan indikator utama seperti keuntungan Perseroan, pertumbuhan penjualan, portofolio risiko serta produktivitas
4. Kewajaran dengan memperhatikan *peer group*
5. Komposisi pendapatan tetap dan *variable*
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang dan pendek perseroan

### Board of Directors Remuneration Criteria

Several basis of considerations in developing the remuneration structure, policy and amount for the Board of Directors are as follows:

1. The remuneration applicable in the Multifinance industry
2. The Company's financial performance.
3. The performance achievements of each member of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners with key indicators such as profitability, sales growth, risk profiles, and productivity.
4. Fairness by considering peer group
5. Composition of fixed and variable revenues
6. Consideration of long term and short term targets and strategy.





# RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meetings of The Board of Commissioners and  
Board of Directors

## Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sebelum rapat dilaksanakan, Presiden Komisaris terlebih dahulu melakukan pemanggilan rapat terhadap anggota Dewan Komisaris. Jika Presiden Komisaris berhalangan, pemanggilan rapat dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya dan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya, sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dengan kondisi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Dalam pelaksanaannya, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, yang hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan 10 (sepuluh) kali rapat, dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
I Nyoman Tjager	10	10	100
Robbyanto Budiman	10	8	80
Garibaldi Thohir	10	8	80
Thilagavathy Nadason	10	9	90
Myrnie Zachrani Tamin	10	9	90

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	24 Januari 2018 2018 January 24	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Desember 2017 December 2017 Performance
2.	14 Februari 2018 2018 February 14	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Januari 2018 January 2018 Performance
3.	13 Maret 2018 2018 March 13	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Februari 2018 February 2018 Performance

## Board of Commissioners Meeting Convention Procedures

The President Commissioner shall announce the meeting to members of the Board of Commissioners prior to the meeting. In the event that the President Commissioner is unavailable, meeting announcement can be organized by the other 2 (two) Board of Commissioners members and shall state the event, date, time and meeting location.

In the event that all Board of Commissioners members are present or represented, the announcement is not required and the Board of Commissioners Meeting can be conducted in the domicile or in the Company's main business activity location or other venues, as suggested by the Board of Commissioners. Legally binding decision may be generated from the Board of Commissioners Meeting in such a condition.

The Board of Commissioners Meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unavailable, which does not need to be proven to the third party, the Meeting will be chaired by a member of Board of Commissioners appointed by and from the Board of Commissioners members attending the meeting.

Throughout 2018, the Company's Board of Commissioners has convened 10 (ten) meetings, with the following attendance and Agenda:

## Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meetings of The Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
4.	18 April 2018 2018 April 18	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Maret 2018 March 2018 Performance
5.	17 Mei 2018 2018 May 17	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja April 2018 April 2018 Performance
6.	19 Juli 2018 2018 July 19	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Juni 2018 June 2018 Performance
7.	23 Agustus 2018 2018 August 23	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Juli 2018 July 2018 Performance
8.	19 September 2018 2018 September 19	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Agustus 2018 August 2018 Performance
9.	30 Oktober 2018 2018 October 30	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja September 2018 September 2018 Performance
10.	15 November 2018 2018 November 15	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Oktober 2018 October 2018 Performance

### Rapat Gabungan

Berdasarkan peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan.

Selama tahun 2018 rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

### Joint Meetings

Pursuant to OJK regulation No. 33/POJK.04/2014, the Board of Commissioners shall conduct joint meeting with the Board of Directors periodically at least once in 4 (four) months.

In 2018, the Board of Commissioners and Board of Directors joint meetings were held 10 (ten) times with the attendance and agenda as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Djaja Suryanto Sutandar	10	10	100
Simon Tan Kian Bing	10	10	100
Anthony Y Panggabean	10	10	100
Zacharia Susantadiredja	10	10	100
Njauw Vido Onadi	10	10	100
I Nyoman Tjager	10	10	100
Robbyanto Budiman	10	8	80
Garibaldi Thohir	10	8	80
Thilagavathy Nadason	10	9	90
Myrnie Zachrani Tamin	10	9	90

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	24 Januari 2018 2018 January 24	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Desember 2017 December 2017 Performance
2.	14 Februari 2018 2018 February 14	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Januari 2018 January 2018 Performance
3.	13 Maret 2018 2018 March 13	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Februari 2018 February 2018 Performance
4.	18 April 2018 2018 April 18	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Maret 2018 March 2018 Performance
5.	17 Mei 2018 2018 May 17	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja April 2018 April 2018 Performance



## Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

## Meetings of The Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
6.	19 Juli 2018 2018 July 19	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Juni 2018 June 2018 Performance
7.	23 Agustus 2018 2018 August 23	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Juli 2018 July 2018 Performance
8.	19 September 2018 2018 September 19	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Agustus 2018 August 2018 Performance
9.	30 Oktober 2018 2018 October 30	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja September 2018 September 2018 Performance
10.	15 November 2018 2018 November 15	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Oktober 2018 October 2018 Performance

## Tata Cara Pelaksanaan Rapat Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, Rapat Direksi harus diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2018, Direksi Perseroan telah melakukan 41 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Djaja Suryanto Sutandar	41	37	90%
Simon Tan Kian Bing	41	32	78%
Zacharia Susantadiredja	41	33	80%
Anthony Y Panggabean	41	41	100%
Njauw Vido Onadi	41	40	98%

BOD Meeting Convention  
Procedures

As stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors meeting shall be convened periodically at least once every month and/or may be organized at any time if necessary, on the request of one or more Board of Directors members or based on written request of one or more Board of Commissioners members, or the written request from 1 (one) or more shareholders which represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with legitimate voting rights.

Throughout 2018, the Company's Board of Directors has convened 41 meetings, with the following attendance:

# HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA & PENGENDALI

Affiliates Between Members of The Board of Directors, Board of Commissioners, and Ultimate & Controlling Shareholders

Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali antara lain sebagai berikut:

The disclosure of affiliation in financial and familial between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Ultimate and/or controlling Shareholders, among others as follows:

## Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris Board of Commissioners Financial and Familial Affiliations

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan / Financial Relations						Hubungan Keluarga / Familial Relations					
		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Utama Ultimate Shareholders		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Utama Ultimate Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Presiden Commissioner/ Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
Robbyanto Budiman*	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner		√		√	√			√		√		√
Garibaldi Thohir*	Komisaris Commissioner		√		√	√			√		√		√
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
Thilagavathy Nadason**	Komisaris Commissioner		√		√	√			√		√		√

\*) Bapak Robbyanto Budiman & Bapak Garibaldi Thohir mempunyai hubungan keuangan dengan PT Wahana Makmur Sejati yang termasuk sebagai pemegang saham utama Perseroan. / Robbyanto Budiman & Garibaldi Thohir have the financial relations with PT Wahana Makmur Sejati which serve as ultimate shareholder of the Company.

\*\*) Ibu Thilagavathy Nadason mempunyai hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali Perseroan (yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan). / Thilagavathy Nadason has financial affiliation with the Company's controlling shareholders (which also the Company's ultimate shareholders).



## HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA & PENGENDALI

Affiliates Between Members of The Board of Directors, Board of Commissioners, and Ultimate & Controlling Shareholders

### Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi Board of Directors Financial and Familial Affiliations

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan / Financial Relations						Hubungan Keluarga / Familial Relations					
		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Utama Ultimate Shareholders		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Utama Ultimate Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director		√		√		√		√		√		√
Simon Tan Kian Bing	Direktur Independen Independent Director		√		√		√		√		√		√
Zacharia Susantadiredja	Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Anthony Y Panggabean	Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Njauw Vido Onadi	Direktur Director		√		√		√		√		√		√

# KOMITE AUDIT

## Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau, memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal serta auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

### Anggota Komite Audit

Jumlah dan komposisi anggota Komite Audit, terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota:

- 1 (satu) Komisaris Independen, sebagai Ketua Komite Audit. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit maka salah satunya akan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perusahaan (pihak independen).

Per 31 Desember 2018, komposisi dan profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

The Audit Committee shall assist the Board of Commissioners to monitor and ensure the effectiveness of internal control system and the duties of internal and external auditor through planning monitoring and evaluation, and the implementation of the audit to assess the adequacy of internal control, including the financial reporting process.

### Members of the Audit Committee

The Audit Committee members and composition consists of minimum 3 (three) members:

- 1 (one) Independent Commissioner, as the Chairman of the Audit Committee. If more than 1 (one) Independent Commissioner becomes members of the Audit Committee, one of them will act as the Chairman of the Audit Committee.
- The other 2 (two) members come from outside the Company (independent party).

As of 31 December 2018, the Audit Committee members composition and profile are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description
Myrnie Zachraini Tamin	Ketua merangkap Anggota Chairwoman and Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
Setiawan Kriswanto	Anggota/Member	Pihak Independen Independent Party
Patricia Marina Sugondo	Anggota/Member	Pihak Independen Independent Party

#### Myrnie Zachraini Tamin

Ketua / Chairman  
55 Tahun / Years old  
Warga Negara Indonesia/Indonesian Citizen

Masa Jabatan  
Terms of Office 2017 - 2020

Dasar Pengangkatan  
Appointment Basis Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 31 Mei 2017 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH Notaris di Kota Jakarta Timur  
the Company Meeting Resolution Deed No. 30 dated 31 May 2017 made before Rini Yulianti, SH Notary in East Jakarta.

Riwayat Pendidikan  
Educational Background Tersedia dalam bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman xx Laporan Tahunan  
Avalaible at BOC Profile Section in page xx of this Annual Report

Pengalaman Kerja  
Professional Experience Tersedia dalam bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman xx Laporan Tahunan  
Avalaible at BOC Profile Section in page xx of this Annual Report





## Komite Audit Audit Committee

### Setiawan Kriswanto

Anggota / Pihak Independen

Member / Independent Party

51 Tahun / Years Old

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Meraih Gelar Master, Manajemen Sumber Daya Manusia, Krisna Dwipana, Jakarta, 2002. Gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESA), Surabaya, 1986. D4 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta 1991, dan D3 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta 1982.

#### Riwayat Pekerjaan:

- Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP - Jawa Timur) (1982 - 1991)
- Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Bank Dagang dan Industri (Bank BDI - Jakarta) (1991 - 1999)
- Ketua Tim Pengelola Sementara (TPS) pada Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) - Jakarta (1999 - 2002)
- Anggota Komite Audit Bank Danamon (2002 - 2008)
- Anggota Komite Audit Maybank (BII) (2008 - 2012)
- Anggota Komite Audit Bank BRI AGRO (2010 - 2015)
- Anggota Komite Audit EXIM Bank (2013 - 2018)
- Anggota Komite Audit CSUL Finance (2015 - 2021)
- Anggota Komite Audit UOB Bank (2018 - 2019)
- Anggota Komite Audit WOM Finance (2014 - 2020)

#### Pelatihan:

- Regulasi dan Tantangan Globalisasi bagi Profesi Akuntan Manajemen, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
- *Empowering Audit Committee: As the Ultimate Guardian of Investors Interests and Corporate Accountability*, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
- Kepatuhan Pajak di Era Transparansi dan Konsekuensi Hukumnya, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
- Efektifitas *Oversight* Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT. SNP Finance, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

Obtained Master Degree in Human Resources Management from Krisna Dwipana, Jakarta 2002. Bachelor Degree in Accounting from Indonesia Economic Science Academy (STIESA), Surabaya 1986. D4 Accounting from State Accounting Academy (STAN), Jakarta 1991, and D3 Accounting from State Accounting Academy (STAN), Jakarta 1982.

#### Professional Background:

- Auditor of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP - Jawa Timur) (1982 - 1991)
- Head of Internal Audit Unit, Bank Dagang & Industri (Bank BDI - Jakarta) (1991 - 1999)
- Acting Head of Management Team, Bank Restructuring Agency - Jakarta (1999 - 2002)
- Audit Committee Member Bank Danamon (2002 - 2008)
- Audit Committee Member Maybank (BII) (2008 - 2012)
- Audit Committee Member Bank BRI AGRO (2010 - 2015)
- Audit Committee Member EXIM Bank (2013 - 2018)
- Audit Committee Member CSUL Finance (2015 - 2021)
- Audit Committee Member UOB Bank (2018 - 2019)
- Audit Committee Member WOM Finance (2014 - 2020)

#### Trainings:

- Regulations and Challenges of Globalization for the Management Accountant Profession, Indonesian Management Accountant Association (IAMI)
- *Empowering Audit Committee: As the Ultimate Guardian of Investors Interests and Corporate Accountability*, Indonesian Audit Committee Association (IKAI)
- Taxes Compliance in Transparency Era and Its Legal Consequences, Indonesian Commissioners and Directors Institution (LKDI)
- Oversight Effectiveness of the Board of Commissioners and Audit Committee: Learning from PT SNP Finance, Indonesian Audit Committee Association (IKAI)

Komite Audit  
Audit Committee**Patricia Marina Sugondo**

Anggota / Pihak Independen  
Member / Independent Party  
51 Tahun / Years Old  
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen

Meraih Gelar Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya, 1990.

## Riwayat Pekerjaan:

- Assurance and Business Advisory Services – Senior Manager (1990 - 2002)
- PT GNV Solution (previously PT GNV Consulting) – Consultant (2008 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Samudera Indonesia Tbk (2009 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2010 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Surya Citra Media Tbk (2017 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Sarana Media Nusantara Tbk (2018 - sekarang)

## Pelatihan:

- Update PSAK 2018 untuk Komite Audit, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
- Praktik Etika dan Pembudayaan dalam Organisasi, PPM - Manajemen
- Market Outlook 2019, AC Nielsen

Obtained a Bachelor Degree in Economics Accounting from University of Katolik Atma Jaya, 1990

## Professional Background:

- Assurance and Business Advisory Services – Senior Manager (1990 - 2002)
- PT GNV Solution (previously PT GNV Consulting) – Consultant (2008 - present)
- Audit Committee Member PT Samudera Indonesia Tbk (2009 - present)
- Audit Committee Member PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2010 - present)
- Audit Committee Member PT Surya Citra Media Tbk (2017 - present)
- Audit Committee Member PT Sarana Media Nusantara Tbk (2018 - present)

## Trainings:

- Update of PSAK 2018 for the Audit Committee, Indonesian Audit Committee Association (IKAI)
- Ethics Practices and Culture in Organization, PPM - Manajemen
- Market Outlook 2019, AC Nielsen

**Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit**

Komite Audit bertugas memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Perincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit ialah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan terkait lainnya dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

**Audit Committee Duties and Responsibilities**

The Audit Committee shall provide opinion professionally and independently to the Board of Commissioners related to reports or matters conveyed by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and identify issues that require the Board of Commissioners' attention. The breakdown of the Audit Committee's duties and responsibilities is as follows:

- Conducting a review on financial information that will be issued by the Company to the public and/or regulators, such as financial statements, annual report and other reports related to the Company's financial information.
- Conducting a review on the Company's compliance with laws and regulations in relation with the Company's business activities, including and not limited to the laws and regulations in capital market, and/or regulations concerning good corporate governance.



## Komite Audit Audit Committee

- Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau hasil temuan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP); memastikan AP dan/atau KAP mengkomunikasikan segera hal-hal/temuan-temuan yang signifikan kepada Komite Audit Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan; memastikan manajemen Perseroan melakukan tindak lanjut atas hasil temuan AP dan/atau KAP.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dengan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan berdasarkan independensi, ruang lingkup dan honorarium/imbal jasa.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dan menyusun serta menyampaikan laporan evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tembusan kepada Direksi Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan Audit Internal.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, dan/atau penggantian, dan/atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
- Mengevaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi atas Piagam Audit Internal Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan unit audit internal.
- Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
- Memastikan manajemen Perseroan menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- Melakukan tugas khusus dari Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan dalam bentuk tertulis sepanjang tugas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
- Supervising the implementation of audit and monitoring the audit findings by a Public Accountant (AP) and/or a Public Accounting Firm (KAP); ensuring the AP and/or KAP to immediately communicate the significant findings to the Company's Audit Committee to be submitted to the Company's Board of Commissioners; ensuring the management of the Company to conduct follow up on the findings of AP and/or KAP.
- Providing independent opinions in the event of dissenting opinions between the Management and the AP and/or KAP for the services provided
- Providing the Board of Commissioners with recommendations on the appointment of a Public Accountant Firm that will provide audit service on annual financial information based on independence, scope and honorarium/rewards.
- Conducting evaluation on the implementation of audit service on annual financial information by the AP and/or KAP and preparing and submitting a report on the evaluation to the Board of Commissioners with a copy to the Board of Directors of the Company.
- Reviewing the audit performed by the Company's internal auditor as well as monitoring the follow-up conducted by the Board of Directors on the internal audit findings.
- Reviewing complaints related to the accounting process and financial reporting.
- Reviewing and providing advice on potential conflict of interests for the Board of Commissioners.
- Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning appointment, and/or replacement, and/or dismissal of Chairman of Internal Audit of the Company.
- Evaluating and submitting the evaluation on the Internal Audit Charter to the Company's Board of Commissioners before being approved by the Board of Commissioners.
- Conducting evaluation on the annual work plan of the internal audit unit.
- Ensuring the effectiveness of internal control system
- Ensuring the Company's management to build work culture, which encourages all employees to implement the Company's code of conduct.
- Ensuring the confidentiality of the Company's documents, data and information.
- Performing the specific duties of the Board of Commissioners of the Company submitted in writing as long as the duties are not contradictory to the prevailing laws and

Komite Audit  
Audit Committee

undangan yang berlaku dan dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi Perseroan dan unit Audit Internal Perseroan, fungsi yang menjalankan manajemen risiko dan AP dan/ atau KAP yang memberikan jasa kepada Perseroan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan.
- Komite Audit Perseroan dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

### Frekuensi dan Kehadiran dalam Rapat

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sedikitnya paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pelaksanaan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2018, Komite Audit menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran Attendance
Myrnie Zachraini Tamin	7	7	100
Setiawan Kriswanto	7	5	71,4
Patricia Marina Sugondo	7	6	85,7

regulations and with the aim to assist the duties and functions of the Board of Commissioners of the Company in conducting supervision in accordance with provision of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.

### Authorities

In performing its duties and responsibilities, the Company's Audit Committee has the following authorities:

- Accessing documents, data and information of the Company concerning employees, data, assets and the Company's resources, which are required in the duties implementation.
- Directly communicating with the Company's employees, including the Board of Directors and Internal Audit Unit, performing the management of risk and the Public Accounting Firm which provides services to the Company in performing the Audit Committee's duties and responsibilities.
- The Audit Committee is allowed to appoint an independent party outside members of the Audit Committee to assist the duties implementation (if necessary) under the approval from the Board of Commissioners.
- Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.

### Meeting Frequency and Attendance

The Audit Committee shall hold meetings regularly, at the minimum 1 (one) time in 3 (three) months. The meeting can only be held if it is attended by more than 2/3 (two-third) of the members.

The decision of the Audit Committee's meeting shall be made by consensus. The implementation of the Audit Committee's meeting is recorded in a minute, including in the event of dissenting opinions, signed by all members of the Audit Committee present in the meeting and submitted to the Board of Commissioners.

Throughout 2018, the Audit Committee held 7 (seven) meetings with the following attendance:



# KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

## Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran melakukan kajian serta rekomendasi mengenai kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta kesesuaiannya dengan penerapan praktik *Good Corporate Governance*. Komite ini bertanggungjawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee has a role to review and provide recommendation on the Remuneration policy and amount for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as its appropriateness with the Good Corporate Governance practices. This Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.

### Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak selaku Ketua.

### Nomination and Remuneration Committee Members

The Nomination and Remuneration Committee membership consists of 3 (three) members, one member is an Independent Commissioner that serves as Chairman.

Periode masa jabatan 2 Juni 2017 sampai ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2020  
Term of office 2 Juni 2017 until the conclusion of the 2020 Company AGMS

Nama Name	Jabatan dalam Komite Position in the Committee	Jabatan Struktural Structural Position
Myrnie Zachraini Tamin	Ketua Chairman	Komisaris independen Independent Commissioner
Robbyanto Budiman	Wakil Ketua Vice Chairman	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner
Charles Sugiarta*	Anggota & Sekretaris Member & Secretary	Human Capital Division Head
Tjhia Lian Nie**	Anggota & Sekretaris Member & Secretary	Human Capital Division Head

\* : Pelepasan jabatan sebagai anggota merangkap sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 30 Oktober 2018

\*\* : Diangkat sebagai anggota merangkap sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 30 Oktober 2018

\* : Release of office as member and secretary of the Nomination and Remuneration Office since October 30th, 2018

\*\* : Appointed as member and secretary of the Nomination and Remuneration Committee since October 30th, 2018

### Tugas dan Tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas serta tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi nominasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan, kriteria serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

### Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee duties and responsibilities are as follows:

Related to Nomination Function:

- Develop and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding policy, criteria and procedures of appointment and/or replacement of members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.



## Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

- |   |  |
|---|--|
| <p>b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi Perseroan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.</p> <p>c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi jabatan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.</li> <li>- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi Perseroan dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.</li> </ul> <p>d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris Perseroan dan atau Direksi Perseroan, serta membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi Perseroan dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolak ukur yang disusun oleh Komite.</p> <p>e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>f. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>g. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait fungsi nominasi Perseroan.</p> | <p>b. Develop and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding succession policy of the Company's Board of Directors members' nomination, which is aimed to maintain the continuity of leadership regeneration process in the Company in order to maintain business sustainability and long-term objectives of the Company.</p> <p>c. Evaluate and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</li> <li>- Performance evaluation for the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.</li> </ul> <p>d. Provide recommendation to the Company's Board of Commissioners on the performance assessment of the Company's Board of Directors, as well as assisting the Board of Commissioners in conducting performance assessment for members of the Company's Board of Directors and/or members of the Company's Board of Commissioners based on the benchmark defined by the Committee.</p> <p>e. Provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the competence development of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</p> <p>f. Provide recommendation regarding the candidates' members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors that fulfill the requirements to the Company's Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company.</p> <p>g. Other duties delegated by the Company's Board of Commissioners in relation to nomination function of the Company.</p> |
|---|--|

### Terkait dengan fungsi remunerasi:

- |  |  |
|--|--|
| <p>a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. Struktur remunerasi yang dimaksud ketentuan ini dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/ atau tunjangan bersifat tetap dan variabel.</p> <p>b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> | <p>Related to Remuneration Function:</p> <p>a. Prepare and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. The remuneration structure defined in this provision can be in the form of fixed and variable salary, incentive, and/or allowances.</p> <p>b. Prepare and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</p> |
|--|--|





## Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

- c. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Perseroan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- e. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait fungsi nominasi Perseroan.

Perseroan telah memiliki pedoman Komite nominasi dan atau remunerasi yang dituangkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan pada 16 November 2017 oleh Dewan Komisaris Perseroan.

### Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya adalah:

- Melakukan pembahasan usulan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pembahasan besaran kenaikan gaji tahunan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pembahasan usulan *self assessment* untuk Dewan Komisaris .
- Pembahasan kode etik untuk seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Myrnie Zachraini Tamin	4	4	100
Robbyanto Budiman	4	4	100
Charles Sugiarta	4	4	100

- c. Prepare and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the remuneration amount for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of.
- d. The Committee shall perform assessment for at least once in a year on the remuneration structure, policy and amount that have been set in the Company.
- e. Other duties delegated by the Company's Board of Commissioners in relation to remuneration function of the Company.

The Company has in place the nomination and or remuneration committee guidelines that stated into the Nomination and Remuneration Committee Charter established on 16 November 2017 by the Company's Board of Commissioners.

### Nomination and Remuneration Committee Activities

The Nomination and Remuneration Committee has implemented the following activities:

- Discussion on bonus proposal for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Discussion on the increase amount of annual salary of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Discussion on self-assessment proposal for the Board of Commissioners.
- Discussion on code of conduct for the entire employees including the Board of Commissioners and Board of Directors.

### Meetings Frequency and Attendance

Throughout 2018, the Nomination and Remuneration Committee has convened 4 (four) meetings with the following attendance:

Komite Nominasi dan Remunerasi  
Nomination and Remuneration CommitteeRisalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi  
Nomination and Remuneration Committee  
Meeting Minutes

Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance
14 Februari 2018	<p>Pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dasar-dasar pertimbangan <i>bonus performance</i> 2017</li> <li>· Besaran bonus performance 2017 WOM Finance</li> <li>· Mekanisme pembayaran bonus performance 2017</li> </ul> <p>Kesimpulan / Rekomendasi WOM Finance akan eksekusi pembayaran <i>bonus performance</i> 2017 di bulan Maret sesuai yang telah disetujui oleh Komite HC Maybank</p> <p>Discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Basic consideration of performance bonus 2017</li> <li>· The amount of performance bonus 2017 WOM Finance</li> <li>· Payment mechanisms of performance bonus 2017</li> </ul> <p>Conclusion / Recommendation WOM Finance will execute the performance bonus 2017 payment in March as per the approval of HC Committee of Maybank</p>	Myrnie Zachraini Tamin, Robbyanto Budiman, Charles Sugiarta	100
13 Maret 2018	<p>Pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dasar-dasar pertimbangan <i>Annual Increase</i> 2018</li> <li>· Besaran &amp; dampak <i>Annual Increase</i> 2018 WOM Finance</li> <li>· Mekanisme Pembayaran <i>Annual Increase</i> 2018</li> </ul> <p>Kesimpulan / Rekomendasi WOM Finance akan eksekusi pembayaran <i>Annual Increase</i> 2018 efektif bulan April 2018 sesuai yang telah disetujui oleh Komite HC Maybank</p> <p>Discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Basic consideration of annual increase 2018</li> <li>· The amount and impact of annual increase 2018 WOM Finance</li> <li>· Payment mechanisms of annual increase 2018</li> </ul> <p>Conclusion / Recommendation WOM Finance will execute the annual increase 2018 payment effective in April 2018 as per the approval of HC Committee of Maybank</p>	Myrnie Zachraini Tamin, Robbyanto Budiman, Charles Sugiarta	100
17 Mei 2018	<p>Pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Draft</i> kuesioner <i>self assessment</i></li> <li>· Mekanisme pelaksanaan <i>self assessment</i> BoC</li> </ul> <p>Kesimpulan / Rekomendasi Pelaksanaan <i>self assessment</i> Dewan Komisaris direncanakan akan dijalankan akhir tahun 2018</p> <p>Discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Draft</i> questionnaire of self assessment</li> <li>· Mechanisms of BOC self assessment implementation</li> </ul> <p>Conclusion / Recommendation The BOC self assessment is planned for implementation at the end of 2018</p>	Myrnie Zachraini Tamin, Robbyanto Budiman, Charles Sugiarta	100



## Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance
9 September 2018	<p>Pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· BOC <i>Self Assessment</i></li> <li>· Evaluasi terhadap draft kode etik yang ada saat ini</li> </ul> <p>Kesimpulan / Rekomendasi <i>Draft</i> tentang standar etika dan kerahasiaan untuk diimplementasikan pada seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi telah final</p> <p>Discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· BOC <i>Self Assessment</i></li> <li>· Evaluation on existing code of conduct draft</li> </ul> <p>Conclusion / Recommendation The draft on ethics standard and confidentiality for implementation to all employees including the Board of Commissioners and Board of Directors has been finalized</p>	Myrnie Zachraini Tamin, Robbyanto Budiman, Charles Sugiarta	100

### Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Dalam rangka regenerasi jabatan-jabatan di internal perusahaan terutama jabatan-jabatan kritikal termasuk Direksi, Perseroan telah melakukan pengelolaan suksesi disetiap level organisasi untuk mempersiapkan sumber daya internal yang siap mengisi kebutuhan organisasi dalam jangka panjang. Pengaturan mengenai suksesi ini bertujuan untuk memastikan ketepatan penempatan kader yang minimal setara atau lebih baik dari karyawan yang digantikan, mencegah penurunan kapabilitas organisasi atau bahkan krisis sumber daya akibat kehilangan *key person* tanpa kesiapan pengganti, serta memastikan penguasaan pengetahuan eksklusif individu menjadi pengetahuan organisasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas Perseroan.

Kriteria untuk menetapkan calon suksesi Direksi adalah hasil penilaian kinerja dan rekomendasi hasil *review/assessment* kompetensi yang didalamnya termasuk kepemimpinan.

### Board of Directors Succession Policy

For the regeneration of internal positions in particular the critical positions including the Board of Directors, the Company has undertaken the succession management in every organization level to prepare internal resources that are ready to support the long-term organization requirements. This succession aims to ensure appropriateness in the candidates placements at least equal or far better than the replaced employees, prevent the declining capability of organization or even resources crises due to the lost of key persons without readiness for replacement, as well as ensuring that individual exclusive knowledge becomes the organization knowledge thereby can enhance the capabilities and ability of the Company.

The criteria to determine the Board of Directors succession candidates are the results of the performance assessment and recommendation from the competencies review/ assessment results, which include the leaderships.

# KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Oversight Committee

Pembentukan Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris bertujuan untuk membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan komite tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan. Komite Pemantau Risiko memonitor proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan, guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Perseroan dan pengendalian risiko yang baik.

## Anggota Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman Komite Pemantau Risiko (Piagam Komite Pemantau Risiko) tanggal 21 Mei 2015, susunan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua: Presiden Komisaris  
Wakil Ketua: Wakil Presiden Komisaris  
Anggota: Komisaris, Komisaris Independen

## Independensi Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan pedoman penerapan pemantau risiko, Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh seorang Komisaris dengan Keanggotaan Pemantau Risiko bersifat Tetap dan Tidak Tetap. Anggota Tetap ialah mayoritas Komisaris, yaitu lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah anggota Komisaris, yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen dalam jangka waktu tertentu.

## Keputusan Komite Pemantau Risiko

Keputusan yang tertulis dalam risalah rapat disirkulasikan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan tambahan yang kemudian dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya, sebelum kemudian ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua. Risalah rapat adalah hasil keputusan yang sah untuk kemudian disirkulasikan kepada Direksi dan unit kerja terkait.

The establishment of Risk Oversight Committee by the Board of Commissioners aims to support the effectiveness of its duties and responsibilities implementation. The establishment is also beneficial to improve public trust on the management of the Company. This Committee monitors the continuous improvement on policies, procedures and practices on all levels within the Company, in order to ensure the implementation of good Company management and appropriate risk control.

## Risk Oversight Committee Members

Based on the Risk Oversight Committee Guidelines (Risk Oversight Committee Charter) dated May 21, 2015, the composition of Risk Oversight Committee members is as follows:

Chairman: President Commissioner  
Vice Chairman: Vice President Commissioner  
Member: Commissioner, Independent Commissioner

## Risk Oversight Committee Independency

Based on the risk monitoring implementation guidelines, the Risk Oversight Committee is chaired by a Commissioner with a Permanent and Temporary Membership. The Permanent Members are the majority of the Board of Commissioners, comprising 50% of the total members, appointed by the President Commissioner to continuously perform the authority and responsibility for a certain period of time.

## Risk Oversight Committee Decisions

The decisions written in the minutes of meeting are circulated to all members to obtain additional inputs that will then be reviewed in the next meeting agenda before being signed by the Chairman/Vice Chairman. The minutes of meeting are the records of the lawful decisions that will be circulated to the relevant Board of Directors and units.



## Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Keputusan yang sah mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila diperlukan maka keputusan Komite Pemantau Risiko harus ditindaklanjuti dengan Surat Kebijakan dan/atau Memorandum oleh unit kerja yang bertanggungjawab.

### Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

- Mengevaluasi kebijakan dan strategi terhadap manajemen risiko dalam profil risiko.
- Memantau rencana bisnis perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas informasi yang didapat dari hasil *monitoring* tersebut.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan non-rutin/luar biasa bila diperlukan. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pada tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Seluruh Rapat yang dilaksanakan telah dinyatakan sah. Seluruh hasil rapat Komite Pemantau Risiko juga telah dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Such decisions bind all members, both for the present and absent members. Whenever it is necessary, the Risk Oversight Committee decisions shall be followed up by a Policy Letter and/or Memorandum made by the responsible units.

### Risk Oversight Committee Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee include:

- Evaluate the risk management policies and strategies in the risk profile.
- Monitoring the Company's business plan prior to the Board of Commissioners' approval.
- Monitoring and evaluate the implementation of the Risk Management Committee.
- Provide the Board of Commissioners with inputs on the information acquired from the monitoring results.

### Meeting Frequency and Attendance

The Risk Oversight Committee holds at least 4 (four) regular meetings in a year and non-regular/extraordinary meetings if deemed necessary. A Chairman leads the meeting of Risk Oversight Committee. If the Chairman is absent, the Vice Chairman will lead the meeting.

In 2018, the Risk Oversight Committee has convened 4 (four) meetings. All of the meetings were declared valid. All of the Risk Oversight Committee meeting results have been recorded in the minutes and well documented.

# KOMITE DIREKSI

Board of Directors' Committee

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan bisnis Perseroan memiliki risiko tinggi yang jika tidak dikelola dengan efektif akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam rangka mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul, Direksi telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee/RMC*) yang berfungsi untuk memfasilitasi aktifitas pemantauan serta mengevaluasi sistem manajemen risiko Perseroan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, RMC juga berperan dalam memastikan ketepatan tanggapan manajemen terhadap temuan dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal serta regulator beserta tingkat efektifitas dari tindak lanjut terhadap temuan.

### Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan pedoman Komite Manajemen Risiko (RMC Charter) tanggal 21 Mei 2015, susunan anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur / Structures	
Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
Anggota dengan Hak Suara Members with voting rights	Direksi Board of Directors
Anggota Tanpa Hak Suara Members without voting rights	Perwakilan dari Direktorat Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) Semua Pimpinan Satu Tingkat di bawah Dewan Direksi Representative from the Risk Directorate of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) All Leaders are a Level below the Board of Directors
Sekretaris Secretary	Departemen <i>Enterprise Risk Management</i> Enterprise Risk Management Department

### Keputusan Komite Manajemen Risiko

Keputusan RMC diambil melalui Rapat. Keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat. Poin-poin keputusan yang diambil oleh RMC tertulis dalam risalah rapat yang kemudian disirkulasikan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan masukan tambahan. Poin-poin putusan yang sudah disesuaikan dengan masukan tambahan kemudian dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya. Risalah Rapat final kemudian sebelum ditanda-tangani oleh Ketua/Wakil Ketua. Risalah rapat adalah hasil keputusan

## RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Company's business activities have potential high risk that may arise. To prevent this, the Board of Directors has established the Risk Management Committee (RMC) that has the functions to facilitate monitoring activities and evaluate the Company's risk management system in a sustainable manner. As such, the RMC also plays a role in ensuring the accuracy of management's response towards the findings and recommendations of internal auditor, external auditor and regulators, as well as the level of effectiveness in following up the findings.

### Risk Management Committee Structure and Membership

Based on the Risk Management Committee Guidelines (RMC Charter) dated May 21, 2015, the composition of RMC members is as follows:

### Risk Management Committee Decisions

The RMC's decisions are made in the Meetings. The decisions shall be taken by deliberations for consensus. Points regarding the decisions made by RMC are written in the minutes that will be circulated to all members to obtain additional input. Points that have been adjusted to the additional input will be reviewed in the next meeting agenda. The Chairman/ Vice Chairman will then sign the Final Minutes. The meeting minutes are the records of the lawful decisions that will be circulated to the relevant Board of Directors and units. The decision





## Komite Direksi Board of Directors' Committee

yang sah untuk kemudian disirkulasikan kepada Direksi dan unit kerja terkait. Keputusan bersifat sah dan mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila diperlukan maka keputusan RMC dapat ditindaklanjuti dengan Surat Kebijakan dan/atau Memorandum oleh unit kerja yang bertanggung jawab.

### Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko meliputi:

- Menyetujui kebijakan manajemen risiko dan perubahan-perubahannya, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi dan tools pengelolaan risiko, termasuk rencana-rencana kerja, serta memastikan penerapannya;
- Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko;
- Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk masalah risiko yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Menyetujui produk pembiayaan baru dan layanannya;
- Melakukan kajian terhadap risiko Perseroan secara keseluruhan, termasuk eksposur atas kredit secara berkala, dan memastikan bahwa eksposur dikelola dengan baik;
- Menetapkan koreksi atau ratifikasi atas keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
- Membangun budaya manajemen risiko pada seluruh tingkat organisasi.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuannya, RMC melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan non-rutin/luar biasa bila diperlukan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pada tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh Rapat yang dilaksanakan telah dinyatakan sah. Seluruh hasil rapat RMC juga telah dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

is lawful and binding all members, regardless of whether they attend the meeting or not. Whenever it is necessary, the RMC's decisions can be followed up by a Policy Letter and/or Memorandum made by the responsible unit.

### Risk Management Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee include as follows:

- Approve the risk management policies and the amendments thereof, including the risk framework strategy, methodology and management tools, including the work plans, and ensuring their implementation;
- Approve the strategic actions arising from external regulations which affect risk management practices;
- Approve the measures taken to solve risk-related issues that become the concern of the Financial Services Authority (OJK);
- Approve new financing products along with their services;
- Regularly assessing the Company's risks in general, including exposure to credit periodically, and ensuring that such exposure is managed properly;
- Determine the correction or ratification on business decisions deviating from the normal procedures;
- Foster risk management culture on all levels of the organization.

### Meeting Frequency and Attendance

In accordance with the provision, the RMC holds a regular meeting at least 4 (four) times in a year and non-regular/extraordinary meetings whenever necessary. A Chairman leads the meeting. If the Chairman is absent, the Vice Chairman will lead the meeting.

In 2018, the Risk Management Committee has convened 10 (ten) meetings. All of the meetings were declared valid. All of the RMC's meeting results have been recorded in the minutes and well documented.

# SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan untuk memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan Publik dengan pemangku Kepentingan, serta memastikan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan diwajibkan untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

## Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Zacharia Susantadiredja yang juga merupakan anggota Direksi Perseroan. Sekretaris Perseroan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur.

Profil Zacharia Susantadiredja telah dijelaskan pada Profil anggota Direksi.

## Tugas dan Tanggungjawab

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Direksi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan Perseoran terhadap undang-undang, ketentuan dan prosedur serta peraturan yang berdampak pada Direksi dan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Direksi mengenai tugas dan kewajiban mereka untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam efek, benturan kepentingan dalam transaksi yang melibatkan Perseoran larangan dalam transaksi efek dan larangan pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga.

Adapun tugas lain Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- b. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web .

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the function of Corporate Secretary is ensuring effective communication between Public Companies and Stakeholders, and to ensure that the Issuers or Public Companies continuously comply with the prevailing laws and regulations. The Corporate Secretary is established to enhance the implementation of corporate governance. The corporate secretary shall have the qualifications that conform with his/her duties and responsibilities.

## Corporate Secretary Profile

The Company's Corporate Secretary is Zacharia Susantadiredja, which also serves as a member of the Company's Board of Directors. The Corporate Secretary directly reports to President Director.

The profile of Mr. Zacharia Susantadiredja is presented in the Board of Directors' Profiles.

## Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary is responsible to provide advice to the Board of Directors regarding the issues related to the Company's compliance with regulatory, rules and procedures as well as regulations that may impact the Board of Directors, and corporate governance best practices. The Corporate Secretary is responsible to provide input to the Board of Directors on their duties and obligations for the disclosure of their interests in the securities, conflict of interests that involve the Company, prohibition in securities transactions and prohibition in disclosure that may affect pricing.

The Corporate Secretary duties are as follows:

- a. Monitoring the Capital Market developments, particularly the applicable regulations.
- b. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of the Company' Good Corporate Governance, including:
  - Disclosure of information to the public, including the information availability at the Website.



Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
  - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- Submission of reports to OJK
  - Organization and documentation of the GMS
  - Organization and documentation of the Board of Directors' and/or the Board of Commissioners' meetings
  - Organization of the Company's orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners
- c. As a liaison between the Company and Shareholders, OJK, and other Stakeholders.

### Laporan Singkat Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

1. Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 15 Maret 2018 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan 15 Maret 2018 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPS.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.
4. Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mendokumentasikan risalah-risalah Rapat tersebut.
5. Mengkaji *website* Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
6. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 21 November 2018, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.

### Brief Report on the Corporate Secretary Function Implementation in 2018

1. Updated the Capital Market Regulations Development as well as provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners specifically related to new regulations from the Capital Market regulators or the Financial Services Authority.
2. Convened the Annual GMS and Extraordinary GMS that both held on 15 March 2018, and documented the meeting minutes, the GMS deeds as well as other matters in relations with the GMS convention.
3. Organized and attended the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.
4. Prepared and documented the Meeting Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.
5. Reviewed the Company's website and uploaded information disclosure to the public.
6. Organized Public Expose on 21 November 2018, in order to meet the requirements of information disclosure to the public pursuant to the decree of Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 regarding the Regulation No. I-E.

Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

7. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.

## HUBUNGAN DENGAN INVESTOR

Bagi Perseroan, terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan investor, regulator dan para pemangku kepentingan lainnya merupakan kewajiban yang mutlak jika hendak tumbuh berkelanjutan dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Dalam rangka memenuhi prinsip Perseroan yang mudah dan transparan, Perseroan telah membentuk divisi yang secara khusus mengelola hal-hal terkait hubungan investor, yaitu Divisi Finansial Planning and Investor Relation. Perseroan secara berkala merilis laporan keuangan melalui situs resmi [www.wom.co.id](http://www.wom.co.id). Pada situs [www.wom.co.id](http://www.wom.co.id) Perseroan juga menyediakan materi terkait kinerja bisnis perseroan yang dapat dilihat dan diunduh oleh calon investor.

Selain mempublikasikan berbagai informasi yang dibutuhkan melalui situs resmi, Perseroan juga memfasilitasi berbagai layanan informasi terkait investor, di antaranya melalui pertemuan secara langsung, konferensi telepon, korespondensi melalui surat elektronik, serta kunjungan langsung. Korespondensi melalui surat elektronik dapat dilakukan melalui alamat [corporate\\_secretary@wom.co.id](mailto:corporate_secretary@wom.co.id).

Sebagai bagian dari kewajiban Perseroan sebagai perusahaan Publik, Perseroan telah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 21 November 2018. *Public Expose* ini dihadiri oleh pemegang saham, analis saham dan perwakilan Bank-Bank yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Perseroan.

7. Carried out information disclosure to the public by providing information at the website, and reported every material information to Bursa Efek Indonesia and the Financial Services Authority, which are predicted may influence the investors or securities pricing at the stock exchange.

## INVESTOR RELATIONS

For the Company, maintaining good relationships between the Company and investors, the regulator and other stakeholders is an obligation in achieving sustainable growth and making appropriate decisions. To actualize the Company's principles, easy and transparent, the Company has established a division with special duties to manage all investor-relation-related issues, namely the Financial Planning and Investor Relation Division. The Company periodically releases financial statements through its official website: [www.wom.co.id](http://www.wom.co.id). On [www.wom.co.id](http://www.wom.co.id), the Company also provides materials related to its business performance that can be viewed and downloaded by potential investors.

Aside from publishing information required through the Company's official site, the Company also facilitates a variety of investor-related information services, among others, direct meeting, teleconference, email correspondence and direct visit. Email correspondence can be submitted to [corporate\\_secretary@wom.co.id](mailto:corporate_secretary@wom.co.id).

As part of the Company's responsibilities as a public company, the Company had carried out a Public Expose on November 21, 2018. The Public Expose was attended by shareholders, stock analysts and the representatives of banks having cooperation agreement with the Company.



# UNIT AUDIT INTERNAL

## Internal Audit Unit

Pengendalian internal yang efektif dan efisien diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut dibentuk Internal Audit yang merupakan salah satu organ pendukung Tata Kelola Perusahaan yang ikut berperan aktif dalam membangun sistem pengendalian internal Perusahaan dan memastikan bahwa pengendalian internal tersebut berfungsi dengan baik dengan memperhatikan Piagam Audit Internal yang disusun oleh Perusahaan sesuai peraturan OJK.

The effective and efficient internal control is required to ensure that the business activities are performed in accordance with the business objectives and strategy. As such, the Company established the Internal Audit, as one of the supporting pillars of the Company's Corporate Governance. The Internal Audit takes an active role in building the Company's internal control system and ensuring that the system is functioning well by taking into account the Internal Audit Charter developed by the Company according to the OJK regulations.



**Ignatius Prasetya**

Kepala Divisi Audit Internal  
Internal Audit Division Head

Kepala Audit Internal dijabat oleh Ignatius Prasetya. Beliau menyelesaikan pendidikan Akuntansi dari STIE Perbanas, 2002. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Internal Audit Officer di PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 - 2009), Area Operation Manager di PT Bima Multi Finance (2009 - 2014), Internal Audit Div Head di PT Bima Multi Finance (2014 - 2017), dan Procedures & Sys Dev Sub Div Head di PT WOM Finance Tbk (2017 - 2018).

Ignatius Prasetya serves as Head of Internal Audit. He graduated in Accounting from STIE Perbanas in 2002. Prior to joining the Company, he served as Internal Audit Officer PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 - 2009), Area Operation Manager PT Bima Multi Finance (2009 - 2014), Internal Audit Div Head PT Bima Multi Finance (2014 - 2017), and Procedures & Sys Dev Sub Div Head PT WOM Finance Tbk (2017 - 2018).

### SDM Audit Internal

Per 31 Desember 2018, Jumlah pegawai Internal Auditor sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang meliputi 1 (satu) Kepala Divisi, 5 (lima) Kepala Departemen, 9 (sembilan) Specialist, 7 (tujuh) Section Head, 10 (sepuluh) Officer dan 1 (satu) Staff.

### Kedudukan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Internal Audit Division Head yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan secara fungsional berhubungan dengan Komite Audit.

Direksi bertanggung jawab dalam merancang sistem Audit Internal untuk proses pelaporan internal, mencakup seluruh prosedur operasi

### Internal Audit HR

As of 31 December 2018, the employees in the Internal Audit Division consist of 33 (thirty three) staffs that include 1 (one) Division head, 5 (five) Department heads, 9 (nine) Specialist, 7 (seven) Section Head, 10 (ten) Officer and 1 (one) Staff.

### Internal Audit Division Structure

The Internal Audit Division is led by an Internal Audit Division Head responsible to the President Director and has functional relations with the Audit Committee.

The Board of Directors is responsible for designing an Internal Audit system for internal reporting process that includes the Company's standard



Unit Audit Internal  
Internal Audit Unit

standar Perseroan dan jalur pelaporan. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh Divisi Audit Internal, yang menjalankan fungsi independen serta memberikan laporan langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

### Tugas dan Tanggung jawab

Tugas Audit Internal secara umum adalah mendukung Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan operasional Perseroan. Divisi Audit Internal berfungsi sebagai “*business partner*” dan konsultan bagi Direksi dalam melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko atas kegiatan operasional Perseroan, guna tercapainya tujuan Perseroan dan GCG.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Audit Internal:

- Menyusun strategi dan rencana kerja Internal Audit dengan pendekatan risiko (*risk based approach*) yang memadai. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Internal Audit dan tujuan bisnis Perseroan, serta disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Mengimplementasikan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan, termasuk penugasan audit khusus atas permintaan Presiden Direktur maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Membuat analisis, melakukan pemeriksaan, serta penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lain. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan langsung (*on-site audit*), pengawasan secara tidak langsung, dan pemeriksaan berkelanjutan (*continous audit*), guna mencapai misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perseroan.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran, dan kebijakan.

operational procedures and the reporting channels. During the implementation, the Board of Directors is assisted by the Internal Audit Division that performs independent function and reports directly to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

### Duties and Responsibilities

In general, the Internal Audit's duty is to support the Board of Directors in performing internal monitoring activities within all of the Company's operational activities. This Division serves as a business partner and consultant for the Board of Directors in reviewing and evaluating internal control process as well the risk management of all the Company's operational activities, in order to achieving the Company's objectives and GCG.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Division:

- Develop the Internal Audit strategies and work plans with adequate risk-based approach. The plan has to be consistent with the Internal Audit Charter and the Company's business objectives, approved by the President Director and the Audit Committee, and reported to the Board of Commissioners.
- Implement the work plan that has been approved, including the assignment of specific audit based on the request of both the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- Develop analysis and audit, as well as assessment on the efficiency and effectiveness of finance, operations, human resources, marketing, information technology and other activities. The aforementioned are performed through on-site audit, indirect monitoring (off-site audit) and continuous audit so as to achieve the missions, goals and strategies that have been set.
- Perform and contribute to the improvement of an effective control by reviewing and evaluating the internal control in all activity units within the Company.
- Provide improvement-related suggestions and objective information on audited activities in all levels of management to refine the system, procedure, budget and policy.





## Unit Audit Internal Internal Audit Unit

- Membuat laporan hasil audit serta menyampaikannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
- Menyusun rencana sumber daya manusia Internal Audit (*man power planning*) dan memelihara profesionalisme Internal Audit dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai, melalui pendidikan yang berkesinambungan dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi.
- Membantu pemantauan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*), efektivitas manajemen risiko, dan implementasi kode etik.
- Menyusun dan memperbarui pedoman, sistem, dan prosedur kerja Internal Audit secara berkala.
- Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit (*quality assurance*) yang dilakukan melalui supervisi terhadap pekerjaan Internal Auditor dan mewajibkan Internal Auditor untuk meninjau kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta memperhatikan penilaian mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
- Develop report on audit results and submit to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- Monitoring, analyze and report the follow-up implementation of the recommended improvements.
- Develop the Internal Audit's manpower planning and maintain its professionalism by employing knowledge, skills, experiences and adequate certification program through continuous education and involvement in the activities of professional organizations.
- Assist the monitoring of the implementation of the Good Corporate Governance, risk management effectiveness and code of conduct.
- Regularly develop and update the Internal Audit's working guidelines, systems and procedures.
- Continuous evaluation on the quality assurance performed by supervising the works of the Internal Auditor and requiring the Auditors to review the quality of their works and duly observe the assessment on the audit quality assurance performed by external parties.

p.

240

### Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018

Internal Audit telah melaksanakan kegiatan *assurance* terhadap unit bisnis Perseroan sebanyak 125 kali pemeriksaan terdiri dari:

### Activity Implementation in 2018

The Internal Audit has implemented 125 audits assurance activity on the Company's business units, which consisted of:

1	Cabang / Branches	:	75	Pemeriksaan / Audit
2	Gudang / Warehouses	:	27	Pemeriksaan / Audit
3	Khazanah	:	5	Pemeriksaan / Audit
4	Kantor Pusat / Head Office	:	12	Pemeriksaan / Audit
5	Teknologi Informati / Information Technology	:	3	Pemeriksaan / Audit
6	Special Audit	:	3	Pemeriksaan / Audit

# SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

## Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pejabat dan pegawai Perseroan. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mampu memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

### Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah sebuah Komisi Internasional yang dibentuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO menekankan Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis entitas yang berkelanjutan (*on going business activities*). Untuk tujuan pelaporan manajemen kepada publik, *COSO framework* telah menjadi acuan perusahaan publik sebagai *model best practices* pengendalian internal. *COSO framework* memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

COSO dapat memberikan:

Cara untuk menerapkan pengendalian internal dalam setiap entitas, tanpa memperhatikan industri atau struktur legal pada setiap tingkatan dari entitas, unit operasi atau fungsi.

- Pendekatan prinsip memberikan kemudahan dan memperkenankan untuk membuat, mengimplementasikan dan melaksanakan pengendalian internal – prinsip dapat diterapkan pada tingkatan entitas, operasi dan fungsi.

The Internal Control System is a mechanism of supervision process determined by the Company's Management on an on-going basis in which the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all officers and employees influence the quality of the system's design and implementation. The Internal Control System is designed to provide adequate confidence to maintain and secure the Company's assets, ensure the accurate reports, improve compliance with the applicable provisions, reduce the impacts of financial loss, deviations including fraud, and violation of the aspect of prudence, and improve the organization effectiveness and cost efficiency.

### Internal Control System Compatibility with COSO

The COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) is an International Commission established to identify the factors that cause embezzlement and make recommendation to reduce such a case. The COSO emphasizes the Internal Control as a process inseparable from the on-going business activities. For public management report, COSO framework has become the reference for the public companies as the best practice for internal control. The COSO framework enables the Company to develop an effective and efficient internal control system.

COSO can contribute:

Method to implement the internal control in every entity, regardless the industry and legal structure, in every level of entity, operation unit, or function.

- Principle approach, that provides facility and allows creating, implementing, and conducting the internal control – the principles are applicable at the entity, operational, and functional levels.



## Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

- Syarat untuk sistem pengendalian internal yang efektif dengan mempertimbangkan bagaimana komponen dan prinsip tersebut ada dan berfungsi dan bagaimana komponen beroperasi secara bersamaan.
- Cara untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko dan untuk mengembangkan serta mengelola reaksi risiko secara tepat sampai dengan tingkatan yang diterima dan dengan fokus terbaik dalam pengukuran *anti-fraud*.
- Kesempatan untuk mengembangkan penerapan pengendalian internal laporan keuangan dan laporan lainnya untuk mencapai tujuan laporan, operasional dan kepatuhan.
- Kesempatan untuk mengurangi ketidakefektifan, pengulangan atau ketidakefisienan pengendalian yang memberikan nilai minimal dalam mengurangi risiko untuk mencapai tujuan perusahaan.
- Requirements for the effective internal control system by considering the natures of the component and principle and how the component and principle operate simultaneously.
- Method to identify and analyze the risk as well as develop and manage the risk reaction appropriately to an acceptable extent and with the best focus on the anti-fraud measurement.
- Opportunity to develop internal control on financial report and the other reports to reach the report, operation, and compliance objectives.
- Opportunity to reduce control ineffectiveness, repetition or inefficiency that contribute minimal value in minimizing the risks to achieve the Company's objectives.

Dalam mengevaluasi pengendalian internal yang dilaksanakan perusahaan, Divisi Audit Internal menggunakan COSO *framework*. *Framework* ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi atau kategori tujuan yang memperkenankan perusahaan untuk fokus pada aspek pengendalian internal:

1. Operasi - efektif dan efisiensi operasional perusahaan, termasuk pencapaian kinerja operasional dan keuangan serta keamanan asset dibandingkan dengan kerugian.
2. Laporan Keuangan - Laporan Keuangan dan Non-Keuangan internal dan eksternal meliputi kehandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau syarat lainnya yang ditetapkan oleh regulator, standar yang diakui, maupun kebijakan perusahaan.
3. Kepatuhan - ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga dimensi atau kriteria tujuan tersebut memiliki 5 komponen untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan, yaitu:

1. Pengendalian Lingkungan  
Hal-hal yang menjadi perhatian audit internal adalah:
  - a. Integritas dan nilai-nilai etika;
  - b. Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
  - c. Filosofi perusahaan;
  - d. Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
  - e. Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan;

In evaluating the internal control implemented by the Company, the Internal Audit Division has applied COSO Framework. This framework consists of 3 (three) objective dimensions or categories that allow a company to focus on the internal control aspect, namely:

1. Operation - the company's effectiveness and efficiency, including the achievement of operational and financial performances and asset security, as compared to loss.
2. Financial Report - Internal and External Financial and Non-Financial Reports which entail reliability, punctuality, transparency, or the other requirements determined by the regulators, acknowledged standards, and Company's policy.
3. Compliance - compliance with the laws and regulations applicable.

The three objective dimensions or criteria aforementioned have 5 components to evaluate a company's internal control, which are:

1. Control Environment  
The attributes of the internal audit's concern are:
  - a. Integrity and ethical values;
  - b. Competence of the people within a company;
  - c. Corporate philosophy;
  - d. Execution of the given tasks and responsibilities;
  - e. Attention and guidance for the company's commission;

Sistem Pengendalian Internal  
Internal Control System

2. **Penaksiran Risiko**  
Beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
    - a. Prediksi ataupun penaksiran risiko atas tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan risiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan;
    - b. Identifikasi dan analisis atas risiko yang relevan atas tujuan (objectives) yang telah ditetapkan;
    - c. Bentuk dasar atas penentuan bagaimana seharusnya penanganan risiko yang ada;
    - d. Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko khusus yang tidak terlepas dari perubahan yang ada;
  3. **Aktivitas Pengendalian**  
Atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah kebijakan dan prosedur dalam setiap aktivitas perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  4. **Informasi dan Komunikasi**  
Beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
    - a. Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya;
    - b. Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan bisnis atau bahkan laporan kepada pihak luar;
    - c. Aliran informasi yang mendukung kesuksesan pengendalian dari instruksi pada tanggung jawab manajemen sampai kepada perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.
  5. **Pengawasan**  
Beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
    - a. Penaksiran kinerja sistem pengendalian yang ada defisiensi atas pengendalian internal harus dilaporkan kepada top manajemen;
    - b. Kombinasi antara evaluasi terus-menerus dan evaluasi terpisah akan menjamin efektivitas sistem pengendalian internal yang dirancang
2. **Risk Assessment**  
The attributes of the internal audit's concern are:
    - a. Risk prediction and assessment of the objectives set and the implications of the risks to the company's sections.
    - b. Identification and analysis of the risks relevant with the objectives set;
    - c. Basic form of the determination on how the risk should be managed;
    - d. Mechanism required to identify specific risks inherent in the existing changes;
  3. **Control Activities**  
The attributes of the internal audit's concern are the policies and procedures in each company's activity. This is to identify the potential risks in the achievement of the objectives set.
  4. **Information and Communication**  
Several attributes of the internal audit's concern are:
    - a. Identification of the relevant information, record and communication in a form that allows the people in the company to take their respective responsibilities;
    - b. Input of the information from inside and outside of the company about a particular event, condition required for business decision-making, or even the reports for external parties;
    - c. Flow of information that supports the success of the control; from the instructions on the responsibilities to the summarizing of the results that need further action from the management.
  5. **Monitoring**  
Several attributes of the internal audit's concern are:
    - a. Assessment of the existing control system performance; the deficiency in the internal control should be reported to the top management;
    - b. Combination of continuous evaluation and separated evaluation will guarantee the effectiveness of the designed internal control system.



## Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

### Evaluasi Tingkat Efektivitas

Sistem Pengendalian Internal pada Perseroan dijalankan oleh Divisi Legal, *Compliance and Corporate Litigation*. Hal tersebut dijalankan guna memastikan tingkat efektifitas pengendalian internal Perseroan, melalui evaluasi mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem. Berbagai evaluasi tingkat efektifitas mencakup:

- Jendela: analisis kasus dan kerugian operasional oleh ORM yang disajikan dalam RMC (*Risk Manajemen Committee*) bersama BOD per bulan;
- Rapat *Post Mortem*: tinjauan antara NMP (*Network Management and Performance*) dengan BOD berdasarkan pelaksanaan rapat antar function di cabang;
- RCSA: tinjauan dari Division Head yang disetujui oleh BOD per kuartal (3 bulan) terkait risiko yang ada pada fungsi masing-masing;
- BCSA: tinjauan dari *Function Head* yang disetujui oleh *Branch Head* dan Area Manager per semester (6 bulan) terkait risiko yang ada pada fungsi masing-masing;
- KRI: tinjauan oleh ORM dan function terkait atas *root cause* dan *action plan* cabang terhadap data anomali yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan yang disajikan dalam RMC bersama BOD per bulan;
- Caller: tinjauan oleh ORM berdasarkan hasil verifikasi via telepon kepada konsumen WOM per bulan;
- Key Control Standard (KCS): BORC di tingkat cabang, RORC di tingkat regional dan RMC di tingkat direksi per bulan;
- Field Verificator: tinjauan oleh ORM dan fungsi terkait atas pemeriksaan verifikator di lapangan yang disajikan dalam RMC bersama BOD per bulan.

### Evaluation on Effectiveness Level

The Compliance Division manages the Internal Control System in the Company. The system is implemented to ensure the effectiveness level of the Company's internal control by utilizing independent evaluation of the policies, procedures, and system adequacy and compliance. The effectiveness level evaluations include:

- Jendela: case and operational loss analyses by ORM presented in the RMC with BOD monthly;
- Post Mortem Meeting: review between Network Management and Performance (NMP) and BOD based on inter-functional meeting organized among functions at the branches;
- RCSA: review by the Division Heads approved by BOD quarterly (3 months) concerning the existing risks in each function;
- BCSA: review by Function Heads approved by Branch Head and Area Manager every semester (6 months) concerning the existing risks in each function;
- KRI: review by ORM and related functions on the root cause and the branch's plan of action against data anomaly which may cause damages to the company, presented by BOD in RMC each month;
- Caller: review by ORM based on phone-call verification to WOM customers each month;
- Key Control Standard (KCS): BORC at the branch level, RORC at the regional level, and RMC at the board of directors level monthly;
- Field verificator: review by ORM and related functions on the verificator follow up in the field presented by BOD in RMC monthly;

# AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

RUPS memiliki wewenang untuk menunjuk Akuntan Independen (eksternal). Pada tahun 2018, RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018. Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp579.400.000.

The GMS has the authority to appoint the Independent Auditor (external). In 2018, the GMS has appointed Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) to carry out the Company's Financial Audit for fiscal year ended 31 December 2018. The service fee was at Rp579,400,000.

Tabel di bawah ini menginformasikan Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan Audit Keuangan untuk Perseroan selama lima tahun terakhir serta biaya audit yang dikeluarkan:

The following table contains the information of the Accountants and the Public Accountant Firm that provided the Financial Audit for the Company in the last five years including the respective fees:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Biaya Audit Audit Fee
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp579.400.000
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp350.000.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp551.800.000
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp551.800.000
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp551.800.000
2014	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp537.500.000
<b>Jasa Lain Selain Audit Keuangan / Other Services</b>			
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp650.000.000
2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp180.000.000
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Daniel Setiadi Handaja	Rp180.000.000
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Agung Purwanto	Rp325.000.000
2014	KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp170.000.000





# MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara bersama-sama membentuk struktur organisasi dengan tanggung jawab, batas kewenangan dan prinsip akuntabilitas terkait proses manajemen risiko Perseroan.

Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee/ROC*) yang membantu Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko Perseroan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Manajemen Committee/RMC*) untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko Perseroan sehari-hari.

### Konsep *Three Lines of Defense*

Perseroan telah menerapkan prinsip *three lines of defense* dalam pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal. Unit Kerja Bisnis sebagai lini pertama memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan risiko secara langsung. Sebagai lini kedua, Unit Kerja Manajemen Risiko yang memastikan kecukupan adanya sistem dan prosedur serta metodologi risiko yang digunakan, serta Unit Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga berperan sebagai independent assurance.

### RISK MANAGEMENT APPLICATION

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors are jointly developed the organization structure with responsibility, authority limits and accountability principle related to the Company's risk management process.

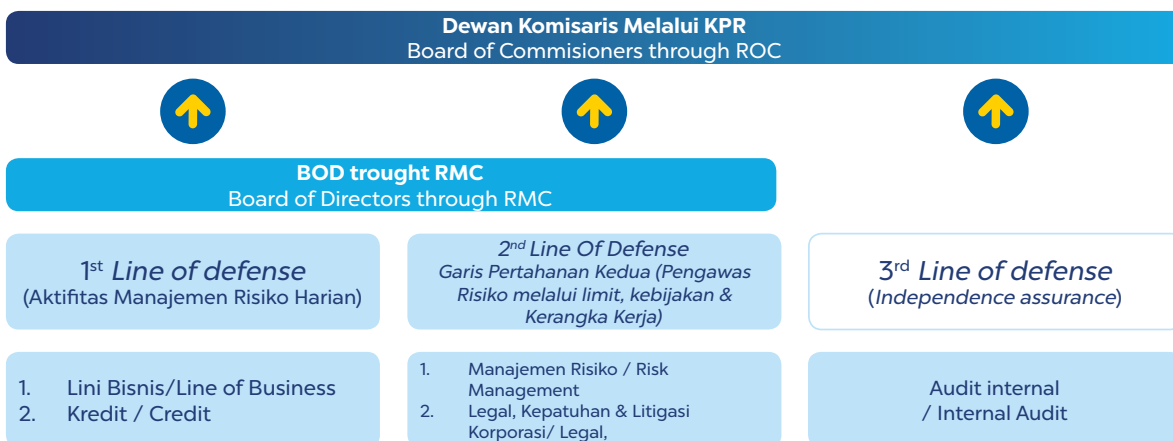
The Company has in place the Risk Oversight Committee (ROC) that assist the Board of Commissioners in effective and comprehensive oversight and evaluation of the Company's risk management process. In addition, the Company has also established the Risk Management Committee (RMC) to assist the Board of Directors in implementing daily risk management in the Company.

### Three Lines of Defense Concept

The Company has implemented a comprehensive and reliable three lines of defense in its risk control. As the first line, Business Unit has direct responsibility on risk management. The Risk Management Unit as the second line ensures the adequacy of risk system, procedures and methodology that are used. The Internal Audit Unit as the third line has a role as independent assurance.

P.

246



Dalam rangka manajemen risiko secara menyeluruh, Perseroan telah didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan infrastruktur yang cukup memadai. Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan metodologi pengelolaan risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko guna mengantisipasi perkembangan bisnis pembiayaan dan perubahan lingkungan bisnis.

In a comprehensive risk management, the Company is supported by quality human resources and adequate infrastructure. To anticipate the financing business development and changes in business environment, the Company continuously develops risk management methodology, policy and procedures.

Manajemen Risiko  
Risk Management

Perseroan memandang bahwa peningkatan kesadaran budaya risiko sangat penting bagi seluruh karyawan. Sejalan dengan itu, peningkatan pemahaman dan kemampuan karyawan senantiasa diperbarui dan ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan kampanye budaya risiko.

The enhancement of risk culture awareness in all employees is very important. As such, the Company always updates and improves the employees' understanding and capabilities improvement through trainings and risk culture campaign.

**PENGELOLAAN RISIKO UTAMA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Untuk mengakomodasi tren perusahaan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis, pedoman manajemen risiko telah disusun dalam memastikan setiap aktivitas bisnis dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja manajemen risiko Perseroan:

**FINANCING COMPANY CORE RISK MANAGEMENT**

To accommodate the financing company business trend and growth, the Company has developed risk management guidelines in ensuring the management of business activities with prudential principle. The following is the Company's risk management framework pillars:





## Manajemen Risiko Risk Management

Perseroan memiliki strategi meminimalisasi dampak beban risiko, melalui implementasi manajemen risiko yang hati-hati dan terukur, kerugian beban risiko diupayakan seminimal mungkin agar posisi keuangan Perseroan relatif stabil.

Perseroan mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan profil risiko sebagai akibat tingkat kompetisi dan perubahan lingkungan bisnis. Perseroan telah merumuskan *risk appetite*, kebijakan & prosedur, dan penetapan batasan risiko maksimal yang dapat diambil. Perseroan memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terukur, terpantau dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat dan baik. Keberhasilan fungsi dan tugas satuan kerja manajemen risiko termasuk di dalamnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen risiko yang profesional. SDM yang unggul dan dukungan infrastruktur yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan proses penerapan manajemen risiko Perseroan.

The Company's strategy in minimizing the impact of risk burden is implemented through prudent and measured risk management. The loss from risk burden is taken as minimum as possible to enable a relatively stable financial position.

To address competition and business environment evolution, the Company takes proactive measures in managing risk profiles. The Company has formulated the risk appetite, policy & procedures, and determined maximum risk thresholds that can be taken. The Company ensures that all risks can be identified, measured, monitored and controlled at the earliest in an accurate and proper manner. The success of risk management unit function and duties include the availability of infrastructure and human resources (HR) with professional risk management field. Excellent HR and good support of infrastructure become the benchmark of successful risk management application process in the Company.

P.

248

## RISIKO KEPENGURUSAN & TATA KELOLA

Risiko Tata Kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Sumber pada Risiko Tata Kelola meliputi pedoman tata kelola yang dimiliki Perseroan tidak memadai, Perseroan tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan perseroan tidak menerapkan Manajemen Risiko secara memadai. Risiko Tata Kelola dapat meningkat antara lain karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.

Risiko Kepengurusan adalah risiko kegagalan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam Risiko Kepengurusan adalah meliputi Direksi dan Dewan Komisaris. Sumber Risiko Kepengurusan antara lain adalah penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan, komposisi dan proporsi Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan aturan yang berlaku dan

## MANAGEMENT & GOVERNANCE RISK

The Governance Risk is a potential of failure in the implementation of good governance, inappropriateness of management style, control environment, and conduct of every parties that are directly or indirectly involved with the Company. The sources of Governance Risk include inadequacy of governance guidelines, improper implementation of good governance principles, and inadequacy of risk management application by the Company. The Governance Risk can be escalated among others due to the intervention of other parties that cause a failure in the implementation of good governance.

The Management Risk is a risk of failure in achieving the Company's objectives due to the Company's failure in maintaining the best management composition of highly competent and integrity. The management in this instance includes the Board of Directors and Board of Commissioners. The Management Risk among others derives from the improper appointment and termination of the Board of Directors and Board of Commissioners with the Company's Articles of Association and prevailing regulatory for the Company, in adequate composition and proportion of the Board of Directors and Board of Commissioners and are not in compliance with the Company's Articles of Association and prevailing regulatory, in adequate

Manajemen Risiko  
Risk Management

kebutuhan Perseroan, kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris. Risiko Kepengurusan dapat meningkat antara lain karena tidak tersedianya sistem remunerasi yang memadai bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

**Strategi Mitigasi Risiko**

Peran serta aktif Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi dalam melakukan pengawasan dan bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas usaha dan profil risiko Perseroan dengan senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi adalah profesional terbaik dalam bidangnya dan memiliki *track record* yang baik serta memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

**RISIKO STRATEGIS**

Risiko Strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang termasuk dalam jenis ini ialah risiko yang berdampak terhadap modal, pendapatan dan reputasi Perseroan, yang secara spesifik timbul akibat pelaksanaan keputusan yang tidak tepat atau akibat kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan industri, ekonomi, teknologi dan regulasi.

**Strategi Mitigasi Risiko**

Perseroan merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, regulasi, dan lingkungan bisnis.

Strategi mitigasi risiko strategis yang diterapkan Perseroan menggunakan beberapa parameter. Parameter pertama ialah kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan kondisi lingkungan bisnis, parameter kedua ialah strategi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan, parameter ketiga ialah posisi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan, dan parameter keempat ialah pencapaian rencana bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan.

competencies and integrity of the Board of Directors and Board of Commissioners and are not augmenting the duties and authorities of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Management Risk can be escalated because of unavailability of adequate remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.

**Risk Mitigation Strategy**

Active roles of the Board of Commissioners/ Sharia Supervisory Board and the Board of Directors in oversight and fully responsible on all the Company's business activities and risk profiles, by striving to abide and comply with the prevailing laws and regulations. The structure of the Board of Commissioners/ Sharia Supervisory Board and the Board of Directors consists of excellent professionals in their field and has good track records as well as fulfill the requirements of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

**STRATEGIC RISK**

The Strategic Risk is a risk that among others cause by improper strategy stipulation and implementation, improper business decision making, or inadequate respond towards external changes that resulted in unsuccessful achievement of the set targets by the Company.

The risks are a risk that impacted the capital, revenues and the Company's reputation, which specifically arise due to improper implementation of decision or inadequate respond from the Company towards the changes in industry, economy, technology and regulations.

**Risk Mitigation Strategy**

The Company formulates risk mitigation strategy to balance risk and revenues by considering the changes in the market conditions, regulations, and business environments.

The Company uses several parameters in the mitigation for strategic risk. The first parameter is the appropriateness of business strategy with business environment conditions; second parameter is the Company's business strategy in financial conglomerate; the third parameter is the Company's business position in financial conglomerate; and the fourth parameter is the Company's business plan achievement in financial conglomerate.



## Manajemen Risiko Risk Management

### RISIKO PEMBIAYAAN

Risiko Pembiayaan merupakan jenis risiko yang timbul dengan dampak pada kerugian finansial Perseroan karena debitur gagal melakukan kewajibannya kepada Perseroan. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian, serta kemungkinan risiko tersebut akan menjadi semakin besar, yang kemudian berdampak negatif bagi posisi keuangan Perseroan.

Dalam rangka penilaian risiko kredit, Perseroan senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Komposisi portofolio pembiayaan dan tingkat konsentrasi.
- Diversifikasi produk pembiayaan Perseroan memainkan peran penting dalam mengurangi potensi risiko kredit yang akan timbul, terutama pada tingkat komposisi dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang diberikan. Produk pembiayaan Perseroan diantaranya pembiayaan motor baru, pembiayaan motor bekas dan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil atau motor. Sebaran wilayah pembiayaan yang diberikan Perseroan telah mencapai hampir seluruh pulau Jawa, Nusa Tenggara & Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Target debitur Perseroan masih didominasi oleh segmen *middle-low* dengan minimal pendapatan sesuai UMR wilayah setempat.
- Strategi penyaluran pembiayaan.
- Upaya menjaga pertumbuhan aset pembiayaan senantiasa dilakukan oleh Perseroan selain melakukan optimalisasi portofolio produk pembiayaan pada beberapa produk unggulan yang mendatangkan tingkat keuntungan signifikan. Saat ini Perseroan dihadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat di pasar sehingga perlu adanya trobosan proses penyaluran pembiayaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.
- Kualitas piutang pembiayaan dan tingkat kecukupan pencadangan.
- Rasio NPF *gross* per Desember 2018 sebesar 2,68% dengan tingkat kecukupan pencadangan >1x. Secara kualitas aset pembiayaan, Perseroan masih pada taraf cukup baik dan terkendali.
- Faktor eksternal.

### CREDIT RISK

The Credit Risk is a risk that may result with the financial losses impact because of a failure of debtor in carrying out its obligations to the Company. Failing in managing this risk can result in losses, as well as a possibility of greater risk, which eventually led to negative impact on the Company's financial position.

In the assessment of credit risk, the Company strives to take the following matters into account:

- Credit portfolio and concentrations level composition.
- The Company's financing products diversification plays an important role in reducing credit risk potential that may arise, in particular at the composition level and credit portfolio concentrations. The Company's financing products include new motor vehicles credit, used motor vehicles credit and multipurpose financing with car or motor vehicles as collateral. The financing coverage by the Company has reached almost all the regions of Java, Nusa Tenggara & Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi islands. The debtors target is still dominated by middle-low segment with minimum income according to the local minimum wages.
- Credit disbursement strategy.
- The Company strives to maintain credit assets growth in addition to optimize credit product portfolio in several quality products that render significant profitability levels. The Company currently experienced a very stringent competition in the market thereby a breakthrough in lending process is necessary without eliminating prudential principle.
- Credit receivables quality and appropriated adequacy level.
- Gross NPF ratio as of December 2018 was 2.68% with >1x appropriated adequacy level. In terms of credit assets quality, the Company is still under acceptable and control level.
- External factors.



Manajemen Risiko  
Risk Management

h. Kondisi ekonomi terutama tingkat inflasi sangat mempengaruhi kualitas pembiayaan Perseroan menimbang bahwa mayoritas debitur merupakan segmen *middle-low* yang sangat sensitif terhadap perubahan atau kenaikan harga barang. Penurunan kualitas aset pembiayaan terjadi dikarenakan mayoritas segmen debitur mengalami penurunan kapasitas untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Perseroan.

h. The economic conditions especially inflation level render significant impact on the Company's credit quality, considering that the majority of debtors are middle-low segment that are very sensitive towards the changes or increase price of goods. The decrease of credit assets quality is due to the decrease of capacity of middle-low segment debtors to settle their obligation to the Company.

**Strategi Mitigasi Risiko**

Risiko Pembiayaan merupakan risiko utama Perseroan. Pengelolaan risiko pembiayaan dilakukan oleh Perseroan baik secara individual maupun pada tingkat portofolio pembiayaan. Praktik pengelolaan risiko pembiayaan sehari-hari dilakukan oleh unit kerja bisnis secara terpisah dari unit kerja manajemen risiko, baik secara fungsional maupun pengorganisasiannya untuk memastikan adanya kecukupan prinsip dual control dan segregation of duties.

Perseroan memiliki budaya risiko yang cukup baik dengan memastikan adanya kecukupan kebijakan penetapan limit risiko pembiayaan yang baik, proses evaluasi risiko pembiayaan secara menyeluruh, adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional serta kehandalan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Perseroan.

Proses evaluasi dan peninjauan risiko pembiayaan dilakukan secara berkala oleh unit kerja bisnis bersama dengan unit kerja manajemen risiko serta dipantau secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tataran komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko Perseroan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, unit kerja manajemen risiko bekerja sama dengan unit kerja bisnis, senantiasa menyempurnakan kebijakan penetapan *risk appetite* yang tertuang dalam kebijakan pembiayaan sehingga pengelolaan risiko pembiayaan menjadi lebih baik serta melakukan evaluasi batasan wewenang persetujuan pembiayaan secara berkala, sehingga Perseroan memiliki tingkat pelayanan dan kompetitif yang lebih baik.

**Risk Mitigation Strategy**

The Credit Risk is the Company's main risks. The Company manages the credit risk individually as well as at the credit portfolio level. To ensure the adequacy of dual control and segregation of duties, a daily credit risk management practice is carried out by business unit separated from the risk management unit, both functionally or its organization.

The Company has sufficient risk culture by ensuring the adequacy of proper credit risk threshold policy, comprehensive credit risk evaluation process, professional human resources support, and reliable risk management information system.

Business units are periodically carried out the credit risk evaluation and examination with risk management unit, as well as actively monitored by the Board of Directors and Board of Commissioners at the Company's risk management committee and risk oversight committee levels.

To boost sound business growth and sustainable profitability with due observance to prudent principle, the risk management unit and business units are continuously refined the risk appetite policy that stated in the credit policy thereby rendering better management of credit risk. The units also periodically carried out approval authority limit evaluation, hence the Company has better services and competitive levels.





## Manajemen Risiko Risk Management

Proses persetujuan pembiayaan telah ditetapkan secara efektif sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan secara optimal dengan mendelegasikan wewenang persetujuan pembiayaan dari level kantor pusat sampai dengan kantor cabang operasional.

The effective credit approval process has been set, hence enabling optimum credit decision making process by delegating the credit approval authority from head office to operating branches levels.

Diagram berikut menggambarkan proses siklus pembiayaan :

The following diagram illustrates the credit cycle process:

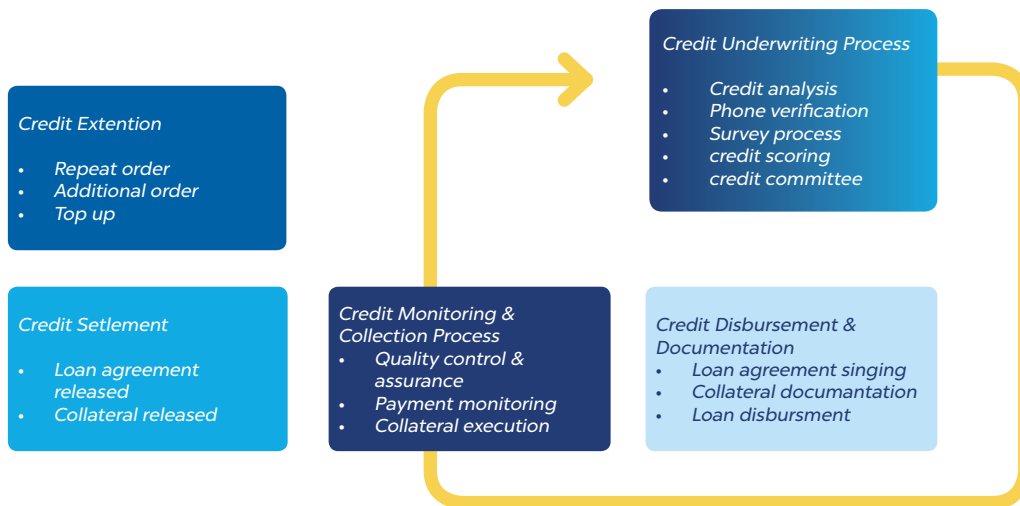
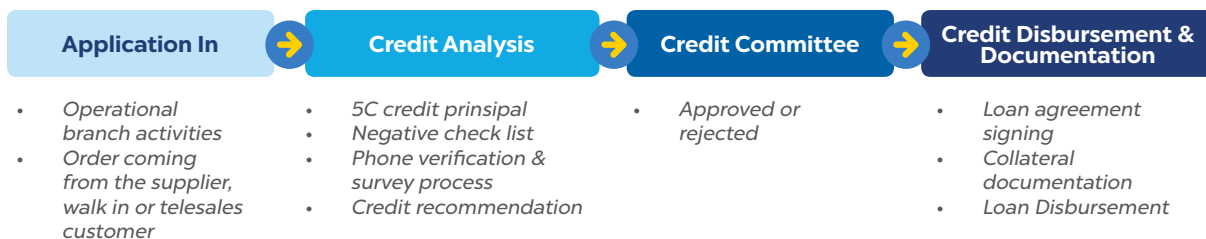


Diagram berikut menggambarkan proses persetujuan pembiayaan (*loan origination*):

The following diagram illustrates the credit approval process (*loan origination*):



### Catatan:

- Lokasi Komite Pembiayaan berada di kantor cabang operasional dan kantor pusat
- Proses persetujuan melalui proses persetujuan *online* dan *offline*

### Note:

- Credit Committee location are both in operational branch & head office
- Approval process using both *online* & *offline* approval process

Proposal pembiayaan yang diajukan oleh kantor cabang dengan jumlah tertentu baik perorangan, maupun korporasi, dievaluasi secara independen oleh unit kerja kredit analis untuk memastikan semua risiko telah teridentifikasi dan termitigasi dengan jelas, sehingga risiko bersih dapat terukur dengan baik.

The credit analyst unit independently evaluates credit proposals from branch offices with certain amount both individually and corporate. This is to ensure that all risks have been clearly identified and mitigated, hence creating clean and proper measure of risks.

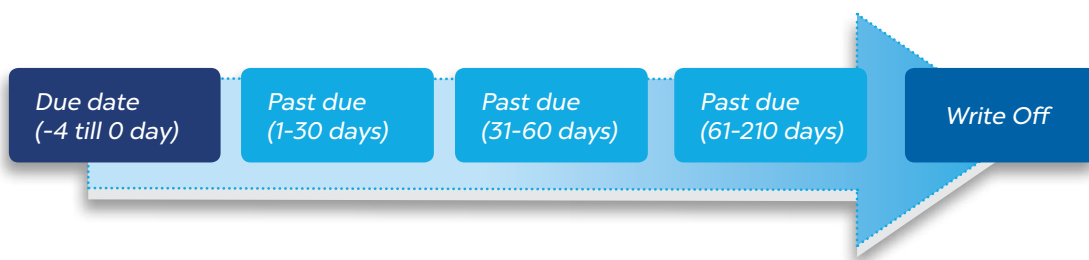
Manajemen Risiko  
Risk Management

Pengajuan pembiayaan pada jumlah tertentu dapat menjadi kewenangan kantor cabang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diterima dari kantor pusat. Wewenang persetujuan kredit yang dimiliki oleh kantor cabang ditinjau dan dievaluasi secara berkala.

The branch offices in accordance with the authority delegation may take the authority of credit proposals with certain amount from the head office. The credit approval authority of branch offices is periodically reviewed and evaluated.

Diagram berikut menggambarkan proses pemantauan & collection pembiayaan:

The following diagram illustrates the credit monitoring and collection process:



Dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan dilakukan proses penagihan (*collection*), eksekusi agunan sampai *write off* berdasarkan pada lamanya hari tertunggak debitur melakukan pembayaran kewajiban angsuran. Prosedur peringatan tanggal jatuh tempo kewajiban sampai dengan eksekusi agunan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

The credit risk mitigation includes collection process, collateral execution to write off based on the length of the debtors' overdue period in paying installment obligations. The obligation due date up to the collateral execution are carried out in accordance with the applicable policies.

Unit kerja manajemen risiko melakukan aktivitas pemantauan kualitas pembiayaan secara berkala pada seluruh portofolio pembiayaan Perseroan selain melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pembiayaan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, makro ekonomi, dan regulasi. Telaah risiko kredit akan diberikan selaras dengan rekomendasi dalam bentuk tindakan preventif maupun perbaikan kebijakan untuk memitigasi kualitas pembiayaan yang memburuk.

The risk management unit regularly monitors credit quality in the Company's entire credit portfolio in addition to conduct early detection of the possibility in the decrease of credit quality that may be caused by the changes of market conditions, macroeconomics and regulations. The credit risk analysis will be provided in line with the recommendations through preventive measures as well as improvement policies to mitigate non-performing credit quality.

Di sisi kebijakan, Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan hirarki yang terdiri dari kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur. Hirarki tersebut dirancang untuk memberikan panduan yang lebih jelas, terstruktur dan menyeluruh untuk menciptakan konsistensi di seluruh organisasi.

In terms of policy, the Company has in place 3 (three) hierarchy levels consisting of framework, policy and procedures. This hierarchy is designed to render clear, structured and comprehensive guidance for consistencies in the entire organizations.

Kebijakan dan prosedur secara berkala ditinjau dan diperbarui melalui komite yang relevan untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, regulasi, dan lingkungan bisnis.

The relevant committees are regularly reviewed and updated the policy and procedures to reflect the changes in the market conditions, regulations, and business environment.

Keberhasilan dalam mengelola risiko pembiayaan ini bisa dicapai dengan menerapkan siklus kredit yang prudent, mulai dari menawarkan produk

The credit risk management can be achieved by applying prudent credit cycle, from appropriate product offering, proper target market



## Manajemen Risiko Risk Management

yang sesuai, mengidentifikasi target pasar yang tepat, menetapkan kriteria penerimaan risiko yang cermat, menerapkan pengendalian yang kuat dalam inisiasi kredit dan proses persetujuan kredit, mempertahankan portofolio kredit yang sehat, serta menerapkan sistem penagihan dan praktik pemulihan yang memadai.

### RISIKO ASET & LIABILITAS

Risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perseroan.

Dalam melakukan penilaian risiko aset dan liabilitas, Perseroan senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan aset  
Penilaian aset Perseroan yang terekspose pergerakan tingkat suku bunga, nilai tukar dan potensial kerugiannya. Perseroan dituntut dapat melakukan pengelolaan yang baik dalam rangka memitigasi penurunan nilai aset akibat pergerakan suku bunga dan nilai tukar tersebut.
- b. Pengelolaan liabilitas  
Penilaian liabilitas Perseroan yang terekspose pergerakan tingkat suku bunga, nilai tukar dan potensial kerugiannya. Perseroan dituntut dapat melakukan pengelolaan yang baik dalam rangka memitigasi kenaikan nilai liabilitas akibat pergerakan suku bunga dan nilai tukar tersebut.
- c. Ketidaksiesuaian antara aset dan liabilitas  
Posisi aset dan liabilitas yang terekspose tingkat suku bunga dan nilai tukar harus dipelihara dengan baik oleh Perseroan baik secara jatuh tempo/durasi/*repricing gap* maupun *mismatch* antara posisi aset dan liabilitas (*gapping*) yang berdampak pada tingkat likuiditas Perseroan.

### Strategi Mitigasi Risiko

Dalam mengelola risiko aset & liabilitas, Financial Planning and Investor Relation Division bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan, metodologi pengukuran, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko aset & liabilitas, serta memantau kepatuhan terhadap pedoman-pedoman tersebut.

Secara berkala, Perseroan melakukan evaluasi dan pembaharuan yang dianggap perlu atas setiap kebijakan dan prosedur manajemen risiko aset & liabilitas, yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi terkait.

identification, prudent risk acceptance criteria determination, strong control implementation in credit initiation and approval process, maintaining sound credit portfolio, as well as applying adequate collection system and recovery practices.

### ASSETS & LIABILITIES RISK

The risk resulted from a potential of failure in the Company's assets and liabilities management, which creates funding deficiency in achieving the Company's obligations.

In the assessment of assets and liabilities risk, the Company strives to take into account the following subjects:

- a. Assets management  
The Company's assets assessment that exposed by the fluctuation of interest rate, exchange value and losses potentials. Proper management is required by the Company to mitigate a decrease of assets value due to such fluctuations in interest rate and exchange value.
- b. Liabilities management  
The Company's liabilities assessment that exposed by the fluctuation of interest rate, exchange value and losses potentials. Proper management is required by the Company to mitigate a decrease of liabilities value due to such fluctuations in interest rate and exchange value.
- c. Inappropriateness of assets and liabilities  
The Company has to maintain the assets and liabilities position exposed by the interest rate and exchange value, both in maturity/duration/ repricing gap as well as mismatch between the assets and liabilities position (*gapping*), which impact on the Company's liquidity level.

### Risk Mitigation Strategy

In the management of assets & liabilities risk, the Financial Planning and Investor Relations Division is responsible to implement the policy, methodology, monitoring, and reporting of the assets & liabilities risk exposures, as well as monitoring its compliance with such guidelines.

The Company regularly evaluates and updates necessary policy and procedures of assets & liabilities risk management, which always adapted with the latest conditions and relevant regulations.

Manajemen Risiko  
Risk Management

Perseroan juga melakukan pemantauan berkala terkait kondisi *mismatch* utamanya terkait eksposur pergerakan suku bunga di pasar dan kondisi perbedaan *re-pricing* antara aset dan liabilitas. Selain itu, *Stress Testing* juga dilakukan untuk mengevaluasi kapabilitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban likuiditas dalam kondisi krisis.

### RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional merupakan risiko-risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau problem eksternal yang bisa mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional umumnya dapat menimbulkan kerugian keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan (penyediaan dana), teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Perseroan telah menerapkan pengelolaan risiko operasional, yaitu proses yang mengidentifikasi secara sistematis penyebab kegagalan dalam kegiatan operasional sehari-hari secara fungsional organisasi, menilai risiko kerugian dan mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut.

#### Strategi Mitigasi Risiko

Upaya meningkatkan kebutuhan manajemen risiko operasional yang efektif didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kerugian operasional signifikan yang dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan;
2. Regulasi yang baru dan praktik terbaik dalam Perusahaan Pembiayaan di Indonesia;
3. Perubahan yang relatif cepat dalam dunia bisnis;
4. Tumbuhnya kebutuhan akan pengukuran kinerja;
5. Perlindungan dan pengembangan terhadap nilai pemegang saham.

Dalam memberikan respon yang tepat terhadap faktor-faktor di atas, juga atas visi Perseroan untuk tetap menjaga risiko agar tetap seimbang dengan pertumbuhan bisnis, Perseroan menyadari kebutuhannya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko operasional, serta keutuhan untuk membentuk kerangka kerja manajemen risiko operasional, kebijakan, dan prosedur yang memadai serta konsisten diterapkan di Perseroan.

The Company also regularly monitors the mismatch conditions in particular the exposures of interest rate fluctuation in the market and re-pricing differences between assets and liabilities. Moreover, the stress testing is carried out to evaluate the Company's capabilities in meeting the liquidity during crises.

### OPERATIONAL RISK

The Operational Risk is risks resulted from inadequacy and/or disfunction of internal process, human errors, system failures or external issues that may impact the Company's operations. In general the Operational risk can both directly and indirectly render the financial losses, as well as potential loss on failing in taking the opportunity of generating profitability. The Operational risk can be embedded at the Company's functional activities such as lending, information system technology and management information system, as well as human resources management.

The Company has implemented the operational risk management, which includes systematic identification on the failure of daily operations in organization functions, risk of loss assessment and taking proper measures to minimize the impact of such losses.

#### Risk Mitigation Strategy

The effort to enhance effective operational risk management is encouraged by the following factors:

1. Significant operational losses experienced by Financing Companies industry;
2. New regulations and best practices in Financing Companies in Indonesia;
3. Relatively fast evolution in business environment;
4. Increase needs of performance measurement;
5. Shareholders' value protection and development.

In accurately responding the above factors, as well as the Company's vision to maintain a balance risk with business growth, the Company realizes its needs to enhance the awareness of operational risk, as well as the need to establish the operational risk management adequate framework, policy and procedures, which shall be consistently applied in the Company.



## Manajemen Risiko Risk Management

Strategi manajemen risiko operasional telah diformulasikan dengan baik dan dipahami secara merata, hal ini sangat penting dalam membangun kesadaran manajemen risiko operasional di Perseroan.

Model tata kelola risiko operasional untuk Perseroan dilakukan secara formal, transparan, dan konsistensi. Model tersebut juga secara jelas menegaskan tugas dan tanggung jawab serta alur pelaporan demi terciptanya pengelolaan risiko operasional Perseroan yang berjalan secara efektif. Model tata kelola disusun dan diterapkan untuk menempatkan akuntabilitas terhadap risiko operasional yang mungkin timbul, serta pada saat yang bersamaan, memfasilitasi pemisahan tugas secara independen antara unit pengendali risiko dan fungsi Audit Internal.

Sifat dan tingkat risiko operasional dapat berubah seiring perubahan pada perilaku manusia, struktur organisasi, proses, sistem, dan faktor-faktor eksternal lain. Oleh karena itu, kajian secara terus menerus, pemantauan risiko, serta efektivitas pengendalian secara dinamis merupakan hal-hal penting yang wajib dilaksanakan dan diwujudkan guna mencapai manajemen risiko operasional yang efektif.

Untuk memfasilitasi proses ini, Perseroan telah membentuk perangkat utama risiko operasional sebagai bagian dari pengembangan manajemen risiko operasional yang efektif. Sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional, *Businesss Continuity Management* merupakan pendekatan yang mencakup kerangka kerja, kebijakan standar, dan prosedur dalam membangun ketahanan dan kemampuan, demi memastikan bahwa operasional Perseroan dapat dipulihkan dengan cepat apabila terjadi gangguan pada fungsi-fungsi kritikal, sesuai dengan batas toleransi maksimum yang telah ditentukan.

Terkait hal tersebut, latihan simulasi krisis dan pemulihan dilakukan secara berkala untuk menguji rencana serta kesiapan terhadap krisis yang mungkin terjadi.

### Kebijakan Anti Fraud

Sebagai bagian dari sinergi dalam mitigasi risiko operasional, kebijakan *Anti-Fraud* dibuat dalam rangka membangun program-program serta pengendalian *anti-fraud* yang kuat dan

The operational risk management strategy has been well formulated and comprehended equally, a very important measure in building awareness of operational risk management in the Company.

The operational risk governance model for the Company is formally, transparently and consistently conducted. Such model is clearly affirmed the duties and responsibilities as well as reporting mechanisms for the creation of effective operational risk management in the Company. The governance model is developed and applied for the accountability on operational risk that may arise, and at the same time to facilitate segregation of duties independently between risk control unit and Internal Audit function.

The nature and level of operational risk can evolve in coherent with the changes of human behaviour, organization structure, process, system, and other external factors. To that end, continous review, risk monitoring, and dynamic control effectiveness become key points that shall be implemented and realized in order to achieve effective operational risk management.

To facilitate this process, the Company has formed the operational risk main tools as part of effective operational risk management development. As part of operational risk mitigation, the Business Continuity Management serves as an approach that covers framework, standard policy, and procedures in building the defense and capabilities. This is to ensure that the Company's operations can be quickly restored in the event of disruptions at critical functions, in accordance with the set maximum tolerancy limits.

In this instance, the regular crises simulation and recovery training is conducted to examine the plan and preparedness toward the crises that may occur.

### Anti Fraud Policy

As part of synergy in the operational risk mitigation, the Anti Fraud policy is developed to create strong and comprehensive anti fraud programs and control. This policy regulates the principle,



Manajemen Risiko  
Risk Management

komprehensif. Kebijakan ini mengatur prinsip, strategi, dan prosedur terkait *fraud* yang diimplementasikan pada setiap tingkatan yang ada di Perseroan, guna mendorong terciptanya standar integritas yang tinggi.

Strategi yang diterapkan untuk memerangi *fraud* didasarkan pada pencegahan, deteksi dini, investigasi, dan perbaikan yang diperlukan. Melalui kebijakan Anti-*Fraud*, Perseroan menerapkan *zero tolerance fraud* terhadap karyawan yang terbukti melakukan atau mendukung *fraud*. Pelaksanaan kebijakan Anti-*Fraud* merupakan tanggung jawab seluruh karyawan tanpa terkecuali. Kampanye Anti-*Fraud* secara terus menerus dipublikasikan kepada seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Budaya manajemen risiko operasional yang kuat di Perseroan diwujudkan melalui program pembelajaran dan kesadaran risiko operasional yang terstruktur. Budaya manajemen risiko operasional tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik.

strategy, and procedures on *fraud* implemented in every level of the Company, in order to create high integrity standard.

The strategy implemented to prevent *fraud* is based on prevention, early detection, investigation, and necessary improvements. Through the Anti *Fraud* policy, the Company applies zero tolerance *fraud* towards employees that are proven to have performed or supported *fraud*. The Anti *Fraud* policy implementation is the responsibility of entire employees without exception. The Anti *Fraud* campaign is continuously published to all the Company's organization levels.

Strong operational risk management culture in the Company is realized through learning program and structured operational risk awareness. Such operational risk management culture is an inseparable part of the good corporate governance.

## RISIKO OPERASIONAL LAINNYA

### RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi merupakan jenis risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha Perseroan, hingga menyebabkan terbentuknya persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini muncul ketika reputasi Perseroan terpengaruh oleh satu atau beberapa kejadian yang berdampak negatif pada reputasi Perseroan, khususnya yang timbul akibat publikasi negatif tentang kegiatan bisnis atau kondisi keuangan Perseroan.

Terlepas dari kebenarannya, publikasi negatif berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Perseroan. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai akibat negatif seperti tuntutan litigasi, penurunan jumlah debitur, bisnis dan/atau pendapatan Perseroan.

### Strategi Mitigasi Risiko

Risiko Reputasi dijaga melalui pengelolaan seluruh risiko yang dapat memengaruhi reputasi Perseroan, melalui tata kelola perusahaan yang baik dan proses manajemen risiko yang efektif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pemantauan secara aktif atas berita-berita yang beredar, informasi atas perkembangan pasar,

## OTHER OPERATIONAL RISKS

### REPUTATION RISK

The Reputation Risk is a risk type that among others resulted by negative publication on the Company's business activities, hence causing negative perceptions on the Company. This risk arises when the Company's reputation is influenced by one or several situations that negatively impacted the Company's reputation, specifically resulted from negative publications on the Company's business activities or financial conditions.

Aside from the truth, negative publication has a potential to decrease the public trusts to the Company. This may cause several negative results such as litigations, decrease of total borrowers, the Company's business and/or revenues.

### Risk Mitigation Strategy

The Reputation Risk is maintained through all risk management that may influence the Company's reputation, by the execution of good corporate governance and effective risk management process. The Corporate Services and Communication Department carry out the Reputation Risk management through active





## Manajemen Risiko Risk Management

persepsi *stakeholders*, dan publikasi di media massa yang dikelola oleh *Corporate Services and Communications Department*. Keluhan konsumen yang masuk dan diterima oleh Perseroan akan ditindaklanjuti *Corporate Services and Communications Department* secara baik, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

### RISIKO HUKUM

Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang timbul karena ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Risiko hukum disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, ataupun kelemahan pertalian, seperti tidak dipenuhi syarat sah kontrak, dan lain sebagainya.

#### Strategi Mitigasi Risiko

Legal Department merupakan satuan kerja/fungsi yang membawahi bidang hukum dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability guna memeriksa kembali validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

Dengan strategi mitigasi dan pengelolaan risiko hukum di atas, maka kepentingan Perseroan senantiasa dapat terlindungi.

### RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perseroan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

#### Strategi Mitigasi Risiko

Untuk Risiko Kepatuhan, Perseroan menunjuk Legal, *Corporate Litigation, and Compliance Division* yang terus mengkaji, memberikan saran, mengkaji ulang, dan memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur Perseroan yang terkait dengan hukum telah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

### RISIKO DUKUNGAN DANA

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal pada Perseroan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga. Permodalan Perseroan menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menyerap kerugian

monitoring on published news, information on market development, *stakeholders' perceptions*, and mass media publications. The *Corporate Services and Communication Department* will follow up the customers' complaint recorded and accepted by the Company properly, in accordance with the set timing.

### LEGAL RISK

The Legal Risk is a risk type resulted from the Company's incapability in managing litigations that may be detrimental to the Company. The Legal risk is caused by the weakness of jurisdictive aspect, which among others due to legal lawsuits, lack of supporting laws and regulatory, or weakness of agreements, such as lack of fulfillment of legal contract requirements, and so forth.

#### Risk Mitigation Strategy

The Legal Department is a unit/function in charge of legal field and carries out periodic evaluation on the contracts and agreements between the Company and other parties. This is conducted among others by re-assessment on the effectiveness of enforceability process in order to re-verify the validity of rights in such contracts and agreements.

With the above legal risk mitigation strategy and management, the Company's interests can be continually protected.

### COMPLIANCE RISK

The Compliance Risk is a risk resulted by in adherence or in compliance in the implementation of laws and regulatory as well as other prevailing rules.

#### Risk Mitigation Strategy

The Company assigns the Legal Corporate Litigation, and Compliance Division to carry out Compliance Risk, by continually reviewing, providing recommendations, re-analysing, and ensuring that all of the Company's policies and procedures related to legal matters have been in compliance with the prevailing regulatory.

### CAPITAL RISK

The Capital Risk is a risk resulted by insufficiency of funds/capital in the Company, including lack of funds/capital injection access to address losses or unforeseen funds/capital needs. The Company's capital reflects the Company's capability in taking unexpected losses resulted from the Company's

Manajemen Risiko  
Risk Management

tak terduga akibat dari pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) bersumber dari kemampuan pendanaan (permodalan) yang rendah dan tambahan pendanaan (permodalan) yang lemah.

### Strategi Mitigasi Risiko

Dalam aktivitas usaha pembiayaan, Perseroan dihadapkan pada potensi terjadinya kredit macet, kenaikan suku bunga pinjaman yang berdampak pada penurunan tingkat pendapatan bunga bersih dan kondisi likuiditas *cash flow* Perseroan dalam memenuhi kewajiban pihak kreditur. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan strategi sumber pendanaan baik dari modal sendiri, pinjaman Bank, maupun akses pasar modal maupun pasar uang. Saat ini, profil sumber pendanaan Perseroan masih didominasi oleh pinjaman Bank sebesar >60% dan sisanya penerbitan surat utang. Saat ini, kondisi permodalan Perseroan dirasa sangat baik dan cukup untuk me-cover potensi kerugian akan terjadi dan telah sesuai dengan ketentuan minimal modal regulator.

### PROFIL RISIKO

Profil Risiko Perseroan per Desember 2018 ialah sebagai berikut:

assets and liabilities management.

The Capital Risk derives from low capital capability and weak capital injection.

### Risk Mitigation Strategy

In financing business activities, the Company may address the potential of non-performing loans, increase of loan interest rate that impact on the decrease of net interest income and cash flow liquidity conditions in meeting the obligations of creditors. To that end, the Company has prepared capital resources strategy from own capital, Bank loans, as well as capital market access including money market. Currently, the Company's capital profile is still dominated by Bank loans at >60% and the balance came from bonds issuance. Currently, the Company's capital conditions is considered very good and sufficient to cover losses potential and has been in accordance with the minimum capital limits by the regulators.

### RISK PROFILES

The Company's Risk Profiles as of December 2018 is as follows:

No.	Jenis Risiko Risk Types		Nilai Risiko (NR) Risk Value	Bobot Weight	Nilai Risiko Bersih Net Risk Value
1	Kepengurusan Management		1,06	10%	0,13
2	Tata Kelola Governance		1,38	15%	0,54
3	Strategis Strategic		1,16	10%	0,18
	3.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,25			
	3.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,06			
4	Operasional Operational		1,31	20%	0,58
	4.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,45			
	4.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,16			
5	Aset & Liabilitas Assets & Liabilities		1,13	15%	0,24
	5.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,98			
	5.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,17			



## Manajemen Risiko Risk Management

No.	Jenis Risiko Risk Types		Nilai Risiko (NR) Risk Value	Bobot Weight	Nilai Risiko Bersih Net Risk Value
6	Pembiayaan Credit		1,33	30%	0,93
	6.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,36			
	6.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,29			
				100%	2,60
Total Nilai Risiko Bersih (G) / Total Net Risk Value (G)					1,27
Dukungan Dana (Permodalan) / Funding (Capital)					
a.	Kemampuan Permodalan / Capital Capability		1,25	50%	1,22
b.	Tambahan Permodalan / Capital Injection		1,19	50%	0,99
				100%	2,21
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (I) / Total Funding Risk Value (I)					1,22
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Nilai Risiko Dukungan Dana/ Weight of Net Risk Value and Funding Risk Value					2/3 : 1/3
Nilai Risiko Keseluruhan / Overall Risk Value					1,25
Tingkat Risiko / Risk Level					Sedang Rendah Low Moderate

P.

260

### KEGIATAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018 sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik, Perseroan menjalankan tata kelola manajemen risiko sebagai berikut:

#### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Komisaris memiliki pemahaman yang baik dan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan risiko Perseroan, pengawasan atas audit internal dan eksternal termasuk hasil temuannya serta memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan risiko sehari-hari termasuk melakukan formulasi dan eksekusi rencana bisnis (anggaran), pencapaian anggaran, pengaturan kebijakan, pengelolaan dan pemantauan risiko serta sumber daya Perseroan. Sasaran dan strategi Perseroan tercantum dalam anggaran perusahaan dimana dalam penyusunannya telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko.

### RISK MANAGEMENT APPLICATION ACTIVITIES IN 2018

As part of good governance practices, the Company undertakes risk management governance during 2018, as follows:

#### Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board Active Oversight

- The Board of Commissioners has good comprehension and continually undertakes oversight function on the Company's performance and risk management, oversight on internal and external audit including its finding results as well as ensuring timely disclosures in accordance with prevailing regulatory.
- The Board of Directors is responsible on daily risk management including the formulation and execution of business plan (budget), budget achievement, policy arrangement, risk management and monitoring, as well as the Company resources. The Company's targets and strategies are stated in the corporate budget whereby in its development has considered internal and external factors including the Company's capabilities in risk management.

Manajemen Risiko  
Risk Management

- Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan supervisi atas segala aktivitas usaha pembiayaan syariah Perseroan. Anggota DPS bertindak sebagai penasehat dan konsultan Perseroan bagi Direksi dan Unit Usaha Syariah Perseroan. DPS bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam hal aktivitas pengawasan dan pengelolaan risiko Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi terlibat aktif dalam *Risk Oversight Committee* (ROC) dan *Risk Management Committee* (RMC) dengan frekuensi pertemuan masing-masing minimal empat kali setahun.

#### Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

Perseroan telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) termasuk penetapan batas wewenang memutus. Kebijakan tersebut dirasa telah cukup meng-cover semua jenis risiko Perseroan dalam kerangka sebagai Perusahaan Pembiayaan. Penetapan limit risiko diantaranya tertuang dalam anggaran parameter operasional Perseroan per segmen produk pembiayaan. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit risiko tersebut secara berkala dan terus menerus dilakukan *review* dan penyempurnaan menyesuaikan arah bisnis serta kondisi perubahan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat risiko Perseroan.

#### Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Perseroan telah mengimplementasikan *Credit Scoring*, *Risk Control & Self Assessment*, *Key Risk Indicator*, dan *Loss Even Database* dalam hal upaya identifikasi dan pengukuran tingkat risiko kredit dan risiko operasional. Pemantauan risiko dilakukan secara bulanan melalui *Portfolio Management Report* dan *Operational Risk Dashboard* termasuk didalamnya proses pemantauan *Risk appetite* Perseroan. Satuan kerja *Risk Management* secara berkelanjutan memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Perseroan.

#### Sistem informasi manajemen risiko

Ketersediaan sistem informasi yang memadai merupakan faktor penunjang utama dalam rangka proses manajemen risiko secara komprehensif. Pendeteksian tingkat risiko secara dini akan sangat

- The Sharia Supervisory Board conducts supervisory function on all of the Company's sharia financing business activities. Members of the Sharia Supervisory Board perform as the Company's advisor and consultant for the Board of Directors and Sharia Business unit. The Sharia Supervisory Board is independent and established by the National Sharia Board.

In the oversight and risk management of the Company, the Board of Commissioners and Board of Directors are actively involved in the ROC and RMC with meetings frequency of minimum four times annually.

#### Adequacy of Policies, Procedures, and Risk Thresholds Determination

The Company has in place the risk management policy that stated in the Risk Management Practices Guidelines including the determination of decision authority limits. The policy is considered sufficient in covering all of the Company's risk types within the framework of financing company. The determination of risk thresholds among others is stated in the Company's operations parameter budget per financing product segment. The adequacy of policies, procedures and risk thresholds is regularly and continually reviewed and refined in coherent with business directions and changes of internal and external factors that influence the Company's risk level.

#### Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Process

The Company has implementd *Credit Scoring*, *Risk Control & Self Assessment*, *Key Risk Indicators*, and *Loss Even Database* in an effort to identify and measure the credit risk and operational risk levels. The risk monitoring is conducted monthly through the *Management Report Portfolio* and *Operational Risk Dashboard* including the Company's *Risk Appetite* monitoring process. The *Risk Management Unit* is continuously ensuring the adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control process.

#### Risk Management Information System

The availability of adequate information system serves as main supporting factor to undertake comprehensive risk management process. The early detection of risk level will be very useful to



## Manajemen Risiko Risk Management

berguna dalam hal menekan potensi kerugian Perseroan yang akan terjadi serta pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat dalam upaya proses mitigasi risiko. Perseroan sangat *concern* akan pentingnya sistem informasi manajemen risiko yang baik sehingga upaya menyempurnakan dilakukan secara berkelanjutan.

### Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Sistem pengendalian internal dinilai cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Secara struktur organisasi, proses pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Proses *review* oleh Satuan Kerja Audit Internal secara berkala dengan cakupan aspek pemeriksaan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil audit menjadi salah satu dasar penyempurnaan kebijakan Perseroan.

minimize the losses potential that may be arising as well as to deliver fast and proper decision making in the risk mitigation process. The Company is very concerned on the important of proper risk management information system, hence continuously refine the system.

### Comprehensive Internal Control System

The internal control system is considered effective in supporting the risk management practices. In organization structure, the internal control process is carried out by the Internal Audit unit that ensure the conformity of all transactions with the prevailing policies and procedures. The Internal Audit Unit regularly reviews the process with pre-set audit aspects scope. The audid results serve as one of the policy refinement base for the Company.

P.

262

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Perseroan kembali akan membuat langkah perbaikan dengan berpedoman tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko, terutama pada sisi kecukupan kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Menyempurnakan Laporan Profil Risiko Perseroan, terkait risiko yang melekat pada kegiatan usaha (*inherent risk*) Perseroan dan kualitas penerapan manajemen risiko.
- Mempertahankan nilai komposit profil risiko Perseroan di tahun 2018 yang berada ditingkat "Low" versi penilaian profil risiko perbankan yang disesuaikan terhadap anak Perusahaan (bank) dan tingkat "Sedang Rendah" versi penilaian profil risiko LJKNB.
- Penguatan sistem informasi manajemen risiko terutama implementasi *core system* baru, membangun data *warehouse* dan sistem pelaporan/ monitoring yang handal guna menunjang peningkatan kinerja Perseroan dalam melakukan aktivitas bisnis serta penguatan pada proses pemantauan risiko Perseroan yang lebih menyeluruh.

### IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN 2019

In 2019, the Company develops improvement measures by referring to the previous year as elaborated below:

- Improve risk management practices quality, in particular on the adequacy of policies and procedures, risk identification, measurement, monitoring and control process, as well as risk management information system.
- Refine the Company's Risk Profiles Report, related to the inherent risk of the Company and risk management practices quality.
- Maintain the Company's risk profiles composite index in which in 2018 at a "Low" level of banking risk profile assessment version that adjusted toward subsidiaries (bank) and "Low Moderate" level of the LJKNB risk profile assessment version.
- Strengthen the risk management information system, in particular the implementation of new core system, build data warehouse and reliable reporting/ monitoring system, in order to support the Company's performance improvements in conducting business activities, as well as strengthening the comprehensive risk monitoring process.

# PERKARA HUKUM

## Litigation

Sepanjang 2018, Perseroan terlibat dalam 34 perkara dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pelapor baik dalam Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Hubungan Industrial (perburuhan), serta Perpajakan, yang terdiri dari: 5 (lima) perkara Perdata, 1 (satu) perkara pidana, 28 perkara Hubungan Industrial dan 0 (nol) perkara Pajak.

Adapun perincian perkara hukum yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Throughout 2018, the Company involved in 34 cases in its position as the Plaintiff, Defendant, Appellant, Appellee, Whistleblowers in both Civil and Criminal Cases, Industrial Relations Case (labor), as well as Taxes, which consists of: 5 (five) Civil cases, 1 (one) criminal case, 28 Industrial Relations cases and 0 (zero) Tax case.

The following are the details of the Company's legal cases during 2018:

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
1.	Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2018/PN.KAG di Pengadilan Negeri Kayu Agung Penggugat: Non Customer Tergugat: Perseroan  Civil Case No. 12/Pdt.G/2018/PN.KAG at the Kayu Agung District Court Plaintiff: Non Customer Defendant: The Company	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung  The hearing process at the Kayu Agung District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
2.	Perkara Perdata No. 571/Pdt.G/2018/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang Penggugat: Nasabah Tergugat: Perseroan  Civil Case No. 571/Pdt.G/2018/PN.TNG at the Tangerang District Court Plaintiff: Customer Defendant: The Company	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang  The hearing process at the Tangerang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
3.	Perkara Perdata No. 225/Pdt.G/2018/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta Penggugat: Nasabah Tergugat: Perseroan  Civil Case No. 225/Pdt.G/2018/PN.Skt at the Surakarta District Court Plaintiff: Customer Defendant: The Company	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta  The hearing process at the Surakarta District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
4.	Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2018/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Bojonegoro Penggugat: Nasabah Tergugat: Perseroan  Civil Case No. 21/Pdt.G/2018/PN.Rbg at the Bojonegoro District Court Plaintiff: Customer Defendant: The Company	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro  The hearing process at the Bojonegoro District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition



Perkara Hukum  
Litigation

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
5.	Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2018/PN.SKB di Pengadilan Negeri Sukabumi Penggugat: Nasabah Tergugat: Perseroan  Civil Case No. 25/Pdt.G/2018/PN.SKB at the Sukabumi District Court Plaintiff: Customer Defendant: The Company	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi  The hearing process at the Sukabumi District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
6.	Perkara Pidana No. 916/Pid.B/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember Tersangka: Karyawan  Criminal Case No. 916/Pid.B/2018/PN Jmr at the Jember District Court Suspect: Employee	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jember  The hearing process at the Jember District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
7.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung  Re-Examination process at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
8.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 78/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 5778/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung  Re-Examination process at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
9.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 83/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 83/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Kasasi di Mahkamah Agung  Cassation appeal at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
10.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 53/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 53/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg at the Industrial Relations Court of Semarang District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung  Re-Examination process at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition

Perkara Hukum  
Litigation

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
11.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 366/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 366/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn at the Industrial Relations Court of Medan District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Cassation appeal at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
12.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 96/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 96/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Cassation appeal at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
13.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 95/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 95/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Re-Examination process at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
14.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 03/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 03/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Re-Examination process at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
15.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 248/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 248/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Re-Examination process at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
16.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 372/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 372/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst at the Industrial Relations Court of Central Jakarta District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Cassation appeal at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition

Perkara Hukum  
Litigation

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
17.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 50/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 50/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Kasasi di Mahkamah Agung  Cassation appeal at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
18.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Kasasi di Mahkamah Agung  Cassation appeal at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
19.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 68/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 68/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Kasasi di Mahkamah Agung  Cassation appeal at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
20.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 63/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 63/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Kasasi di Mahkamah Agung  Cassation appeal at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
21.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tpg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tpg at the Industrial Relations Court of Tanjung Pinang District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Kasasi di Mahkamah Agung  Cassation appeal at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
22.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 49/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 49/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby at the Industrial Relations Court of Surabaya District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses Kasasi di Mahkamah Agung  Cassation appeal at the Court of Justice	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition

Perkara Hukum  
Litigation

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
23.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 39/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 39/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Cassation appeal at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
24.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 205/Pdt. Sus-PHI/2016/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 205/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Re-Examination process at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
25.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Cassation appeal at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
26.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 177/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 177/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn at the Industrial Relations Court of Medan District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Cassation appeal at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
27.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr Di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr at the Industrial Relations Court of Pekanbaru District Court	Re-examination process at the Court of Justice	No material impact on the Company's financial condition
28.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 109/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.SBY di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan	Proses PHI di Pengadilan Negeri Surabaya	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
	Employment Termination Dispute No. 109/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.SBY at the Industrial Relations Court of Surabaya District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	At the Industrial Relations Court Process of Surabaya District Court	No material impact on the Company's financial condition

Perkara Hukum  
Litigation

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
29.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 240/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 240/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn at the Industrial Relations Court of Medan District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses PHI di Pengadilan Negeri Medan  At the Industrial Relations Court Process of Medan District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
30.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 128/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.SBY di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 128/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.SBY at the Industrial Relations Court of Surabaya District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses PHI di Pengadilan Negeri Surabaya  At the Industrial Relations Court Process of Surabaya District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
31.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg at the Industrial Relations Court of Semarang District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses PHI di Pengadilan Negeri Semarang  At the Industrial Relations Court Process of Semarang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
32.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 242/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 242/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG at the Industrial Relations Court of Bandung District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses PHI di Pengadilan Negeri Bandung  At the Industrial Relations Court Process of Bandung District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
33.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 286/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 286/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn at the Industrial Relations Court of Medan District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses PHI di Pengadilan Negeri Medan  At the Industrial Relations Court Process of Medan District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition
34.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). No. 285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Penggugat: Karyawan Tergugat: Perseroan  Employment Termination Dispute No. 285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn at the Industrial Relations Court of Medan District Court Plaintiff: Employee Defendant: The Company	Proses PHI di Pengadilan Negeri Medan  At the Industrial Relations Court Process of Medan District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan.  No material impact on the Company's financial condition

# SANKSI ADMINISTRATIF

## Administrative Sanctions

Selama tahun 2018 tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan karena kelalaian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

There were no administrative sanctions during 2018, which are materials from the relevant regulators that may influence the Company's business continuity, or administrative sanctions rendered to members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners due to the negligence of members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

# AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

## Information Access and Company Data

P.  
269

Informasi mengenai produk dan layanan, kegiatan, aksi korporasi, dan lain-lain disajikan melalui website Perseroan, yaitu <http://www.wom.co.id>. Pelanggan juga bisa mendapatkan informasi yang terperinci dengan menghubungi call center Perseroan dengan nomor akses +628041123888 atau menghubungi kantor layanan terdekat.

The information on products and services, events, corporate actions and others is also presented in the Company's website, <http://www.wom.co.id>. The customers can also obtain detailed information by contacting the Company's call center at +628041123888 or by contacting the Company's nearest service offices.

Tidak hanya bagi pelanggan, kemudahan akses informasi juga diberikan kepada investor dan calon investor, yaitu dengan menghubungi Investor Relations Perseroan melalui alamat surat elektronik [corporate\\_secretary@wom.co.id](mailto:corporate_secretary@wom.co.id).

Furthermore, investors and potential investors can also contact the Company's Investor Relations via email [corporate\\_secretary@wom.co.id](mailto:corporate_secretary@wom.co.id) to access information.

Selain itu, Perseroan juga melakukan keterbukaan informasi terkait fakta material atau hal-hal lain telah ditentukan oleh peraturan terkait melalui surat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia. Keterbukaan Informasi kemudian juga dapat diakses oleh public melalui [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id).

Moreover, the Company also discloses information related to the material facts or other matters specified by the relevant regulations through a correspondence with OJK and the Indonesia Stock Exchange. The disclosure of Information can also be accessed by the public through [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id).

Sebagai bagian dari penyediaan Informasi bagi stakeholder, pada tahun 2018, perseroan telah mengeluarkan siaran pers, antara lain:

As part of its actions in providing information for the stakeholders, the Company had issued the following press releases in 2018:





## Akses Informasi dan Data Perusahaan

### Information Access and Company Data

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Releases Subjects
1	05 Januari 2018 January 05, 2018	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Salurkan Bantuan Kepada Korban Banjir (Gunung Kidul) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Grants Assistance to Flood Victims (Gunung Kidul)
2	02 Februari 2018 February 02, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Gowa) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Gowa)
3	15 Februari 2018 February 15, 2018	Kinerja Tahun Buku 2017 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Performance Fiscal Year 2017
4	22 Februari 2018 February 22, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Pangkal Pinang) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Pangkal Pinang)
5	06 Maret 2018 March 06, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Tigaraksa) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Tigaraksa)
6	15 Maret 2018 March 15, 2018	WOM Finance Selenggarakan RUPST & LB Serta Public Expose "Laba bersih perusahaan melonjak hingga 384% atau menjadi Rp60.3 miliar" WOM Finance Convenes the AGMS & EGMS and Public Expose "The company net profit significantly increased by 384% to Rp60,3 billion"
7	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Catatkan Rekor MURI untuk CSR HUT ke-36 (HO, Daan Mogot Kemayoran dan Rawamangun) WOM Finance Posted a MURI Record for CSR at the 36 <sup>th</sup> Anniversary (HO, Daan Mogot Kemayoran and Rawamangun)
8	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Ciputat) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Ciputat)
9	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Ciledug) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Ciledug)
10	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Mauk) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Mauk)
11	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Tangerang) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Tangerang)
12	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Bekasi) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Bekasi)
13	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Bandung) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Bandung)
14	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Brebes) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Brebes)
15	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Pekalongan) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Pekalongan)
16	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Semarang) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Semarang)
17	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Tegal) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Tegal)
18	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Purwokerto) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Purwokerto)
19	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Solo) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Solo)
20	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Yogyakarta) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Yogyakarta)
21	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Madiun) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Madiun)
22	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Malang) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Malang)
23	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Surabaya Timur) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (East Surabaya)

Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Releases Subjects
24	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Medan) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Medan)
25	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Palembang) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Palembang)
26	24 Maret 2018 March 24, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Pendidikan dan Lingkungan (Makassar) WOM Finance Organizes CSR Education and Environment (Makassar)
27	11 April 2018 April 11, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Kapos A+ Bontang) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Ops A+ Bontang)
28	11 April 2018 April 11, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Kapos B Cililin) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Ops B Cililin)
29	13 April 2018 April 13, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Kapos A+ Balikpapan) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Ops A+ Balikpapan)
30	18 April 2018 April 18, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Kapos A+ Berau) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Ops A+ Berau)
31	20 April 2018 April 20, 2018	WOM Finance Selenggarakan Seminar Literasi Edukasi Keuangan di Universitas Widyatama Bandung WOM Finance Organizes The Financial Education Literacy Seminar at the University of Widyatama Bandung
32	03 Mei 2018 May 03, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Kapos B Maros) Inauguration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Ops B Maros)
33	14 Mei 2018 May 14, 2018	WOM Finance Selenggarakan Seminar Literasi Edukasi Keuangan di STIE Yogyakarta WOM Finance Organizes The Financial Education Literacy Seminar at the STIE Yogyakarta
34	18 Mei 2018 May 18, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Palu) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Palu)
35	19 Mei 2018 May 19, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Makassar) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Makassar)
36	21 Mei 2018 May 21, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Malang) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Malang)
37	22 Mei 2018 May 22, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Sidoarjo) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Sidoarjo)
38	23 Mei 2018 May 23, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Magelang) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Magelang)
39	25 Mei 2018 May 25, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Semarang) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Semarang)
40	25 Mei 2018 May 25, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Bandung) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Bandung)
41	26 Mei 2018 May 26, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Sukabumi) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Sukabumi)
42	02 Juni 2018 June 02, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Cikupa) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Cikupa)
43	04 Juni 2018 June 04, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Palembang) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Palembang)
44	05 Juni 2018 June 05, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Rawamangun) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Rawamangun)
45	05 Juni 2018 June 05, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Bengkulu) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Bengkulu)
46	06 Juni 2018 June 06, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Pekanbaru) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Pekanbaru)
47	08 Juni 2018 June 08, 2018	WOM Finance Selenggarakan CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Medan) WOM Finance Organizes CSR Ramadhan 1439 Hijriah (Medan)



## Akses Informasi dan Data Perusahaan

### Information Access and Company Data

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Releases Subjects
48	01 Agustus 2018 August 01, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Cabang Medan 2) Inaugration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Medan 2 Branch)
49	10 Agustus 2018 August 10, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Kapos Jelambar) Inaugration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Ops Jelambar)
50	14 Agustus 2018 August 14, 2018	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Selenggarakan Seminar Dinamika Eksekusi Jaminan Fidusia WOM Finance Organizes The Fiduciary Guarantee Execution Dynamics Seminar
51	21 Agustus 2018 August 21, 2018	WOM Finance Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Lombok WOM Finance Grants Assistance for Lombok Earthquake Victims
52	25 Agustus 2018 August 25, 2018	Fokus Bidang Pendidikan, WOM Finance Renovasi Perpustakaan dan Taman Baca Focusing on Education, WOM Finance Renovates the Library and Reading Park
53	06 September 2018 September 06, 2018	WOM Finance Catatkan Laba Bersih Rp106 miliar Pada Semester Pertama 2018 WOM Finance Posted Net Profit of Rp106 billion at the first half of 2018
54	07 September 2018 September 07, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Cabang Bulukumba) Inaugration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Bulukumba Branch)
55	07 September 2018 September 07, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Cabang Baganbatu) Inaugration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Baganbatu Branch)
56	14 September 2018 September 14, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Cabang Banjarbaru) Inaugration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Banjarbaru Branch)
57	14 September 2018 September 14, 2018	WOM Finance Selenggarakan Seminar Literasi Edukasi Keuangan di Universitas Atmajaya Jakarta WOM Finance Organizes The Financial Education Literacy Seminar at the University of Atmajaya Jakarta
58	25 September 2018 September 25, 2018	WOM Finance Selenggarakan Seminar Literasi Edukasi Keuangan di Universitas Hasanuddin Makassar WOM Finance Organizes The Financial Education Literacy Seminar at the University of Hasanuddin Makassar
59	05 Oktober 2018 October 05, 2018	WOM Finance Selenggarakan Inklusi Keuangan WOM Finance Organizes the Financial Inclusion
60	09 Oktober 2018 October 09, 2018	WOM Finance Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi & Tsunami Palu WOM Finance Grants Assistance for Palu Earthquake & Tsunami Victims
61	26 Oktober 2018 October 26, 2018	Dugaan Tindak Pidana Fidusia Oleh Kosumen WOM Finance Cabang Malang Allegation of Fiduciary Criminal Acts by the Consumer of WOM Finance Malang Branch
62	27 Oktober 2018 October 27, 2018	Dorong Inklusi Keuangan WOM Finance Ramaikan Multifinance Day 2018 Supporting Financial Inclusion, WOM Finance Celebrates the Multifinance Day 2018
63	08 November 2018 November 08, 2018	Peresmian Kantor Jaringan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Kapos B Gunung Putri) Inaugration of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Network Office (Ops B Gunung Putri)
64	21 November 2018 November 21, 2018	Public Expose WOM Finance November 2018
65	26 November 2018 November 26, 2018	WOM Finance Selenggarakan Seminar Literasi Edukasi Keuangan di Universitas Sriwijaya Palembang WOM Finance Organizes The Financial Education Literacy Seminar at the University of Sriwijaya Palembang
66	28 November 2018 November 28, 2018	WOM Finance Selenggarakan Seminar Literasi Edukasi Keuangan di Universitas Sumatera Utara Medan WOM Finance Organizes The Financial Education Literacy Seminar at the University of Sumatera Utara Medan
67	07 Desember 2018 December 07, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Tebing) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Tebing)
68	12 Desember 2018 December 12, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Palembang) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Palembang)
69	12 Desember 2018 December 12, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Cikarang) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Cikarang)

Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Releases Subjects
70	13 Desember 2018 December 13, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Leuwiliang) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Leuwiliang)
71	14 Desember 2018 December 14, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Mojokerto) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Mojokerto)
72	14 Desember 2018 December 14, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Bontang) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Bontang)
73	15 Desember 2018 December 15, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Sukabumi) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Sukabumi)
74	15 Desember 2018 December 15, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Medan 2) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Medan 2)
75	15 Desember 2018 December 15, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Pangkal Pinang) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Pangkal Pinang)
76	17 Desember 2018 December 17, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Yogyakarta) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Yogyakarta)
77	17 Desember 2018 December 17, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Kediri) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Kediri)
78	18 Desember 2018 December 18, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Depok) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Depok)
79	18 Desember 2018 December 18, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Purwokerto) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Purwokerto)
80	21 Desember 2018 December 21, 2018	Berbagi Kasih, WOM Finance Natalan Bersama di Panti Asuhan (Palopo) Sharing Love, WOM Finance Celebrates Christmas at the Orphanage (Palopo)
81	28 Desember 2018 December 28, 2018	WOM Finance Bersama 7 Lembaga Keuangan Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil-Kemendagri WOM Finance and 7 Financial Institutions Sign the Cooperation Agreement for the Population Data Utilization with Dukcapil-Ministry of Home Affairs

Selama tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta otoritas terkait lainnya, antara lain:

Throughout 2018, the Company has published the correspondence with the Financial Services Authority and Bursa Efek Indonesia as well as other relevant regulators, as follows:

#### Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Financial Services Authority

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
1	002/I/CS/2018	10 Januari 2018 January 10, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III dan IV Obligasi WOM Finance Tahun 2015 Proceeds Usage Realization Report of Shelf Bonds Public Offering I Phase III and IV WOM Finance 2015
2	003/I/CS/2018	10 Januari 2018 January 10, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, II, III Obligasi WOM Finance Tahun 2016 dan 2017 Proceeds Usage Realization Report of Shelf Bonds Public Offering II Phase I, II, III WOM Finance 2016 and 2017
3	004/I/CS/2018	10 Januari 2018 January 10, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penawaran Umum Terbatas ("PUT I") kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") Proceeds Usage Realization Report of Rights Issue I to the Company Shareholders for the Issuance of Preemptive Securities.

Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Financial Services Authority

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
4	007/I/CS/2018	29 Januari 2018 January 29, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Rencana Tahunan Pendidikan Dan Pelatihan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun Anggaran 2018 Submission of Education and Trainings Annual Plan Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Budgeting Year 2018
5	008/I/CS/2018	29 Januari 2018 January 29, 2018	OJK	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Notification of the General Meeting of Shareholders Convention Plan of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
6	009/I/CS/2018	29 Januari 2018 January 29, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the Annual Bisnis Plan Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
7	010/II/CS/2018	06 Januari 2018 January 06, 2018	OJK	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Notification of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders Convention of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
8	011/II/CS/2018	06 Januari 2018 January 06, 2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Notification Ads Proof Submission of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders Convention of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
9	017/II/CS/2018	19 Februari 2018 February 19, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2017 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ( <i>Audited</i> ) Submission of the Annual Financial Statements Period of 31 December 2017 ( <i>Audited</i> ) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
10	018/II/CS/2018	20 Februari 2018 February 20, 2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan di Media untuk Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2017 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ( <i>Audited</i> ) Media Ads Proof Submission of the Annual Financial Statements Period of 31 December 2017 ( <i>Audited</i> ) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
11	019/II/CS/2018	21 Februari 2018 February 21, 2018	OJK	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Invitation of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders Convention of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
12	020/II/CS/2018	21 Februari 2018 February 21, 2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan "Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Ads Proof Submission of the Invitation of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders Convention of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
13	021/II/CS/2018	21 Februari 2018 February 21, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun Buku 2017 Submission of the Annual Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Fiscal Year 2017
14	023/II/CS/2018	28 Februari 2018 February 28, 2018	OJK	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan Annual Public Expose Convention Plan
15	024/II/CS/2018	28 Februari 2018 February 28, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
16	052/III/CS/2018	28 Februari 2018 February 28, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
17	060/III/CS/2018	06 Maret 2018 March 06, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PUB II Tahap IV Information Disclosure or Material Facts Report on Rights Issue II Phase IV

Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Financial Services Authority

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
18	063/III/CS/2018	09 Maret 2018 March 09, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap III Obligasi WOM Finance Tahun 2017 Proceeds Usage Realization Report of Shelf Bonds Public Offering II Phase III WOM Finance 2017
19	066/III/CS/2018	19 Maret 2018 March 19, 2018	OJK	Laporan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk The Annual & Extraordinary GMS Convention and Resolutions Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
20	067/III/CS/2018	19 Maret 2018 March 19, 2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan "Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Ads Proof Submission of the Annual & Extraordinary GMS Resolutions of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
21	068/III/CS/2018	19 Maret 2018 March 19, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
22	070/III/CS/2018	19 Maret 2018 March 19, 2018	OJK	Jadwal Dividen Dividend Schedules
23	071/III/CS/2018	21 Maret 2018 March 21, 2018	OJK	Laporan Pelaksanaan <i>Public Expose</i> Tahunan WOM Finance The Annual Public Expose Convention Report of WOM Finance
24	0586/III/DIR- WOM/2018	21 Maret 2018 March 21, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Tanggal 21 Maret 2018 Information Disclosure or Material Facts Report Dated 21 March 2018
25	074/IV/CS/2018	02 April 2018 April 02, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
26	0647/IV/DIR- WOM/2018	02 April 2018 April 02, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
27	0661/IV/DIR- WOM/2018	03 April 2018 April 03, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
28	0662/IV/DIR- WOM/2018	03 April 2018 April 03, 2018	OJK	Laporan Perubahan Alamat, Telepon dan Fax Kantor Pusat Report on the Change of Address, Telephone and Fax of Head Office
29	0685/IV/DIR- WOM/2018	04 April 2018 April 04, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
30	075/IV/CS/2018	13 April 2018 April 13, 2018	OJK	Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the Meeting Minutes and its Summary of the Annual & Extraordinary GMS Resolutions of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
31	095/IV/CS/2018	27 April 2018 April 27, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I periode 31 Maret 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ( <i>Unaudited</i> ) Submission of the 1 <sup>st</sup> Quarter Financial Statements period of 31 March 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
32	104/V/CS/2018	21 Mei 2018 May 21, 2018	OJK	Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Additional Information on the Shelf Bonds Public Offering II WOM Finance Phase V 2018
33	105/V/CS/2018	31 Mei 2018 May 31, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi dan Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report



Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Financial Services Authority

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
34	1084/VI/DIR-WOM/2018	07 Juni 2018 June 07, 2018	OJK	Perbaikan Atas Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Correction on Information of the Shelf Bonds Public Offering II WOM Finance Phase V 2018
35	1105/VI/DIR-WOM/2018	08 Juni 2018 June 08, 2018	OJK	Penelaahan atas Laporan Keuangan Tahunan 2017 PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Review on the 2017 Annual Financial Statemetns of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
36	107/VI/CS/2018	26 Juni 2018 June 26, 2018	OJK	Penghimpunan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wom Finance Tahap I Sampai Dengan Tahap V Proceeds Acquisition of the Shelf Bonds Public Offering II WOM Finance Phase I up to Phase V
37	108/VI/CS/2018	26 Juni 2018 June 26, 2018	OJK	Penghimpunan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wom Finance Tahap I Sampai Dengan Tahap V Proceeds Acquisition of the Shelf Bonds Public Offering II WOM Finance Phase I up to Phase V
38	109/VI/CS/2018	29 Juni 2018 June 29, 2018	OJK	Persiapan Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 71 (PSAK 71) – Instrumen Keuangan Preparation of Financial Accounting Standard Statements Implementation No. 71 (PSAK 71) – Financial Instrument
39	113/VII/CS/2018	11 Juni 2018 June 11, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penawaran Umum Terbatas ("PUT I") kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") Proceeds Usage Realization Report of Rights Issue I to the Company Shareholders for the Issuance of Preemptive Securities.
40	114/VII/CS/2018	11 Juni 2018 June 11, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap IV Obligasi Wom Finance Tahun 2015 Proceeds Usage Realization Report of Shelf Bonds Public Offering I Phase IV of WOM Finance 2015
41	115/VII/CS/2018	11 Juni 2018 June 11, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, II, III, IV, V Obligasi Wom Finance Tahun 2016, 2017, 2018 Proceeds Usage Realization Report of Shelf Bonds Public Offering II Phase I, II, III, IV, V of WOM Finance 2016, 2017, 2018
42	116/VII/CS/2018	30 Juli 2018 July 30, 2018	OJK	Kewajiban Penyampaian Informasi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2018 yang akan diaudit oleh Akuntan Publik Mandatory Disclosure of Interim Financial Statements as of 30 June 2018 that has been audited by the Public Accountant
43	117/VIII/CS/2018	07 Agustus 2018 August 07, 2018	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap V Obligasi WOM Finance Tahun 2018 Proceeds Usage Realization Report of Shelf Bonds Public Offering II Phase V of WOM Finance 2018
44	118/VIII/CS/2018	09 Agustus 2018 August 09, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juli 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of July 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
45	120/VIII/CS/2018	31 Agustus 2018 August 31, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Periode 30 Juni 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited) Submission of Mid Year Financial Statements Period of 30 June 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
46	122/VIII/CS/2018	31 Agustus 2018 August 31, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report

Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Financial Services Authority

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
47	124/IX/CS/2018	31 Agustus 2018 August 31, 2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan di Media untuk Laporan Keuangan Tengah Tahunan Periode 30 Juni 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited) Media Ads Proof Submission of Mid Year Financial Statements Period of 30 June 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited)
48	126/IX/CS/2018	03 Sepeptember 2018 September 03, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
49	127/IX/CS/2018	03 Sepeptember 2018 September 03, 2018	OJK	Penggantian Kepala Unit Audit Internal PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Change of Internal Audit Unit Head of PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk
50	131/X/CS/2018	01 Oktober 2018 October 01, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Bencana Alam Palu Information Disclosure or Material Facts Report of Palu Earthquake
51	137/X/CS/2018	08 Oktober 2018 October 08, 2018	OJK	Surat Laporan Pindah Alamat KSKC WOM Finance di Purworejo Report of Relocation Address KSKC WOM Finance Purworejo
52	1779/X/DIR-WOM/2018	16 Oktober 2018 October 16, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
53	1785/X/DIR-WOM/2018	17 Oktober 2018 October 17, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report
54	141/X/CS/2018	29 Oktober 2018 October 29, 2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III periode 30 September 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unaudited) Submission of 3 <sup>rd</sup> Quarter Financial Statements as of 30 September 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unaudited)
55	142/X/CS/2018	30 Oktober 2018 October 30, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi Penjualan Saham Information Disclosure on Shares Selling Information
56	144/XI/CS/2018	01 November 2018 November 01, 2018	OJK	Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Financial Inclusion Monthly Activity
57	149/XI/CS/2018	09 November 2018 November 09, 2018	OJK	Laporan Transaksi Afiliasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Affiliates Transaction Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
58	188/XI/CS/2018	14 November 2018 November 14, 2018	OJK	Permintaan Data Dewan Pengawas Syariah (DPS) Data Request on the Sharia Supervisory Board
59	192/XI/CS/2018	19 November 2018 November 19, 2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap Submission of Ads Proof of Brief Prospectus of Shelf Bonds Public Offering II WOM Finance Phase I 2016 with Fixed Interest Rate
60	2001/XII/DIR-WOM/2018	03 Desember 2018 December 03, 2018	OJK	Tanggapan atas Kewajiban Penyampaian Pemenuhan Ekuitas untuk Unit Usaha Syariah (UUS) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Respond on the Obligatory Submission of Equity Fulfillment for Sharia Business Unit of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
61	2043/XII/DIR-WOM/2018	10 Desember 2018 December 10, 2018	OJK	Tanggapan atas Perlakuan Khusus Terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan yang Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah Respond on Special Treatment for the Customers and Financial Services Industry Impacted by the Disasters in Central Sulawesi Province
62	199/XII/CS/2018	14 Desember 2018 December 14, 2018	OJK	Keterbukaan Informasi Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Seri A Tahun 2017 Information Disclosure on the Payment Completion of Shelf Bonds II WOM Finance Phase III Series A 2017

Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Financial Services Authority

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
63	2093/XII/DIR-WOM/2018	17 Desember 2018 December 17, 2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Atas Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 Ads Proof Submission on the Notification of Additional Information and/or Correction for the Brief Prospectus of Shelf Bonds Public Offering III WOM Finance Phase I 2018
64	2124/XII/DIR-WOM/2018	19 Desember 2018 December 19, 2018	OJK	Keterbukaan Informasi Pemberitahuan Atas Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 Information Disclosure on the Notification of Additional Information and/or Correction for the Brief Prospectus of Shelf Bonds Public Offering III WOM Finance Phase I 2018
65	2141/XII/DIR-WOM/2018	20 Desember 2018 December 20, 2018	OJK	Keterbukaan Informasi Pemberitahuan Atas Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 Information Disclosure on the Notification of Additional Information and/or Correction for the Brief Prospectus of Shelf Bonds Public Offering III WOM Finance Phase I 2018
66	2152/XII/DIR-WOM/2018	21 Desember 2018 December 21, 2018	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi dan Fakta Material Information Disclosure or Material Facts Report

**Bursa Efek Indonesia (BEI)**

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
1	001/I/CS/2018	10 Januari 2018 January 10, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Desember 2017 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of December 2017 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
2	013/II/CS/2018	08 Februari 2018 February 08, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Januari 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of January 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
3	064/III/CS/2018	06 Maret 2018 March 06, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Februari 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of February 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
4	065/III/CS/2018	12 Maret 2018 March 12, 2018	Bursa	Penyampaian materi <i>Public Expose</i> Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the Annual Public Expose Material of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
5	0663/VI/DIR-WOM/2018	03 April 2018 April 03, 2018	Bursa	Laporan Perubahan Alamat, Telepon dan Fax Kantor Pusat Report of Change of Address, Telephon and Fax of Head Office
6	0723/VI/DIR-WOM/2018	06 April 2018 April 06, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Maret 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of March 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
7	096/IV/CS/2018	27 April 2018 April 27, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I periode 31 Maret 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ( <i>Unaudited</i> ) Submission of 1 <sup>st</sup> Quarter Financial Statements as of 31 March 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Information Access and Company Data

## Bursa Efek Indonesia (BEI)

No	Nomor Surat Letter No.	Tanggal Date	Kepada To	Perihal Subjects
8	101/V/CS/2018	09 Mei 2018 May 09, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per April 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of April 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
9	1098/VI/DIR- WOM/2018	08 Juni 2018 June 08, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Mei 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of May 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
10	111/VII/CS/2018	09 Juli 2018 July 09, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juni 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of June 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
11	128/IX/CS/2018	10 September 2018 September 10, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Agustus 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of August 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
12	136/X/CS/2018	09 Oktober 2018 October 09, 2018	BEI	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per September 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of September 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
13	1868/XI/DIR- WOM/2018	05 November 2018 November 05, 2018	Bursa	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> Tahunan The Annual Public Expose Convention Plan
14	150/XI/CS/2018	09 November 2018 November 09, 2018	Bursa	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Oktober 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of October 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
15	190/XI/CS/2018	15 November 2018 November 09, 2018	Bursa	Penyampaian materi <i>Public Expose</i> Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the Annual Public Expose Material of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
16	194/XI/CS/2018	23 November 2018 November 23, 2018	Bursa	Laporan Pelaksanaan <i>Public Expose</i> Tahunan The Annual Public Expose Convention Report
17	197/XII/CS/2018	10 Desember 2018 December 10, 2018	BEI	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per November 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Securities Holders Registration Monthly Report as of February 2018 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk



# KODE ETIK

## Code of Conduct

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika tertinggi dalam hal kejujuran, integritas dan profesional dalam berbisnis. Oleh karena itu, Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang disusun Perseroan memberikan pedoman standar perilaku minimum yang diharapkan untuk dipatuhi oleh segenap karyawan termasuk jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite-Komite Perseroan yang dibentuk.

### Pokok-Pokok Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Perseroan meliputi beberapa bagian, yaitu:

1. Nilai-nilai Dasar (*Core values*) yang berisi nilai-nilai budaya di Perseroan yang diharapkan dapat diterapkan menjadi etos kerja seluruh pihak yang bekerja di Perseroan.
2. Komitmen Atas Kode etik dan Pedoman Tingkah Laku, yang berisi pernyataan persetujuan dari seluruh pihak yang bekerja di Perseroan untuk berkomitmen atas Kode Etik dan pedoman Tingkah Laku Perseroan.
3. Standar-standar (norma-norma) tingkah laku dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang terdiri atas:
  - a. Tanggungjawab kepada Perseroan, yang memuat:
    - Standar Etika;
    - Kebijakan dan strategi perusahaan;
    - Bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
    - Bekerja dengan memberikan karya terbaik;
    - Menggunakan dan menjaga aset Perseroan;
    - Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme;
    - Penggunaan media sosial;
    - Kebijakan untuk pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).
  - b. Tanggungjawab di tempat kerja, yang memuat:
    - Praktik penggunaan tenaga kerja secara adil dan jujur;
    - Menjaga hubungan baik antar personil Perseroan;

In realizing its vision and mission, the Company committed to implement its business in accordance with the highest ethical standard in terms of honesty, integrity and professionalism in business. To that end, the Company's Code of Conduct provides minimum conduct guidelines that expected to be obeyed by all employees including the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and the Committees.

### Code of Conducts Key Points

The applicable Code of Conduct in the Company covers several parts, which are:

1. Core values containing the Company's corporate culture that expected to be implemented as work ethics of all the Company's employees.
2. Code of Conduct commitment, containing approval statements from all the Company's employees to render its commitment toward the Company's Code of Conduct.
3. Standards of behavior (norms) within the Code of Conduct, which consist of:
  - a. Responsibility to the Company, which covers:
    - Ethical Standard;
    - Company's policies and strategy;
    - Act in good faith, honest and professional;
    - Work with best performance;
    - Use and maintain the Company's assets
    - Refuse money laundering and terrorism funding;
    - Usage of social media;
    - Whistleblowing system policy
  - b. Responsibility at work place, which covers:
    - Fair and honest practices of manpower usage;
    - Maintain good relations between the Company's personnel;

Kode Etik  
Code of Conduct

- Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja;
  - Sopan santun berpakaian di lingkungan kerja Perseroan;
  - Pekerjaan di luar Perseroan atau kepentingan bisnis eksternal;
  - Budaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- c. Etika Mewakili Perseroan dan Berinteraksi Dengan Pihak Luar, yang memuat:
- Perlakuan yang adil;
  - Dasar kerjasama dengan pemasok (vendor);
  - Pernyataan kepada publik atau massa;
  - Hadiah dan hiburan;
  - Menjaga pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*).
- d. Kerahasiaan
- e. Investasi dan Kegiatan Luar, yang memuat:
- Perdagangan orang dalam (*insider trading*);
  - Mengelola benturan kepentingan.
- f. Kepatuhan
4. Pernyataan Komitmen Pribadi.
- Maintain occupational health and safety;
  - Decent way of clothing in the Company's work place;
  - External works or external business interests;
  - Corporate social responsibility culture.
- c. Ethics in Representing the Company and Interacting with External Parties, which covers:
- Fair treatment;
  - Cooperation base with vendors;
  - Public or mass statements;
  - Presents and entertainment;
  - Maintain the segregation of duties.
- d. Confidentiality
- e. Investment and External Activities, which covers:
- Insider trading;
  - Conflict of interests handling.
- f. Compliance
4. Personal Commitment Statement.

## Pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan berlaku untuk seluruh insan di Perseroan, yang mencakup atas:

- Segenap karyawan Perseroan;
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- Anggota Komite-Komite Perseroan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

## Penyebarnya Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Untuk memudahkan akses Personil Perseroan, buku Kode etik dan Pedoman Tingkah Laku juga dibuat dalam bentuk digital dan telah diunggah dan dapat diakses di sistem informasi berupa portal internal Perseroan.

## Code of Conduct Enforcements

The Company's Code of Conduct is applicable for all of the Company's employees, which covers:

- The Company's entire employees;
- Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board; and
- The Company's established Committees and accountable to the Company's Board of Directors or Board of Commissioners.

## Code of Conduct Disseminations

For the accessibility to the Company's employees, the Code of Conduct book is produced digitally and has been uploaded for access in information system in a form of the Company's internal portal.





Kode Etik  
Code of Conduct

## Sanksi dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Atas Personil Perseroan dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat mengakibatkan tindakan *indisipliner*, Perseroan akan mengeluarkan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi dalam ketentuan internal Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan dapat juga merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang dapat berisiko dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata atas Personil Perseroan dan/atau Perseroan.

## Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Beserta Sanksi yang Diberikan Pada Tahun 2018

Selama tahun 2018, Perseroan telah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dengan rekapitulasi pengenaan sanksi sebagai berikut:

No.	Jenis Sanksi Sanctions Types	Jumlah Sanksi yang diberikan Total Sanctions Rendered
1.	Surat Peringatan/ Warning Letters I	44
2.	Surat Peringatan/ Warning Letters II	19
3.	Surat Peringatan/ Warning Letters III	9

## Code of Conduct Sanctions

In the event that any employees of the Company are proven violated the Code of Conduct that may cause disciplinary actions, the Company shall impose the sanctions in accordance with the sanction levels stated in the Company's internal rules and/or prevailing regulatories.

The violations on the Company's Code of Conduct may also in a form of breaching of the legal rules that may risk of being subjected to criminal and civil sanctions on the Company's employees and/ or the Company.

## Total Violations of Code of Conduct and Sanctions during 2018

During 2018, the Company has settled the violations cases on Code of Conduct with the following sanctions recapitulation:

# BUDAYA KERJA PERUSAHAAN

Corporate Culture

Budaya kerja yang diterapkan pada perusahaan ialah nilai-nilai yang terdiri atas Teamwork, Integrity, Growth, Excellence, & Efficiency, serta Relationship building (TIGER). Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang diterapkan oleh seluruh perusahaan di bawah Maybank Group. Nilai-nilai TIGER dijabarkan sebagai berikut:

T:

Teamwork (Bekerjasama sebagai sebuah tim yang dilandasi rasa saling menghargai, percaya dan menghormati)

- Saling percaya dan saling menghargai
- Berkomunikasi secara terbuka
- Menjaga sinergi

I:

Integrity (Berperilaku jujur, menjaga etika dan profesionalisme)

- Berperilaku konsisten sesuai etika dan norma
- Melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan

G:

Growth (Berhasrat untuk terus menerus melakukan perbaikan dan inovasi serta pengembangan diri)

- Perbaikan dan pembelajaran terus menerus
- Inovasi (kreatif, berpikir jauh ke depan/visioner yang dapat memberikan nilai tambah)
- Proaktif
- Menunjukkan dorongan untuk berprestasi

E:

Excellent & Efficiency (Berkomitmen untuk menghasilkan kinerja terbaik, bekerja dengan cepat dan tepat dalam rangka memberikan layanan yang memuaskan)

- Berorientasi pada pelayanan
- Bekerja dengan cepat dan tepat
- Mengutamakan efisiensi

R:

Relationship Building (Berusaha untuk membangun dan memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan)

- Membangun jaringan yang luas
- Memelihara relasi
- Membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan para pemangku kepentingan

The corporate culture applied in the Company comprises values of Teamwork, Integrity, Growth, Excellence, Efficiency and Relationship Building (TIGER). These values are applied in all companies under the Maybank Group. TIGER is explained as follow:

T:

Teamwork (Working as a team based on tolerance, mutual trust and respect)

- Trust and respect each other
- Communicate openly
- Maintain the synergy

I:

Integrity (Being honest, keeping good ethics and professionalism)

- Behave in accordance with ethics and norms
- Conduct accountable actions

G:

Growth (Having desire to generate continuous improvement, innovation and self-development)

- Improve and learn continuously
- Innovate (being creative, forward-looking/visionary to create additional value)
- Proactive
- Demonstrate motivation to excel

E:

Excellent & Efficiency (Committed to generating the best performance, working fast and properly to give satisfying services)

- Service-oriented
- Work fast and properly
- Prioritize efficiency

R:

Relationship Building (Striving to build and maintain good and beneficial relationships)

- Build vast network
- Maintain relationship
- Build a good relationship with colleagues and the stakeholders



# SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

## Whistleblowing System

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum dan SE Internal No. 2016/PRES DIR tanggal 28 Maret 2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti *Fraud*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk memantau dan memitigasi risiko *fraud* melalui penerapan 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memantau dan mengendalikan *fraud* pada pilar deteksi, WOM Finance menyediakan kebijakan *whistleblowing system* sebagai sarana laporan pengaduan *fraud* dari seluruh karyawan Perseroan baik di cabang, *business unit* maupun kantor pusat, termasuk hasil temuan Internal Audit dan *Quality Assurance & Litigation* (QAL) serta dari pihak eksternal kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud*.

Whistleblowing System sebagai salah satu program Strategi Anti *Fraud* (SAF) yang bertujuan untuk:

1. Mendeteksi kejahatan *fraud* atau indikasi *fraud* melalui laporan pengaduan yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya, untuk selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh karyawan untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) karyawan menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan khususnya dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti *fraud* yang memadai.

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 13/28/DPNP dated 9 December 2011 regarding the Anti Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks and Internal Circular Letter No. 2016/PRES DIR dated 28 March 2016 regarding the Policy and Procedures of Anti Fraud Strategy Implementation, PT Bank Maybank Indonesia Tbk and Company has conducted monitoring and mitigation of fraud risk through the following 4 (four) pillars:

1. Prevention
2. Detection
3. Investigation, Reporting and Sanction
4. Monitoring, Evaluation and Follow Up

In the effort to monitoring and control the fraud at detection pillar, WOM Finance provides the whistleblowing system policy as a fraud reporting facility from the entire employees of Company at branches, business units and head office. Including finding results of Internal Audit and Quality Assurance & Litigation (QAL) as well as from external parties to the President Director, by emphasizing on whistleblowing disclosures to enhance the effectiveness of fraud control system implementation.

The Whistleblowing System as one of Anti Fraud Strategy programs, aims to:

1. Detect fraud crimes or fraud indications through whistleblowing report that can be submitted with clear identity, for further investigation process or follow up.
2. Bolster the awareness or engagement of all employees to participate and maintain their work units from any loss due to fraud thereby creating better oversight quality and higher sense of belonging within the employees.
3. Enhance the corporate reputation specifically in the context of Good Corporate Governance, which will improve the corporate image, resulted from the adequate anti fraud tools completeness.

Sistem Pelaporan Pelanggaran  
Whistleblowing System**Penyampaian Laporan Pelanggaran**

Perseroan menyediakan fasilitas penyampaian laporan pelanggaran baik yang masih berupa dugaan maupun telah terbukti terjadi melalui email Jendela ([jendela@wom.co.id](mailto:jendela@wom.co.id)). Laporan yang diterima akan diproses sesuai dengan kebijakan SOP dan peraturan lainnya yang berlaku di WOM Finance.

Indikasi *fraud* atau *fraud* dapat disampaikan oleh pelapor (*risk owner*) melalui mekanisme sebagai berikut:

1. *Risk owner* mengirimkan laporan ke email Jendela ([jendela@wom.co.id](mailto:jendela@wom.co.id)).
2. *Operational Risk Management (ORM)* akan menerima email Jendela kemudian melakukan analisis kelayakan *follow up risk event* dan mendiskusikan pembagian tanggung jawab *follow up risk event* ke Tim Jendela.
3. Jika hasil analisis kelayakan *follow up risk event*, laporan tidak memenuhi standar kelayakan, maka *risk owner* akan mendapatkan *feedback follow up risk event*.
4. Jika hasil analisis kelayakan *follow up risk event*, laporan memenuhi standar kelayakan maka Tim Jendela akan menentukan PIC Investigasi berdasarkan analisis *risk event*, kategori kasus dan nilai kerugian yang ditimbulkan.

**Whistleblowing Mechanism**

The Company provides the whistleblowing reporting mechanism for both under presumption or has been proven to occur through email facility Jendela ([jendela@wom.co.id](mailto:jendela@wom.co.id)). The incoming reportings will be processed according to the SOP policy and other prevailing regulations at WOM Finance.

Fraud Indications or fraud can be submitted by the risk owner through the following mechanisms:

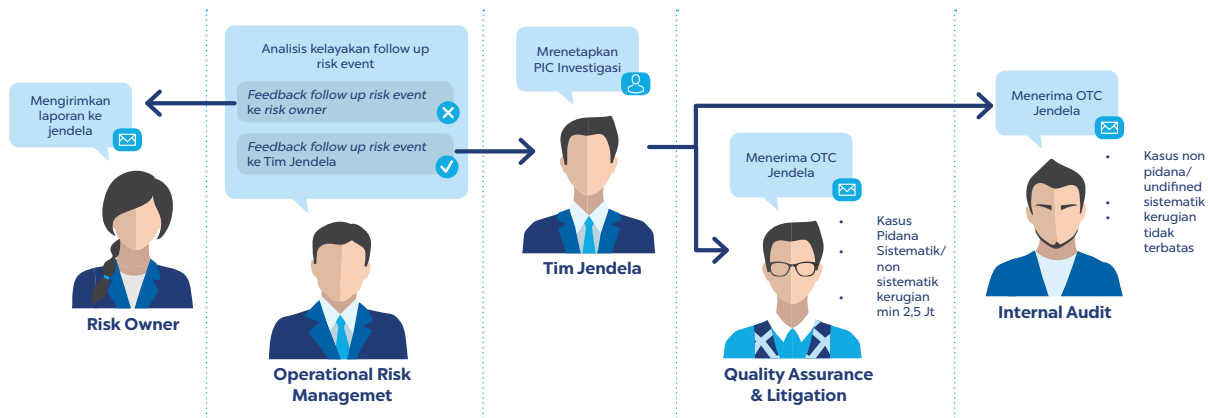
1. Risk owners submit the report to email Jendela ([jendela@wom.co.id](mailto:jendela@wom.co.id)).
2. The Operational Risk Management (ORM) will receive the email Jendela, then will analyse the qualification on the follow up risk event and to discuss the segregation of responsibilities for the follow up risk event to the Jendela Team.
3. If the qualification analysis result of the follow up risk event, in which the report does not meet the qualification standard, then the risk owner will receive the feedback of follow up risk event.
4. If the qualification analysis result of the follow up risk event, in which the report has met the qualification standard, then the Jendela Team will determine the Investigation PIC based on the risk event analysis, cases category and loss value that occurred.

No	PIC Investigasi Investigation PIC	Analisis Risk Event Risk Event Analysis	Kategori Kasus Cases Category	Nilai Kerugian Loss Value
1	Internal Audit	Sistematis Systematic	· Non pidana / Non criminal · Undefined	Tidak dibatasi / Unlimited
2	Quality Assurance & Litigation (QAL)	· Sistematis/ Systematic · Non Sistematis/ Non Systematic	Pidana Criminal	Sekurang-kurangnya Rp2.500.000 At least Rp2,500,000
a.	Sistematis Systematic	:	Insiden yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan atau ada keterlibatan lintas fungsi, minimal melibatkan satu karyawan level Head dan berulang tanpa bisa teridentifikasi oleh risk owner. Incidents by more than two persons and or involvement of cross-functions, at least involving one employee of Head level and repeating without being able to be identified by the risk owner.	
b.	Non Sistematis Non Systematic	:	Insiden yang dilakukan oleh paling banyak dua orang dalam satu unit kerja dimana pelaku berada pada level staf dan atau supervisor. Incidents by maximum of two persons in one unit where the suspect serves as staff and or supervisor levels.	
c.	Non Pidana Non Criminal	:	Kasus yang tidak berkaitan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara namun melanggar peraturan perusahaan, kode etik karyawan atau norma. Non-legal cases that have been determined by the State however considered breaching the company's regulations, code of conduct or norms.	
d.	Pidana Criminal	:	Kasus yang berkaitan dengan hukum yang ditetapkan Negara yang ditunjukkan dengan adanya bukti awal yang memadai. Legal cases that have been determined by the State that indicated through adequate initial proof.	



## Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

### Bagan Penyampaian Laporan Pelanggaran Whistleblowing Report Submission Diagram



### Perlindungan Bagi Whistleblower

Setiap pelapor akan diberikan jaminan perlindungan dari Perseroan sebagai berikut:

1. Email Jendela hanya bisa diakses oleh Direksi, Chief HC, QAL Division Head, Internal Audit Division Head dan Risk Management Division Head. Keterbatasan akses terhadap email ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi/ laporan berikut pelapornya.
2. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, email dan unit kerja), serta memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama atau sepanjang pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan atau dilaporkan.
3. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perseroan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan dan fakta penyimpangan.
4. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh Perseroan dalam proses terkait dengan pelaporan dan pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

### Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan yang berasal dari *whistleblower* yang masuk ke email Jendela ([jendela@wom.co.id](mailto:jendela@wom.co.id)) akan dilakukan Analisa oleh *Operations Risk Management Department* untuk menentukan pihak yang akan menangani pengaduan tersebut.

### Protection for Whistleblowers

Every whistleblowers (risk owners) will be given protection from Company, as follows:

1. Email Jendela can only be accessed by the BOD, Chief HC, QAL Division Head, Internal Audit Division Head and Risk Management Division Head. The access limitation of this email functioning to maintain confidentiality of information/ reports including the risk owners.
2. The Company guarantees the confidentiality of risk owners' identity (name, address, telephon number, email and work unit), as well as provides protection for the risk owners from any form of threats, intimidations, or unpleasant acts from any parties, to the extent or so long as the risk owners can maintain the confidentiality of the claimed or reported cases.
3. This protection shall also apply to the officers appointed by the Company in doing the investigations, verifications or parties that provides relevant information on the whistleblowing and violations facts.
4. The parties obtained authorities by the Company in the process related to reporting and whistleblowing, which violates the principle of confidentiality, will be given sanctions in accordance with the prevailing rules and regulations in the Company.

### Complaint Handling

1. The complaints from the whistleblowers received by email Jendela ([jendela@wom.co.id](mailto:jendela@wom.co.id)) will be analyzed by the Operations Risk Management Department to determine the party that will handle such complaints.

## Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

- Laporan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti akan ditransfer kasusnya secara resmi atau *Officially Transferred Case* (OTC) melalui email ke Internal Audit atau QAL sesuai dengan kategori kasusnya.
- Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh tim Internal Audit atau QAL, meliputi proses investigasi *root cause*, penyusunan kronologis insiden, *action plan*, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku (baik sanksi perusahaan maupun sanksi hukum).
- The complaint reports that require a follow up will be officially transferred the case (OTC) through email to the Internal Audit or QAL in accordance with its cases category.
- The complaints will be followed up by Internal Audit or QAL team, covering the process of root cause investigation, incident chronology development, action plan, up to sanctions to the suspect (both company's sanctions or legal sanctions).

### Pihak yang Mengelola Pengaduan

- Divisi Risk Management merupakan unit kerja yang mengelola seluruh laporan pengaduan dari pelapor (*risk owner*).
- Divisi Internal Audit merupakan unit kerja yang mengelola laporan pengaduan yang diterima dari Risk Management (sudah di-OTC dan merupakan kasus non-pidana atau *undefined*). Jika diperlukan, Internal Audit akan melakukan investigasi lebih lanjut pada laporan yang diterima.
- Divisi Quality Assurance and Litigation (QAL) merupakan unit kerja yang mengelola laporan pengaduan yang diterima dari Risk Management (sudah di-OTC dan merupakan kasus pidana). Jika diperlukan, QAL akan melakukan investigasi lebih lanjut pada laporan yang diterima.

### Complaint Management

- The Risk Management Unit is a work unit managing all whistleblowing reports from the risk owners.
- The Internal Audit Unit is a work unit managing the incoming whistleblowing reports from the Risk Management (already OTC and a non-criminal cases or undefined). If required, the Internal Audit will investigate the incoming reports further.
- The Quality Assurance and Litigation (QAL) Division is a work unit managing the incoming whistleblowing reports from the Risk Management (already OTC and a criminal cases). If required, the QAL will investigate the incoming reports further.

P.  
287

### Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses Pada Tahun 2018

Wilayah Region	Jumlah Kasus Total Cases	Kerugian Aktual Actual Loss	Potensi Kerugian Potential Loss
REGIONAL 01 Jakarta, Tangerang, Serang	3	97,595,000	-
REGIONAL 03 Jawa Barat / West Java	16	28,937,489	14,783,000
REGIONAL 05 Jawa Tengah / Central Java	8	112,972,676	17,817,362
REGIONAL 07 Sumatera Bagian Utara / Northern Sumatera	8	18,852,451	42,828,819
REGIONAL 08 Sumatera Bagian Selatan / Southern Sumatera	14	16,696,313	281,009,085
REGIONAL 09 Kalimantan & Sulawesi	9	298,985,306	67,380,815
REGIONAL 06 Regional Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara / East Java, Bali & Nusa Tenggara Regions	13	69,068,536	18,223,000
Kantor Pusat / Head Office	1	-	-
<b>Grand Total</b>	<b>72</b>	<b>643,107,771</b>	<b>442,042,081</b>

### Total Complaints Received and Processed in 2018





## Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

### Berdasarkan Status Kasus

Based on Cases Status

Tipe Kasus Cases Types	Status Kasus Cases Status	Total
Litigasi Litigation	Belum Lapor / Not Yet Reported	6
	Proses Lapor Polisi / Police Report Process	3
	Proses Pemeriksaan Saksi Internal / Internal Witness Investigation Process	5
	Proses Pemeriksaan Saksi Eksternal / External Witness Investigation Process	13
	Proses Pemeriksaan Saksi Terlapor / Reported Witness Investigation Process	7
	Proses Penangkapan Tersangka / Suspect Arresting Process	2
	Penahanan Tersangka / Suspect Detention	4
	Proses P21 (Kejaksaan) / P21 Process (Attorney)	1
	Proses Sidang / Court Process	1
	Vonis / Verdict	8
	DPO	5
	Case Closed (Litigation)	4
	Total Litigasi Total Litigation	
Non Litigasi Non Litigation	Case Closed (Non Litigation)	5
	-	8
Grand Total		72

### Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Pada Tahun 2018

Kasus yang masuk ranah pengadilan dan telah selesai diproses.

### Sanctions/ Follow Up on Completed Process of Complaints in 2018

The cases that further entered into court process and have been completed.

Kejadian/Incident Name	Fungsi/Function	Status Kasus/ Cases Status	Total
Lapping Unit	Collection	Proses P21 (Kejaksaan) / P21 Process (Attorney)	1
Lapping Installment	Collection	Proses Sidang / Court Process	1
Fraud Apps	Collection	Vonis / Verdict	1
Lapping Installment	Collection	Vonis / Verdict	4
	Remedial	Vonis / Verdict	1
Lapping Unit	Collection	Vonis / Verdict	1
Thievery	Operations	Vonis / Verdict	1
Lapping Cash	Operations	Case Closed (Litigation)	1
Lapping Installment	Collection	Case Closed (Litigation)	1
	Marketing NDS Car	Case Closed (Litigation)	1
Lapping Unit	Marketing NB Honda	Case Closed (Litigation)	1

Sistem Pelaporan Pelanggaran  
Whistleblowing System

Kejadian/Incident Name	Fungsi/Function	Status Kasus/ Cases Status	Total
Lapping Installment	Collection	Case Closed (Non Litigation)	2
	Marketing NB Yamaha	Case Closed (Non Litigation)	1
Lapping Unit	Marketing NB Honda	Case Closed (Non Litigation)	1
Other Fraud	Collection	Case Closed (Non Litigation)	1
<b>Grand Total</b>			<b>19</b>



# KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Policy of Diversity of The Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan didasarkan pada berbagai latar belakang yang berbeda, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan serta pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The diversity policy of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is based on different age, educational background and experience required in performing their duties and responsibilities.

Keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercermin pada tabel dibawah ini.

The diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition is shown in the table below:

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Jenjang Pendidikan Education Level	Usia Age	Pengalaman Experienc
I Nyoman Tjager	Laki-laki / Male	Doktoral / Doctor		
Robbyanto Budiman	Laki-laki / Male	Master		
Garibaldi Thohir	Laki-laki / Male	Master		Terlampir dalam profil In the profile section
Myrnie Zachraini Tamin	Perempuan / Female	Master		
Thilagavathy Nadason	Perempuan / Female	Sarjana / Bachelor		

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Jenjang Pendidikan Education Level	Usia Age	Pengalaman Experienc
Djaja Suryanto Sutandar	Laki-laki / Male	Sarjana / Bachelor		
Simon Tan Kian Bing	Laki-laki / Male	Sarjana / Bachelor		
Zacharia Susantadiredja	Laki-laki / Male	Sarjana / Bachelor		Terlampir dalam profil In the profile section
Anthony Y. Panggabean	Laki-laki / Male	Sarjana / Bachelor		
Njauw Vido Onadi	Laki-laki / Male	Master		

# APLIKASI PEDOMAN GCG

## GCG Guidelines Application

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK. Perseroan menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” sebagai berikut:

Pursuant to POJK No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies, and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 December 2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies, in the implementation of 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of GCG, as well as 25 (twenty five) recommendations submitted by OJK. The Company implements the GCG aspects and principles based on the “*comply or explain*” approaches as follows:

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
A.	Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Relationship Between Public Company with Shareholders in Ensuring the Rights of Shareholders	
	Prinsip 1 / Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Enhancing value of GMS Implementation	
1.1	Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.  Having open/close voting mechanism/ procedure by prioritizing the independency and interest of shareholders.	Implementasi: Sesuai Teknis pengumpulan suara dalam RUPS Perseroan diatur dalam Tata Tertib RUPS (disampaikan kepada pemegang saham yang hadir sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Untuk menjamin transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS Perseroan pada website Perseroan.  Implementation: Comply The voting mechanisms in the Company's GMS is regulated in the GMS Procedures (submitted to the attended shareholders prior to the GMS convention) and in the Company's Articles of Association to uphold shareholder independencies and interests. To ensure transparency, the shareholders and public in general may download the Company's GMS procedures from the Company's website.
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.  All members of the Board of Directors and Board of Commissioners are attending the Annual GMS.	Implementasi: Sesuai Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada saat RUPS Tahunan (RUPST) 2018 tanggal 15 Maret 2018.  Implementation: Comply All members of the Board of Directors and Board of Commissioners were presented at the Annual GMS 2018 dated 15 March 2018.
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.  Summary of the GMS minutes is available in website of the Bank at minimum 1 year.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS pada halaman website Perseroan dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan dapat diunduh pada <a href="http://www.wom.co.id">www.wom.co.id</a> .  Implementation: Comply The Company has published the GMS meeting minutes on the Company's website page and available for more than 1 (one) year. The Annual GMS can be downloaded in the <a href="http://www.wom.co.id">www.wom.co.id</a>



## Aplikasi Pedoman GCC

### GCG Guidelines Application

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
<b>Prinsip 2 / Principle 2</b> <b>Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor</b> <b>Enhancing quality of communication with Shareholders/ Investor</b>		
2.1	<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Having communication policy with shareholders/ investors.</p>	<p><b>Implementasi: Sesuai</b>            Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan telah dimasukkan ketentuan mengenai cara berkomunikasi dengan pihak luar termasuk kepada publik yang didalamnya juga terdapat para pemegang saham atau investor.</p> <p><b>Implementation: Comply</b>            The Company has included this rule in the Code of Conduct regarding the communication methods with external parties including to the public that include the shareholders or investors.</p>
2.2	<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web</p> <p>Disclosure of the communication policy with shareholders/ investors in website.</p>	<p><b>Implementasi: Sesuai</b>            Dalam situs web Perseroan juga tersedia dokumen digital Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat diunduh oleh pemegang saham atau investor. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku juga mengatur ketentuan mengenai cara berkomunikasi dengan pihak luar termasuk kepada publik yang didalamnya juga terdapat para pemegang saham atau investor.</p> <p><b>Implementation: Comply</b>            The digital Code of Conduct is also available in the Company's website that may be uploaded by the shareholders or investors. The Code of Conduct also regulates the communication methods with external parties including to the public that include the shareholders or investors.</p>
<b>B. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b> <b>Function and Role of the Board of Commissioners</b>		
<b>Prinsip 3 / Principle 3</b> <b>Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris</b> <b>Strengthening membership and composition of the Board of Commissioners</b>		
3.1	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>The determination of total members of the BOC has considered the Company's condition</p>	<p><b>Implementasi: Sesuai</b>            Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan telah mempertimbangkan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Perseroan. Per Desember 2018, Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 5 (lima) orang, dimana 2 (dua) orang anggotanya merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.</p> <p><b>Implementation: Comply</b>            The total members of the Company's Board of Commissioners has been in accordance with the rules and has taken into account the Company's needs, conditions and capabilities.            As of December 2018, the Company's Board of Commissioners consists of 5 (five) members, where 2 (two) members are Independent Commissioners. Total members of the Board of Commissioners do not exceed the total members of the Board of Directors.</p>
3.2	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The determination of composition of the Board of Commissioners has considered the required diversity of skills, knowledge and experience.</p>	<p><b>Implementasi: Sesuai</b>            Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, dan usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p><b>Implementation: Comply</b>            The determination of members of the Board of Commissioners composition is carried out by taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required to support its duties implementation as member of the Board of Commissioners. The Company's Board of Commissioners composition has reflected the diversity of its members, both in educational background, professional experience, and age that may be viewed in the profile of each member of the Company's Board of Commissioners.</p>

Aplikasi Pedoman GCG  
GCG Guidelines Application

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
<p>Prinsip 4 / Principle 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Enhancing the quality of implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners</p>		
4.1	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners has self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Dalam Piagam Dewan Komisaris terdapat ketentuan perihal penilaian kinerja Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut dilakukan secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Implementation: Comply The Board of Commissioners performance assessment rules is included in the BOC Charter. This assessment is conducted periodically to improve the quality of duties implementation and responsibilities of the Board of Commissioners.</p>
4.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report of the Company.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Piagam Dewan Komisaris yang didalamnya turut tercantum ketentuan perihal penilaian kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>Implementation: Comply In the BOC Charter, which includes the provisions of the Board of Commissioners' performance assessment rules, is disclosed in the Company's Annual Report.</p>
4.3	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners has a policy regarding resignation due to involvement of financial crime.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk persyaratan yang disebutkan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>Implementation: Comply The Company's BOC Charter stated the provision on the completion of the Board of Commissioners position if the concerned members are no longer meeting the requirements of prevailing regulatories including the requirements stated in the POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that stated during the tenure, the Board of Commissioners members shall meet the requirements of never been convicted of criminal offense that is detrimental to the state finances and/or in relations with the financial industry.</p>
4.4	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners/ Nomination and Remuneration Committee establish a succession policy regarding the process of nomination of members of the Board of Directors.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggungjawab terkait dengan fungsi nominasi diantaranya menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi.</p> <p>Implementation: Comply The Nomination and Remuneration Committee has the duties and responsibilities related to the nomination function among others developing and providing recommendations to the Company's Board of Commissioners regarding the succession policy of the nomination of the Board of Directors members.</p>





## Aplikasi Pedoman GCC

### GCG Guidelines Application

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
C.	Aspek Fungsi dan Peran Direksi Function and Roles of the Board of Directors	
	Prinsip 5 / Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening membership and composition of the Board of Directors	
5.1	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Determination of members of the Board of Directors has considered the condition of the Company as well as effectiveness in decision making.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Jumlah anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan telah mempertimbangkan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Perseroan. Per Desember 2018, Direksi berjumlah 5 (lima) orang, dimana 1 (satu) orang anggotanya merupakan Direktur Independen.</p> <p>Implementation: Comply The total members of the Company's Board of Directors has been in accordance with the rules and has taken into account the Company's needs, conditions and capabilities. As of December 2018, the Board of Directors consists of 5 (five) members, where 1 (one) member is the Independent Director.</p>
5.2	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The determination of composition of members of the Board of Directors has considered the required diversity of skills, knowledge and experience.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Direksi Perseroan.</p> <p>Implementation: Comply The determination of members of the Board of Directors composition is carried out by taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required to support its duties implementation as member of the Board of Directors. The Company's Board of Commissioners composition has reflected the diversity of its members, both in educational background, professional experience, and age that may be viewed in the profile of each member of the Company's Board of Directors.</p>
5.3	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Members of the Board of Directors who responsible for accounting or finance has the skill and/or knowledge in accounting.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Implementation: Comply Member of the Board of Directors in charge of accounting and finance has the experience in finance and accounting.</p>
	Prinsip 6 / Principle 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Enhancing the quality of implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors	
6.1	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors has self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Dalam Piagam Direksi terdapat ketentuan perihal penilaian kinerja Direksi yang ditetapkan dalam Key Performance Indikator (KPI), serta evaluasi kinerja Direksi dilakukan secara mandiri (<i>self assessment</i>) untuk disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Implementation: Comply The BOD Charter stated the provisions on the Board of Directors performance assessment stipulated in the Key Performance Indicators (KPI), as well as the Board of Directors performance evaluation is conducted through self-assessment for the submission to the Nomination and Remuneration Committee for evaluation. The evaluation results from the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.</p>
6.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment to assess the performance of Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the Company.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Piagam Direksi yang didalamnya turut tercantum ketentuan perihal penilaian kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>Implementation: Comply In the BOD Charter, which includes the provisions of the Board of Directors' performance assessment rules, is disclosed in the Company's Annual Report.</p>

Aplikasi Pedoman GCG  
GCG Guidelines Application

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
6.3	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has a policy regarding resignation due to involvement of financial crime.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Dalam Piagam Direksi Perseroan terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Direksi dapat berakhir jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk persyaratan yang disebutkan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Direksi selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>Implementation: Comply The Company's BOD Charter stated the provision on the completion of the Board of Directors position if the concerned members are no longer meeting the requirements of prevailing regulatories including the requirements stated in the POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that stated during the tenure, the Board of Directors members shall meet the requirements of never been convicted of criminal offense that is detrimental to the state finances and/or in relations with the financial industry.</p>
D.	Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Participation	
<p>Prinsip 7 / Principle 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Enhancing the governance aspects of the Company through participation of Stakeholders</p>		
7.1	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Have policy to prevent insider trading.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Perseroan telah memasukkan ketentuan tentang pencegahan terjadinya perdagangan orang dalam (insider trading) dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku. Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku menetapkan bahwa Personil Perseroan tidak diperkenankan melakukan transaksi dengan menggunakan informasi orang dalam (insider information) yaitu informasi material atau penting yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum; serta apabila memiliki informasi orang dalam, maka Personil Perseroan tersebut wajib untuk tidak melakukan transaksi baik untuk diri sendiri maupun mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi, serta tidak meneruskan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.</p> <p>Implementation: Comply The Company has included the insider trading prevention rules in its Code of Conduct. The Code of Conduct regulated that the Company's employees are prohibited to conduct insider trading transactions, namely material or significant information held by the insider employees that are not yet available for public; as well as in the event that insider employees has the informations, then the Company's employees shall not conduct such transactions both for him/her self or influence other parties to conduct the transactions, including to not convey or provide such information to other parties.</p>
7.2	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.</p> <p>Having anti-corruption and anti - fraud policy.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Perseroan memiliki kebijakan Zero Tolerance Policy yang didalamnya mengatur bahwa Perseroan tidak memberikan toleransi atas tindakan fraud yang termasuk didalamnya perbuatan pidana yang merugikan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung antara lain berupa tindak pidana korupsi.</p> <p>Implementation: Comply The Company has Zero Tolerance Policy, which regulates no tolerance on fraud that also consist of criminal offence detrimental to the Company directly or indirectly, among others such as corruption criminal acts.</p>



## Aplikasi Pedoman GCC

### GCG Guidelines Application

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
7.3	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Having the policy on selection and capability enhancement of vendor.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah memiliki SK Kerjasama Dealer No. 069/SKB/BDV/03-18 yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 2018 dan kebijakan terkait ketentuan dan mekanisme prosedur vendor management dan pengadaan barang dan jasa No. 231/SKB/OPRS/09-17 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2017.</p> <p>Implementation: Comply</p> <p>The Company has in place the Dealers Cooperation Decree No. 069/SKB/BDV/03-18 effective as of 7 May 2018 and the policy on vendor management procedures rules and mechanisms, as well as goods and services procurement No. 231/SKB/OPRS/09-17 effective since 1 November 2017.</p>
7.4	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Having the Policy on fulfillment of Creditors' rights.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam masing-masing perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Perseroan juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.</p> <p>Implementation: Comply</p> <p>The creditors' rights protection is stated in each agreed agreement by both parties. As part of the creditors' rights implementation, the Company strives to carry out its obligation as agreed and timely, and strives to prevent the delay or negligence that potentially detrimental to both parties.</p>
7.5	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.</p> <p>Having the whistle blowing system</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan sistem pelaporan melalui sistem penyampaian informasi penyimpangan pada proses bisnis baik di kantor pusat maupun kantor-kantor jaringan Perseroan berdasarkan kebijakan antara lain Surat Kebijakan perihal Email JENDELA sebagai Media Eskalasi Masalah, Kebijakan Zero Tolerance Policy, dan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan.</p> <p>JENDELA adalah sistem whistleblowing berbasis email yang telah diimplementasikan di Perseroan sejak tahun 2008 yang dapat diakses oleh siapa saja dengan menyampaikan email ke <a href="mailto:jendela@wom.co.id">jendela@wom.co.id</a>.</p> <p>Implementation: Comply</p> <p>The Company has in place the whistleblowing system reporting through breaching information dissemination system in the business process of both head office and branch offices of the Company. This is based on the Policy Letter on the Email JENDELA as the Problems Escalation Media, Zero Tolerance Policy, and Code of Conduct.</p> <p>JENDELA is an email-based whistleblowing system that has been implemented in the Company since 2008. This media can be accessed by anyone through sending email to <a href="mailto:jendela@wom.co.id">jendela@wom.co.id</a>.</p>
7.6	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Having a policy of long term incentive to the Board of Directors and employees.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pertimbangan penetapan struktur dan besaran remunerasi termasuk didalamnya insentif kepada Direksi tercakup pada kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan kebijakan pemberian insentif kepada karyawan diberikan dengan memperhatikan kinerja Perseroan.</p> <p>Implementation: Comply</p> <p>The policy on the consideration for the remuneration structure and amount determination including the incentives for the Board of Directors is stated in the Company's Nomination and Remuneration Committee policy and the incentive provision policy to the employees is provided by taking into account the company's performance.</p>

Aplikasi Pedoman GCG  
GCG Guidelines Application

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
E.	Keterbukaan Informasi Information Disclosure	
	Prinsip 8 / Principle 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Enhancing the implementation of Information Disclosure	
8.1	<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Utilizing information technology more widely than website as media disclosure.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Perseroan telah memanfaatkan teknologi informasi, baik situs web Perseroan, media internal, dan media komunikasi massa, untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada stakeholders.</p> <p>Implementation: Comply The Company has utilized information technology, both for the Company's website, internal media, and mass communication media, to implement information disclosures to the stakeholders.</p>
8.2	<p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali.</p> <p>The Company's annual report discloses the ultimate beneficiary in the Company's shareholding of at least 5%, other than disclosure of the ultimate beneficial owner in the Company's shareholding through the ultimate and controlling shareholders.</p>	<p>Implementasi: Sesuai Laporan Tahunan Perseroan telah mengungkapkan daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih. Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>Implementation: Comply The Company's Annual Report has disclosed the Company shareholders registry with share ownership of 5% or more. The Company discloses the final beneficiary owners on the share ownerships of at least 5% in the Company's Annual Report.</p>